

# EKONOMI

## **Integrasi Konsep Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam**

**Elfina Yenti, S.E, Ak., M.Si, CA.**

**Dr. H. Syukri Iska, M.Ag.**



**CV. JASA SURYA**

Jl. Jati Adabiah. No. 95. Telp/fax. (0751) 25678. Padang

Email: [penerbit\\_jasasurya@yahoo.com](mailto:penerbit_jasasurya@yahoo.com)

Anggota IKAPI. No. 009/SBA/11

**Ekonomi**  
**Integrasi Konsep Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam**

**Penulis**

Elfina Yenti, S.E, Ak., M.Si, CA.  
Dr. H. Syukri Iska, M.Ag.

**Perwajahan Isi &PenataLetak**

Marhen

**Desain Cover**

Marhen

Hak pengarang dilindungi undang-undang  
All right reserved

Cetakan I, Desember 2017  
ISBN: 978-602-8860-61-1

**Diterbitkan oleh**

CV. Jasa Surya.  
Jl. Jati Adabiah. No. 95. Telp/fax. (0751) 25678. Padang  
Email: penerbit\_jasasurya@yahoo.com  
Anggota IKAPI. No. 009/SBA/11

Ekonomi: Integrasi Konsep Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam/  
Elfina Yenti, Syukri Iska; Cet. I--Padang: Jasa Surya, 2017.  
viii + 174 hlm.; 15,5 x 23 cm.

***Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002***

***Tentang Hak Cipta***

**Ketentuan Pidana:**

Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

*Alhamdulillah*, puji dan syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan inayah kepada kami, sehingga dapat menyelesaikan buku yang berada di tangan pembaca saat ini. Demikian juga shalawat dan salam kami do'akan semoga senantiasa dilimpahkan kepada sang inspirator Nabi Muhammad SAW.

Buku ini ditulis dalam rangka tidak hanya sekedar pengisian khazanah keilmuan karena nyaris belum adanya rujukan atau buku pegangan bagi pendidik dan peserta didik tingkat SLTA, melainkan juga dalam rangka pemenuhan filosofis keilmuan dalam konsep Islam, yakni integrasi sekaligus sebagai antitesa terhadap bentuk keilmuan dikotomis yang telah berkembang dalam berabad-abad selama ini, termasuk dalam hal ini bidang ilmu Ekonomi.

Padahal, Islam sebagai pedoman hidup yang paripurna (*kaffah*), tidak menempatkan kehidupan ekonomi umatnya sebagai sesuatu yang luput dari pengaturannya. Hal itu terbukti tidak hanya dapat dipelajari melalui garis-garis prinsip dalam *nash* (Al-Qur'an dan Sunnah), melainkan juga dapat dibuktikan secara empirik, baik yang terlihat pada diri Muhammad SAW, para sahabatnya dan Ulama-ulama awal keislaman.

Alhamdulillah, untuk saat ini semakin terlihat konsep ekonomi dalam Islam secara aktual, yang ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya lembaga-lembaga keuangan Islam, baik di Indonesia maupun pada negara-negara sekuler sekalipun.

Namun belum banyak buku-buku referensi pembelajaran yang dapat memenuhi perkembangan ekonomi Islam tersebut, khususnya pada tingkat sekolah menengah.

Semoga dengan kehadiran buku ini, semakin tersosialisasi dan dipahami oleh semua anak didik, tentang konsep dasar ekonomi dalam Islam. Sehingga semakin meningkat populasi praktisi dan akademisi ekonomi Islam.

Untuk terwujudnya buku ini, tidak terlepas dari dukungan Rektor IAIN Batusangkar beserta jajarannya. Dengan demikian ungkapan terima kasih kami sampaikan, semoga tanggung jawab lembaga terhadap pencerdasan umat dan bangsa semakin meningkat.

Batusangkar, November 2017

**Penulis**

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I KONSEP ILMU EKONOMI</b>	
A. Pengertian Ilmu Ekonomi.....	1
B. Pembagian Ilmu Ekonomi.....	4
C. Prinsip Ekonomi.....	7
D. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam.....	10
E. Evaluasi.....	12
<b>BAB II PERMASALAHAN EKONOMI</b>	
A. Kebutuhan Manusia.....	17
B. Kelangkaan Barang dan Sumber Daya.....	23
C. Pandangan Ekonomi Islam dalam Menyikapi Sumber Daya Ekonomi yang Terbatas.....	25
D. Masalah Ekonomi Menurut Ekonomi Modern.....	26
E. Perbedaan Kebutuhan dan Keinginan.....	29
F. Kegiatan/Tugas Siswa.....	30
G. Evaluasi.....	30
<b>BAB III PERILAKU KONSUMEN DAN PRODUSEN</b>	
A. Pelaku Kegiatan Ekonomi.....	37
B. Arus Lingkaran Kegiatan Ekonomi.....	41
C. Peran Konsumen dan Produsen.....	44
D. Konsumsi.....	46
E. Teori Perilaku Konsumen.....	47

F.	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konsumsi.....	49
G.	Perilaku Konsumen menurut Konsep Islam .....	51
H.	Preferensi Konsumsi dan Alokasi Anggaran.....	52
I.	Preferensi Konsumsi yang Islami.....	54
J.	Produksi.....	57
K.	Perilaku Produsen .....	62
L.	Perilaku Produsen menurut Konsep Islam.....	63
M.	Permintaan .....	64
N.	Penawaran .....	65
O.	Evaluasi.....	66

#### **BAB IV PASAR**

A.	Pasar .....	67
B.	Struktur Pasar .....	69
C.	Proses Terbentuknya Harga dalam Ekonomi Islam ...	76
D.	Evaluasi.....	80

#### **BAB V BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK**

<b>A.</b>	<b>Sejarah Bank</b> .....	81
B.	Pengertian Bank Syariah .....	92
C.	Fungsi Bank Syariah .....	92
D.	Perbedaan Bank Konvensional Dengan Bank Syariah ..	93
E.	Sejarah Perkembangan Bank Syariah .....	95
F.	Perkembangan Bank Syariah di Indonesia .....	98
G.	Prinsip Bank Syariah .....	102
H.	Ciri-ciri Bank Syariah.....	103
I.	Produk-Produk Bank Syariah .....	104
J.	Lembaga Keuangan Syari'ah Non Bank .....	106
K.	Contoh Lembaga Keuangan Syariah Non Bank.....	106
L.	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) .....	107
M.	Evaluasi.....	111

<b>BAB VI</b>	<b>SISTEM DAN ALAT PEMBAYARAN</b>	
	A. Sistem Pembayaran .....	113
	B. Uang dan Bank .....	114
	C. Sistem Pembayaran Dalam Ekonomi Islam .....	118
	D. Evaluasi.....	120
<b>BAB VII</b>	<b>MANAJEMEN</b>	
	A. Pengertian Manajemen.....	121
	B. Tingkat-tingkat Manajemen.....	123
	C. Fungsi Manajemen .....	124
	D. Prinsip-prinsip Manajemen .....	132
	E. Bidang-bidang Manajemen .....	133
	F. Manajemen Syariah .....	142
	G. Evaluasi.....	147
<b>BAB VIII</b>	<b>KOPERASI</b>	
	A. Pengertian Koperasi .....	152
	B. Ciri-Ciri Koperasi.....	152
	C. Koperasi Beserta Kelebihan dan Kelemahannya .....	152
	D. Perangkat Organisasi Koperasi .....	155
	E. Sisa Hasil Usaha dan Dana Cadangan .....	158
	F. Peran Koperasi dalam Perekonomian Indonesia untuk Meningkatkan Kemakmuran Rakyat.....	159
	G. Koperasi Syariah .....	160
	H. Koperasi Sekolah.....	162
	I. Evaluasi.....	164
	<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>169</b>
	<b>TENTANG PENULIS.....</b>	<b>173</b>





# BAB I

## KONSEP ILMU EKONOMI

### **Tujuan Pembelajaran**

Dengan mempelajari bab ini, siswa diharapkan dapat :

1. Mendeskripsikan dan menyajikan pengertian ilmu ekonomi
2. Mendeskripsikan dan menyajikan pembagian ilmu ekonomi
3. Mendeskripsikan dan menyajikan prinsip ekonomi

### **A. Pengertian Ilmu Ekonomi**

Kata-kata “ekonomi” sangat sering didengar dalam kehidupan sehari-hari, baik ketika menyaksikan siaran televisi ataupun ketika membaca berita di koran. Contohnya: tingkat suku bunga, investasi, harga BBM, perbankan, pendapatan, konsumsi, kemiskinan, dan sebagainya. Bahkan banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi dihubungkan dengan ekonomi, misalnya; kebakaran lahan menimbulkan kerugian ekonomi, erupsi gunung merapi menyebabkan ekonomi masyarakat menjadi lumpuh, tidak bisa melanjutkan pendidikan karena masalah ekonomi, dan sebagainya. Untuk menyelesaikan masalah-masalah di atas muncul suatu bidang ilmu, yaitu ilmu ekonomi.

Ilmu Ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi dan tidak terbatas serta berkembang dengan sumber daya yang ada, melalui pilihan kegiatan produksi,

konsumsi, dan distribusi. Xenophon (440-355 SM) mengungkapkan bahwa secara etimologi, kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, *Oikonomia*, yang merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *oikos* yang berarti rumah tangga, dan *nomos* yang berarti aturan, kaidah atau pengelolaan. Oleh karena itu, pengertian ekonomi secara etimologi, adalah aturan- aturan, kaidah-kaidah atau cara pengelolaan suatu rumah tangga. Adapun secara terminologi, sebagaimana Paul A. Samuelson (2001) mendefinisikan ekonomi sebagai kajian masyarakat pengguna sumber daya yang langka, untuk memproduksi komoditi-komoditi berharga dan mendistribusikannya kepada masyarakat luas. Sementara itu, Alfred Marshall, sebagaimana dikutip oleh Mubyarto (1987) mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai suatu studi tentang manusia dalam kehidupannya sehari hari, yang mempelajari tindakan individu atau kelompok yang berkaitan erat dengan pencapaian atau pemenuhan alat kebutuhan materi bagi kesejahteraan hidup. (Bank Indonesia : 2014 : 1).

Untuk melengkapi pendapat ahli di atas, Dominick Salvatore dan Eugene A. Diulio (2004) mendefinisikan ekonomi sebagai ilmu sosial yang mempelajari individu-individu dan organisasi yang terlibat dalam produksi, konsumsi, dan distribusi barang dan jasa. Adapun Hermawan Kertajaya, mengartikan ekonomi sebagai suatu keadaan di mana suatu sektor industri melekat padanya. Sementara itu, John S. Mill mengartikan ilmu ekonomi sebagai ilmu pengetahuan praktik tentang penagihan dan pengeluaran, dan Adam Smith mengartikan ekonomi sebagai penyelidikan tentang sebab dan keadaan kekayaan suatu negara.

Berdasarkan pengertian menurut para ahli di atas dapat ditarik benang merahnya, bahwa ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa dalam rangka mencapai kesejahteraan atau kemakmuran. Dalam kajian ilmu pengetahuan, ekonomi dimasukkan ke dalam bagian ilmu-ilmu sosial. Hal ini karena ekonomi terkait dengan masalah manusia yang merupakan kompetensi dasar dalam kajian ilmu sosial. (Bank Indonesia: 2014 : 2).

## 2 || Ekonomi; Integrasi Konsep Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam

Dalam konsep ekonomi Islam istilah ekonomi dialih-bahasakan ke dalam bahasa Arab dengan *qashada*. Kata *qashada* ini terdapat dalam surat Luqman (31) : 19 dengan perkataan *qashid* yang berarti sederhana, kata *qashad* dalam surat al-Nahl (16) : 9 yang berarti jalan lurus atau stabil, kata *qashidan* dalam surat al-Taubah (9) : 42 yang berarti keinginan atau keperluan, kata *Imuqtashidun* dalam surat Luqman (31) : 32 yang berarti pertengahan, dan sebagainya. (Iska, 2012: 127).

Untuk pelaksanaan kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari, dalam Islam sudah diatur dalam Alquran dan Sunnah dan Ijtihad para Muftahid, sebagaimana yang tertuang dalam kitab-kitab Fikih Muamalah.

**Gambar 1.1**  
Kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup



Sumber: [stie.mdp.ac.id](http://stie.mdp.ac.id)



Sumber: [dwianarahmawati.blogspot.com](http://dwianarahmawati.blogspot.com)



Sumber: [cantikaindonesia.blogspot.com](http://cantikaindonesia.blogspot.com)

## B. Pembagian Ilmu Ekonomi

Ruang lingkup pembahasan ilmu ekonomi sangat luas dan beragam. Oleh karena itu, ilmu ekonomi dibedakan atas 3 dasar, yaitu:

1. Ekonomi deskriptif (*descriptive economics*) bekerja dengan mengumpulkan berbagai informasi faktual mengenai masalah ekonomi. Ekonomi diskriptif menggambarkan keadaan perekonomian yang sebenarnya terjadi di masyarakat.
2. Teori ekonomi (*economic theory*) berusaha menggeneralisasi data data ekonomi dan memberikan penafsiran atas data tersebut. Teori ekonomi merupakan kumpulan asas atau hukum ekonomi yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan kebijakan ekonomi. Teori ekonomi adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bertugas menerangkan hubungan antara peristiwa-peristiwa ekonomi dan merumuskan hubungan-hubungan tersebut dalam suatu hukum atau teori ekonomi. Teori ekonomi juga merupakan kerangka konsep yang berasal dari data-data konkret yang disusun, diolah, serta diuji coba sehingga akhirnya membentuk asumsi yang bersifat umum. Teori ekonomi terbagi atas:
  - a. Ekonomi makro adalah bagian dari ilmu ekonomi yang khusus mempelajari mekanisme kerja seluruh kegiatan perekonomian secara global.

- b. Ekonomi mikro adalah bagian ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh unit-unit terkecil, seperti perilaku individu dan rumah tangga, produksi atau perusahaan dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas.
3. Ekonomi terapan (*applied economics*) merupakan cabang ilmu ekonomi yang menggunakan hasil kajian teori ekonomi untuk menjelaskan fakta fakta yang dikumpulkan oleh ekonomi deskriptif.

Berbeda dengan ekonomi murni yang berkaitan dengan teori secara abstrak, ekonomi terapan dipandang sebagai sarana untuk solusi bagi masalah masalah praktis. Ekonomi terapan termasuk dalam arena kebijakan pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah berdasarkan bukti empiris. (Alam S : 2013 : 6)

Ilmu ekonomi juga dapat dibagi ke dalam delapan cabang:

#### **1. Ilmu ekonomi moneter**

Ilmu ekonomi moneter adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang uang, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya. Berbagai aspek yang terkait langsung maupun tak langsung dengan hal hal tersebut, seperti inflasi, jumlah uang beredar, dan tingkat suku bunga, dibahas pada cabang ilmu ekonomi ini.

#### **2. Ilmu ekonomi publik**

Ilmu ekonomi publik adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang kebijakan pemerintah dalam perekonomian. Hal hal yang dibahas pada ilmu ekonomi ini antara lain adalah APBN, APBD, utang pemerintah, pajak, dan retribusi.

#### **3. Ilmu ekonomi industri**

Adalah cabang ilmu ekonomi yang memfokuskan pembahasan pada interaksi berbagai perusahaan dalam suatu industri. Interaksi tersebut dapat berupa persaingan usaha, kinerja perusahaan, atau kartel.

Pembahasan pada cabang ilmu ekonomi ini termasuk dalam lingkup ekonomi mikro.

**4. Ilmu ekonomi internasional**

Adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang kegiatan perekonomian antar bangsa atau antar negara. Kegiatan perekonomian tersebut dapat berupa transaksi perdagangan antar negara, aliran investasi antar negara, dan neraca pembayaran.

**5. Ilmu ekonomi regional**

Adalah cabang ilmu ekonomi yang antara lain membahas tentang interaksi ekonomi antar wilayah dan proses perkembangan suatu wilayah.

**6. Ilmu ekonomi sumber daya alam (SDA)**

Adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas masalah dan alokasi sumber daya alam yang optimal menurut ekonomi. Pokok bahasan pada ilmu ekonomi ini di antaranya adalah eksternalitas positif dan negatif.

**7. Ilmu ekonomi sumber daya manusia (SDM)**

Adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas faktor produksi tenaga kerja. Pembahasan pada cabang ini antara lain adalah masalah pengangguran, upah minimum, dan tingkat pendidikan calon tenaga kerja.

**8. Ilmu ekonomi Syariah**

Bertujuan untuk menerapkan ekonomi Syariah. Pokok pembahasan dalam cabang ilmu ekonomi ini antara lain adalah prinsip bagi hasil, penghapusan riba dalam perekonomian, dan zakat. (Alam S : 2013 :8). Sedangkan menurut Karim: 2003, ilmu ekonomi Syariah adalah sistem ekonomi yang menjelaskan semua fenomena tentang perilaku pilihan dan pengambilan keputusan dalam setiap unit ekonomi dengan memasukkan tata aturan Syariah sebagai variabel yang mempengaruhi pengambilan keputusan ekonomi.

Sementara Mannan (1999) mendefinisikan ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat

yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam sebagai suatu "sistem" dapat dikatakan bahwa ekonomi Islam itu sesungguhnya adalah bagian dari tata kehidupan yang lengkap, berdasarkan empat bagian nyata dari pengetahuan, yaitu: "pengetahuan yang diwahyukan" (yakni Alquran), praktek-praktek yang berlaku pada waktu itu dalam masyarakat sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan ucapan-ucapan yang bernas (yakni Sunnah dan Hadis), deduksi analogik, penafsiran berikutnya dan konsensus yang tercapai kemudian dalam masyarakat, atau oleh para ulama (yaitu *ijma'*). "Sistem" ini memuat suatu mekanisme yang *built-in* untuk pemikiran jernih (yaitu *ijtihad*) tentang persoalan dan masalah baru sehingga penyelesaian dapat dicapai.

Senada dengan Manan, Adnan (2005) mendefinisikan ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berjalan di atas rel syariah atau hukum Islam. Pengertian ini dilengkapi oleh Izzan (2006) yang mendefinisikan ekonomi Islam adalah kumpulan dari dasar-dasar umum ekonomi yang diambil dari Alquran dan Sunnah Rasulullah serta dari tatanan ekonomi yang dibangun di atas dasar-dasar tersebut, sesuai dengan berbagai macam lingkungan dan setiap zaman.

### **C. Prinsip Ekonomi**

Prinsip ekonomi adalah garis garis penuntun yang digunakan oleh pelaku ekonomi dalam melaksanakan tindakan ekonomi. Prinsip ekonomi dapat diartikan juga sebagai pedoman untuk melakukan tindakan ekonomi. Prinsip ekonomi tersebut adalah dengan pengorbanan tertentu memperoleh hasil maksimal atau mengorbankan sekecil-kecilnya untuk hasil tertentu. (Bank Indonesia : 2014 : 3).

Prinsip ekonomi yang sebelumnya pernah berkembang yakni "dengan pengorbanan yang minimal dapat menghasilkan hasil yang maksimal" sudah tidak tepat, karena hanya akan melahirkan manusia liberal yang serakah dan menghalalkan segala cara.

Prinsip ekonomi diterapkan pada 3 kegiatan pokok, (Kinanti : 2014 : 12) yaitu :

## 1. Produksi

Produksi merupakan kegiatan mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi dan atau barang jadi. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Produsen pun menerapkan prinsip ekonomi, yaitu:

- a. Mengikuti selera masyarakat
- b. Menentukan biaya produksi yang hemat dan efisien
- c. Menentukan cara berproduksi yang paling efektif
- d. Menghasilkan barang berkualitas tinggi, dan
- e. Memperoleh keuntungan.

**Gambar 1.2**  
**Kegiatan Produksi**



*Sumber: Simplenews05.blogspot.com*

## 2. Distribusi

Dalam distribusi, alat transportasi merupakan kebutuhan penting baik darat, air, maupun udara. Alat transportasi berfungsi sebagai alat untuk menyalurkan barang-barang antara produsen, distributor, dan konsumen. Distribusi terjadi akibat adanya kebutuhan yang harus dipenuhi setiap manusia. Dengan alat transportasi, kegiatan menyalurkan barang dari suatu tempat ke tempat lain dapat berjalan dengan baik sesuai waktu yang telah ditentukan. Kondisi ini juga harus didukung oleh kondisi dan situasi yang baik.



**Gambar 1.3**  
**Kegiatan distribusi**



*Sumber: Heningcahyar99.blogspot.com*

### **3. Konsumsi**

Konsumsi merupakan kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang dan atau jasa. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Konsumen memiliki prinsip, yaitu:

- a. Membuat penyesuaian atas pengeluaran dan pendapatan,
- b. Memilih barang berkualitas baik,
- c. Menawar harga barang dengan pantas,
- d. Memilih barang/jasa sesuai prioritas dan tepat guna.

**Gambar 1.3**  
**Kegiatan konsumsi**



*Sumber: geosciencezone.blogspot.com*

## D. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Menurut Iska (2012), Ekonomi Islam dibangun atas dasar nilai-nilai utama yang dijadikan landasan pokok dalam penerapan sistem ekonomi dalam Islam. Di antara nilai-nilai utama atau prinsip-prinsip tersebut ialah :

### 1. *Ilahiyah dan Tauhid*

Dalam prinsip ini dipahami bahwa apa saja yang ada di alam ini ialah milik Allah. Dalam konteks ekonomi, pelaku ekonomi harus meyakini bahwa semua yang ada pada mereka adalah milik Allah yang diperuntukkan bagi mereka sebagai rezeki dan mereka pada dasarnya adalah sebagai pemegang amanah (*trustee*) yang harus diolah dan digunakan sesuai garis-garis yang telah ditetapkan-Nya, sebagaimana firman Allah dalam Surat Ibrahim (14) : 32 :

*“Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air itu buah-buahan sebagai rezeki bagi kamu, dan Dia menundukkan bahtera bagi kamu supaya berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan bagimu sungai-sungai”.*

### 2. *Nubuwwah*

Prinsip *Nubuwwah* bermaksud bahwa harus menempatkan Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan dalam menjalankan roda perekonomian, karena dia adalah sebaik-baik manusia untuk diteladani. Ada beberapa sikap dan perilaku Nabi Muhammad yang wajib diteladani :

**Pertama, Fathanah (smart)**, artinya Nabi menjalankan perekonomian, baik sebagai pelaku ekonomi maupun sebagai pembuat aturan sebagai kepala negara yang selalu mencerminkan kecerdasan dan profesional. Contoh, ketika Nabi diminta untuk membatasi harga barang di pasar, dia tidak mau dan membiarkan harga mengikuti mekanisme pasar. Karena kalau hal itu dia lakukan akan mengurangi semangat pedagang dan akan menyebabkan kelesuan dalam ekonomi.

**Kedua, Amanah dan Shiddiq.** Nabi Muhammad memiliki kepribadian yang *amanah* (dipercayai dan bertanggungjawab) dan jujur. Sifat ini menjadi

prinsip dasar dan penggerak dalam pelaksanaan usaha ekonomi bagi umat. Sebagaimana sabdanya yang diriwyatkan oleh Ibnu Umar:

*"Rasulullah saw bersabda : " Pedagang yang dipercaya, jujur dan Muslim akan ditempatkan bersama para syahid pada hari kiamat".*

**Ketiga, *Tabligh*** (transparan dan akuntabilitas). Sebagai pelaku ekonomi, apa lagi yang tergolong dalam rumpun peserikatan, maka transparansi dan akuntabilitas dengan penuh rasa tanggungjawab merupakan keniscayaan dalam Islam. Allah swt telah menggarikan dalam surat al-Baqarah (2) : 282 :

*"Hai oarang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang dengan janji yang ditetapkan masanya, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan adil, dan janganlah seorang penulis enggan menuliskannya sebagi mana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis..... dan hendaklah disaksikan dua saksi laki-laki di antara kamu...."*

Tujuan pencatatan yang dimaksudkan dalam ayat tersebut tentunya tidak sebatas untuk memperlihatkan kejujuran dan kebenaran semata, melainkan juga dapat dipahami perllu secara terbuka dan penuh tanggungjawab dalam melaksanakan interaksi ekonomi, yang tergambar melalui perintah "menuliskan dan disaksikan oleh pihak lain". Keterbukaan dan pertanggung-jawaban adalah upaya untuk mengantisipasi manipulasi, *negative thinking (suk dzan)* dari pihak lain yang akibatnya mengarah konflik. Cara seperti ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw sebagai kepribadian *tabligh* yang dia miliki untuk diteladani.

### **3. Halal**

Suatu hal yang sangat prinsip dalam sistem ekonomi Islam ialah status transaksi yang dilakukan wajib dalam bentuk hukum halal. Kehalalannya dapat dilihat selagi ia sesuai dengan garisan dan landasan Alquran dan Sunnah Rasulullah saw, baik dalam konteks rukun dan syarat, objek yang ditransaksikan, juga dipandang dalam sudut proses mendapatkannya.

#### **4. Adil dan seimbang**

Prinsip lain dalam ekonomi Islam adalah harus ada keadilan dan keseimbangan. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' (4) : 135 :

*"Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi (dalam menegakkan keadilan) karena Allah.....".*

Identitas utama dalam usaha ekonomi Islam adalah menganut pola bagi hasil yang dipahami bahwa akan ada bentuk keuntungan dan kerugian yang dinikmati dan ditanggung oleh semua pihak yang terlibat dalam usaha ekonomi. Konsep ini memberikan gambaran tentang prinsip keseimbangan dan keadilan karena adanya pembagian keuntungan dan kerugian yang dibagi dan ditanggung di antara pelaku ekonomi tersebut secara seimbang dan proporsional.

### **E. Evaluasi**

#### **1. Pilihan ganda**

- a. Kata ekonomi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu *oikos* dan *nomos*. Kata *oikos* berarti:
  - 1) Pengurusan
  - 2) Pengelolaan
  - 3) Aturan
  - 4) Prinsip
  - 5) Rumah tangga
- b. Pada dasarnya, ilmu ekonomi adalah:
  - 1) Studi tentang cara masyarakat mengelola sumber daya langka
  - 2) Studi tentang cara masyarakat mengelola pembuatan barang industri
  - 3) Studi tentang cara masyarakat melakukan konsumsi ideal

- 4) Studi tentang cara masyarakat mengelola sumber daya ekonomi agar mencapai kemakmuran
  - 5) Studi tentang pemeliharaan sumber daya ekonomi untuk melakukan konsumsi
- c. Ilmu ekonomi dapat dibagi menjadi:
- 1) Kelompok ekonomi deskriptif, kelompok ekonomi teori, dan kelompok ekonomi terapan
  - 2) Kelompok ekonomi pertanian, kelompok ekonomi industri, kelompok ekonomi publik
  - 3) Kelompok ekonomi makro, kelompok ekonomi mikro, dan kelompok ekonomi terapan
  - 4) Kelompok ekonomi pertanian, kelompok ekonomi industri, dan kelompok ekonomi terapan
  - 5) kelompok ekonomi induk, kelompok ekonomi cabang, dan kelompok ekonomi lanjutan
- d. Bidang bahasan ekonomi deskriptif adalah:
- 1) cara pemerintah menggunakan sumber daya demi kemakmuran rakyat
  - 2) cara individu dan masyarakat mengelola sumber daya ekonomi untuk mencapai kemakmuran
  - 3) pengumpulan informasi faktual mengenai masalah ekonomi
  - 4) mengkritik peran swasta dan pemerintah dalam menghadapi kelangkaan
  - 5) asumsi bahwa setiap individu bekerja secara rasional
- e. Cara kerja ekonomi terapan adalah:
- 1) memanfaatkan hasil hasil pemikiran teori ekonomi untuk memberikan penjelasan atas fakta fakta yang telah dikumpulkan oleh ekonomi deskriptif

- 2) memberi nasihat kepada pemberri keputusan berdasarkan analisis data atau gejala yang diolah oleh ekonomi deskriptif
  - 3) mengambil kesimpulan dari teori teori ekonomi dengan cara menganalisis masalah dan menggunakan data
  - 4) menerapkan suatu solusi dan kesimpulan terhadap suatu masalah ekonomi
  - 5) menerapkan kesimpulan dari suatu teori ekonomi terhadap suatu situassi ekonomi yang tidak menentu
- f. Dalam menganalisis masalah ekonomi , para menggunakan assumsi dengan tujuan:
- 1) masalah yang tterjadi dapat dibandingkan dengan masalah yang ada
  - 2) agar situasi yang rumit menjadi sederhana
  - 3) agar masalah ekonomi diubah menjadi data data matematika yang fleksibel
  - 4) agar masalah ekonomi dapat dibagi menjadi beberapa submasalah
  - 5) agar kesimpulan kesimpulan ddari gejala ekonomi dapat dibahas dengan jelas
- g. Pernyataan yang termasuk pernyataan ekonomi positif adalah . . .
- 1) pajak harus dipungut atas dasar pengeluaran
  - 2) sebaiknya pendapatan negara dari pajak digunakan untuk membiayai orang miskin
  - 3) seharusnya pendapatan nasional dibagi secara merata
  - 4) sebagian pendapatan orang kaya didistribusikan pada orang miskin
  - 5) sebaiknya masyarakat sebagai pemilik ekonomi
- h. Permasalahan kenaikan harga barang pookok dan kelangkaan BBM di berbagai daerah termasuk dalam lingkup permbahasan ilmu ekonomi . . .

- 1) moneter
  - 2) mikro
  - 3) regional
  - 4) sumber daya alam
  - 5) publik
- i. Fenomena yang tidak termasuk kajian ekonomi deskriptif adalah  
....
- 1) kenaikan harga barang pokok di beberapa provinsi
  - 2) kebijakan pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM
  - 3) perkembangan usaha kecil menengah di Sulawesi Selatan
  - 4) penurunan daya beli masyarakat akibat inflasi
  - 5) prediksi perubahan nilai indeks harga saham gabungan
- j. Hal yang tidak termasuk kegunaan ilmu ekonomi bagi pemerintah adalah:
- 1) mengurangi jumlah pengangguran dan penduduk miskin
  - 2) memberantas buta huruf dan wabah penyakit
  - 3) meningkatkan inflasi dan suku bunga bank
  - 4) membatasi jumlah dan jenis komoditas ekspor impor
  - 5) merancang APBN dan mengurangi defisit anggaran Negara

**2. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan tepat.**

- a. Sebutkan definisi ekonomi menurut Paul A. Samuelson.
- b. Sebutkan pembagian ilmu ekonomi.
- c. Apakah permasalahan yang dibahas dalam ilmu ekonomi syariah?





# BAB II

## PERMASALAHAN EKONOMI

### **Tujuan Pembelajaran**

Dengan mempelajari bab ini, siswa diharapkan dapat :

1. Menjelaskan kebutuhan manusia
2. Mendeskripsikan pengertian kelangkaan
3. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kelangkaan
4. Mengidentifikasi pengalokasian sumber daya yang mendatangkan manfaat bagi rakyat banyak
5. Mendeskripsikan pola perilaku manusia dalam menyikapi sumber daya ekonomi yang terbatas sesuai dengan konsep ekonomi Islam
6. Mendeskripsikan cara memenuhi kebutuhan menurut ekonomi Islam
7. Menjelaskan bahwa kebutuhan manusia (*need*) itu bersifat terbatas, dan yang tidak terbatas adalah keinginan (*want*).

### **A. Kebutuhan Manusia**

Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan berupa barang/ jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup dan dapat mencapai kemakmuran. Tanpa adanya barang dan jasa tersebut aktivitas hidup yang kita jalani akan terganggu. Jika ketersediaan barang dan jasa tersebut tidak mengancam kelangsungan hidup manusia, itu dinamakan dengan keinginan. Inti masalah ekonomi pada hakekatnya adalah kebutuhan manusia akan barang dan jasa serta ketersediaan jumlah barang dan jasa tersebut.

Kebutuhan manusia dapat dikelompokkan berdasarkan jenis dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

## 1. Jenis-jenis Kebutuhan Manusia

Menurut Alam S. (2013), jenis-jenis kebutuhan manusia dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Kebutuhan berdasarkan tingkat intensitasnya
  - 1) Kebutuhan Primer, yaitu kebutuhan yang erat kaitannya dengan kelangsungan hidup manusia. Agar dapat hidup manusia harus makan, minum dan berpakaian.

**Gambar 2.1**  
Contoh kebutuhan primer



*Sumber: Gurupendidikan.net*

- 2) Kebutuhan sekunder. Setelah manusia dapat memenuhi kebutuhan primernya, manusia juga masih memerlukan kebutuhan lainnya yang bersifat pelengkap dan sering disebut sebagai kebutuhan sekunder. Contohnya sepatu, tas, telpon genggam, arloji dan perlengkapan kerja.

**Gambar 2.2**  
**Contoh kebutuhan sekunder**



*Sumber: Slideshare.net*

- 3) Kebutuhan Tersier, yaitu kebutuhan yang bersifat mewah. Pada umumnya seseorang masih merasa belum cukup meskipun dia telah dapat memenuhi kebutuhan primer dan sekundernya. Dia masih memiliki keinginan untuk, memiliki mobil, piano, kapal pesiar, serta kebutuhan mewah lainnya.

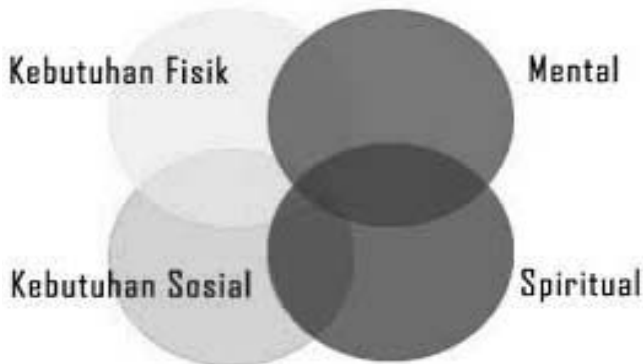
**Gambar 2.3**  
**Contoh kebutuhan sekunder**



*Sumber: Pipitdevi.wordpress.com*

- b. **Kebutuhan berdasarkan sifat pemenuhan kebutuhan**
- Jenis kebutuhan ini digolongkan berdasarkan sasaran alat pemenuhan kebutuhan yang digunakan. Kebutuhan berdasarkan sifat pemenuhan kebutuhan ini terdiri atas dua:
- 1) **Kebutuhan Jasmani** atau kebutuhan fisik, erat kaitannya dengan upaya manusia menutupi atau memperindah jasmani manusia seperti, pakaian, sepatu dan pangan (makan, minum dan obat-obatan).
  - 2) **Kebutuhan Rohani**, berkaitan dengan upaya manusia untuk memenuhi kepuasan jiwa atau batin seperti rekreasi, motivasi, pencerahan spiritual, dan sebagainya.

**Gambar 2.4**  
**Kebutuhan berdasarkan sifat pemenuhan kebutuhan**



*Sumber: Wapannuri.com*

- c. **Kebutuhan berdasarkan subjek yang memenuhkan**
- Subjek pengguna alat pemenuhan kebutuhan dapat dibedakan sebagai berikut:
- 1) **Kebutuhan Individu**, di butuhkan oleh diri pribadi dengan berbagai individu yang berbeda. Sebagai contoh : petani membutuhkan cangkul, benih, pupuk dan sebagainya. Sementara siswa membutuhkan seperti sepatu, buku, pena dan sebagainya.

- 2) Kebutuhan Kolektif diperlukan oleh kelompok individu atau kelompok masyarakat disebut juga dengan kebutuhan sosial. Seperti keamanan, jalan raya, air bersih dan lain-lain.
- d. Kebutuhan berdasarkan waktu
- Berdasarkan waktu pemenuhannya kebutuhan dibagi :
- 1) Kebutuhan Sekarang adalah kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi saat ini. Misalnya orang yang sakit harus segera berobat agar sembuh. Orang yang lapar harus segera makan, orang yang haus harus segera minum.
  - 2) Kebutuhan di masa depan adalah kebutuhan yang sifatnya tidak mendesak dan dapat ditunda sampai dengan waktu yang telah ditentukan. Misalnya orang tua menabung untuk persiapan uang sekolah anaknya atau berekreasi bersama keluarga.

Dalam konsep Ekonomi Islam kebutuhan manusia dalam konsumsi sebenarnya memiliki tingkat urgensi yang tidak selalu sama. Terdapat prioritas-prioritas di antara satu dengan lainnya yang menunjukkan tingkat kemanfaatan dan kemendesakan dalam pemenuhannya, yakni:

- a. *Dharuriyyah* merupakan keadaan di mana suatu kebutuhan wajib dipenuhi dengan segera, jika diabaikan maka akan menimbulkan resiko yang membahayakan eksistensi manusia. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan tingkat dasar (*essential/basic need*) atau primer.
- b. *Hajiyyah* merupakan keadaan di mana suatu kebutuhan jika dipenuhi akan meningkatkan efisiensi, efektifitas dan nilai tambah (*added value*) bagi aktivitas manusia. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan tingkat pelengkap/penunjang (*complementarities need*) atau sekunder.
- c. *Tahsiniyyah* merupakan keadaan di mana suatu kebutuhan jika dipenuhi akan meningkatkan kepuasan atau kenikmatan, meskipun tidak menambah efisiensi, efektifitas dan nilai tambah bagi aktivitas manusia. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan tingkat kemewahan (*amelioratories need*) atau tersier.

Seorang Muslim harus mengalokasikan anggarannya secara urut sesuai dengan tingkat prioritasnya secara konsisten. Konsumsi berdasarkan prioritas ini dapat diperkenankan sepanjang tidak dilarang oleh syariah Islam.

## **2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan**

Setiap individu ataupun kelompok, kalau dicermati, memiliki kebutuhan yang berbeda. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan perbedaan kebutuhan tiap individu. Perbedaan ini dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, agama, adat istiadat, dan peradaban. ( Alam S : 2013).

### **a. Lingkungan**

Lingkungan merupakan salah satu faktor penyebab yang memengaruhi perbedaan kebutuhan manusia. Manusia yang hidup pada lingkungan yang berbeda akan memiliki kebutuhan yang berbeda pula. Sebagai contoh, orang yang tinggal di daerah Pesisir cenderung berpakaian tipis dan menghindari makanan yang mengandung kalori tinggi. Sebaliknya, orang yang tinggal di daerah pegunungan cenderung menggunakan pakaian tebal dan makan makanan yang mengandung kalori tinggi agar badan mereka tetap hangat.

### **b. Agama**

Agama juga merupakan salah satu faktor pembeda kebutuhan individu. Sebagai contoh, orang yang beragama Islam membutuhkan al-Quran, sajadah, makanan halal serta tidak mengonsumsi babi dan lain sebagainya, sesuai dengan ketentuan pemenuhan kebutuhan dalam konsep Islam. Di lain pihak, penganut agama Hindu menggunakan bunga, janur, dan perlengkapan lainnya untuk melaksanakan ritual keagamaan serta tidak mengonsumsi daging sapi.

### **c. Adat istiadat**

Adat istiadat yang berlaku di suatu daerah juga turut mempengaruhi perbedaan kebutuhan dan pola hidup seseorang. Sebagai contoh, komunitas

Minangkabau memiliki tradisi untuk menggunakan berbagai jenis pakaian adat berdasarkan waktu dan acara tertentu, dan itu pun berbeda antar daerah di Sumatera Barat. Sementara itu, komunitas suku di Tapanuli mempunyai tradisi menggunakan ulos dalam acara-acara adat mereka.

#### **d. Peradaban**

Kemajuan peradaban yang berbeda-beda di tiap wilayah juga menyebabkan perbedaan kebutuhan. Sebagai contoh, nenek moyang kita pada masa lalu cukup menggunakan pakaian yang sederhana dan memakan umbi-umbian. Setelah peradaban semakin maju, jenis pakaian dan makanan yang dikonsumsi masyarakat semakin beragam. Contoh lainnya, pada tahun 1980-an sarana komunikasi di Indonesia masih terbatas pada telepon dan pos. Saat ini, masyarakat Indonesia dapat berkomunikasi dengan telepon seluler dan internet.

### **B. Kelangkaan Barang dan Sumber Daya**

#### **1. Pengertian**

Ada satu persoalan dalam ilmu ekonomi, yakni kelangkaan atau *scarcity*. Kelangkaan adalah suatu keadaan pada saat manusia ingin mengkonsumsi jauh lebih banyak dari apa yang diproduksi. Kelangkaan dapat terjadi pada barang dan sumber daya.

##### **a. Kelangkaan barang**

Barang yang dikonsumsi manusia ada yang memerlukan pengorbanan, ada yang tidak memerlukan pengorbanan untuk mendapatkannya. Hal itu menunjukkan adanya kelangkaan barang. Atas dasar itu, barang dapat digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu barang bebas dan barang ekonomi.

##### **b. Kelangkaan sumber daya**

Sumber daya yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan jumlahnya ada yang terbatas, ada yang tidak terbatas. Untuk itu diperlukan penghematan/

efisiensi dalam penggunaannya. Jadi, kelangkaan terjadi karena disatu sisi barang/sumber daya relatif terbatas jumlahnya, sedangkan di sisi lain, kebutuhan manusia terhadap barang/sumber daya terus meningkat.

## 2. Faktor – faktor penyebab kelangkaan, antara lain:

- a. Keterbatasan jumlah benda pemuas kebutuhan yang ada di alam.
- b. Kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia.
- c. Keterbatasan kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya yang ada.
- d. Peningkatan kebutuhan manusia yang lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan penyediaan sarana kebutuhan.

**Gambar 2.5**  
**Kelangkaan sumber daya ekonomi**



*Sumber: purnaeqisafron22.blogspot.com*

## 3. Pengalokasian sumber daya ekonomi.

Sebagian besar barang yang ada di bumi bersifat langka. Hal ini menyebabkan munculnya dua keadaan, yaitu: kesempatan dan preferensi (pemilihan). Dari dua keadaan itu seseorang perlu melakukan pemilihan terhadap barang yang akan dikonsumsi. Dalam melakukan pemilihan kebutuhan atau sumber daya, perlu adanya pengorbanan, yaitu barang atau



sumber daya yang tidak dipenuhi. Pengorbanan tersebut dinamakan dengan biaya oportunitas (*opportunity cost*) dalam ekonomi, biaya ini disebut biaya kesempatan yang hilang.

Pandangan ini menimbulkan beberapa pertanyaan mendasar, misalnya benarkah ketersediaan sumber daya bersifat tak terbatas, benarkah kebutuhan manusia tidak terbatas, dapatkah kebutuhan manusia dibatasi dan dikendalikan, dan lain-lain. Apapun definisinya, tujuan ilmu ekonomi adalah mewujudkan kesejahteraan dalam kehidupan manusia.

Apakah yang disebut dengan sejahtera? Pandangan konvensional memahami kesejahteraan ini dalam bingkai materialisme hedonisme, sehingga sejahtera adalah kondisi manakala manusia memiliki kecukupan (bahkan kelebihan) berbagai sarana material yang memberikan kenikmatan bagi kehidupannya. Pengertian kesejahteraan seperti ini menafikan keterkaitan kebutuhan manusia dengan unsur-unsur spiritual/norma, atau hanya dengan sedikit kaitan. Dengan pengertian seperti ini maka tidaklah mengherankan kalau konfigurasi barang dan jasa yang harus disediakan adalah yang memberikan porsi keunggulan pada pemenuhan kepentingan pribadi (*self interest*), maksimasi kekayaan, kenikmatan fisik dan kepuasan hawa nafsu.

### **C. Pandangan Ekonomi Islam dalam Menyikapi Sumber Daya Ekonomi yang Terbatas**

Pandangan ekonomi Islam tentang kesejahteraan sangatlah berbeda dengan konsep dalam ekonomi konvensional, sebab ia merupakan konsep yang *holistic*. Secara singkat kesejahteraan yang diinginkan oleh ajaran Islam adalah:

1. Kesejahteraan *holistic* dan seimbang, yaitu mencakup dimensi material maupun spiritual serta mencakup individu maupun sosial.
2. Kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak dapat dicapai maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan.

Kondisi yang menggambarkan suatu keadaan hidup yang sejahtera secara material-spiritual pada kehidupan di dunia maupun akhirat dalam bingkai ajaran Islam dinamakan *falah*. (Hendri Anto, 2003: 7).

Dengan demikian, tujuan ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariat Islam itu sendiri, yaitu merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyatan thayyiban*). Inilah definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistic. Jadi *Falah* akan tercapai ketika ajaran Islam diterapkan secara menyeluruh dan sungguh-sungguh (*kaffah*).

#### **D. Masalah Ekonomi Menurut Ekonomi Modern**

Aliran ekonomi klasik menyebutkan bahwa ada tiga masalah pokok ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga aspek ini harus dikelola sedemikian rupa agar tercipta hasil yang maksimal demi kemakmuran masyarakat. Masalah ekonomi yang dikemukakan oleh pengamat ekonomi modern dengan ekonomi klasik pada prinsipnya adalah sama, hanya penekanannya yang berbeda. Ekonomi modern mengakomodasikan masalah ekonomi dalam tiga masalah pokok, yaitu barang apa yang diproduksi dan berapa jumlahnya? Bagaimana cara memproduksi? Dan untuk siapa barang tersebut diproduksi?

##### **1. Apa dan berapa yang diproduksi?**

Keputusan mengenai barang apa yang harus diproduksi, harus dipertimbangkan dengan cermat. Dalam pengalokasian dana pembangunan, terutama dalam memproduksi barang-barang, kita harus dapat mengajukan alasan mengapa barang itu diproduksi. Jika sudah diputuskan barang apa yang diproduksi, maka masalah berikutnya adalah berapa jumlah barang yang harus diproduksi. Terkait dengan barang apa yang diproduksi dan

berapa jumlahnya tergantung pada kondisi ekonomi dan sistem ekonomi negara yang bersangkutan.

## **2. Bagaimana cara memproduksi?**

Masalah dalam hal ini adalah teknologi atau metode produksi apa yang digunakan untuk memproduksi suatu barang: berapa jumlah tenaga kerja, jenis mesin apa, serta bahan mentah apa yang akan digunakan. Produksi dengan teknologi padat karya banyak menggunakan tenaga manusia, tetapi jumlah produksinya terbatas. Jika yang digunakan adalah teknologi padat modal maka yang menjadi masalah adalah dari mana akan diperoleh modalnya.

## **3. Untuk siapa diproduksi?**

Permasalahan di sini adalah, siapa yang memerlukan barang tersebut dan siapa saja yang menikmati hasilnya. Dengan kata lain, bagaimana cara pendistribusiannya. Apakah barang-barang yang diproduksi tersebut akan didistribusikan menurut ukuran pendapatan, kekayaan atau kelompok tertentu dari masyarakat?. Sistem ekonomi pasar berpendapat bahwa sedikit atau banyaknya distribusi tergantung pada persaingan. Jadi, distribusi tergantung pada mekanisme pasar. Sedangkan pada sistem ekonomi komando, produksi dan distribusi diatur oleh pemerintah.

Kegiatan produksi merupakan mata rantai dari konsumsi dan distribusi. Pada prinsipnya kegiatan produksi, sebagaimana konsumsi, terkait sepenuhnya dengan syariat Islam. Kahf (1992; 114) mendefinisikan kegiatan produksi dalam perspektif Islam sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitas, sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama Islam, yaitu kebahagiaan dunia akhirat.

Dari beberapa pendapat ahli ada beberapa implikasi mendasar bagi kegiatan produksi dan perekonomian secara keseluruhan, di antaranya:

- a. Seluruh kegiatan produksi terikat pada tatanan nilai moral dan teknikal yang Islami, sebagaimana juga dalam kegiatan konsumsi.
- b. Kegiatan produksi harus memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan.
- c. Permasalahan ekonomi muncul bukan saja karena kelangkaan (*scarcity*) saja, tetapi lebih kompleks.

Keadilan dan kebajikan bagi masyarakat secara keseluruhan sesungguhnya merupakan intisari ajaran Islam. Untuk itu, kegiatan produksi tentu saja harus senantiasa berpedoman kepada nilai-nilai kebajikan dan keadilan bagi masyarakat ini. Secara spesifik Siddiqi (1992) menyebutkan 3 (tiga) prinsip pokok produsen yang islami, yaitu:

1. Memiliki komitmen yang penuh terhadap keadilan
2. Memiliki dorongan untuk melayani masyarakat (untuk mencapai kesejahteraan), sehingga segala keputusan harus mempertimbangkan hal ini.
3. Optimisasi keuntungan diperkenankan dengan batasan kedua prinsip di atas.

Sesuai dengan prinsip ekonomi di atas, maka alokasi sumber daya ekonomi (SDE) akan berorientasi sebagai berikut:

1. Berbagai barang dan jasa yang terlarang (oleh ajaran Islam) tidak akan di produksi sehingga tidak ada sumber daya ekonomi yang dialokasikan untuk produksi barang dan jasa tersebut.
2. Selanjutnya, produksi barang-barang kemewahan juga harus dikurangi sedemikian rupa sehingga semakin sedikit sumber daya ekonomi yang dialokasikan untuk memproduksinya.
3. Akan ada perluasan industri untuk menghasilkan barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat sehingga sumber daya ekonomi lebih banyak dialokasikan untuk hal ini.

## E. Perbedaan Kebutuhan dan Keinginan

Gambar 2.6  
Perbedaan kebutuhan dan keinginan



Sumber: *Esensialisme.blogspot.com*

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas bahwa masalah ekonomi muncul dari kelangkaan sumber daya ekonomi yang tersedia dalam memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas, maka dapat disimpulkan bahwa penggerak awal kegiatan konsumsi dalam ekonomi konvensional adalah adanya keinginan (*want*). Seseorang mengkonsumsi karena ingin memenuhi keinginannya, sehingga dapat mencapai kepuasan maksimal.

Islam menolak perilaku manusia untuk selalu memenuhi keinginannya, karena pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan terhadap keinginan yang baik dan keinginan yang buruk sekaligus (*ambivalen, al-izhwajiyah*). Keinginan seringkali tidak selalu sejalan dengan rasionalitas, karenanya bersifat tidak terbatas dalam kuantitas maupun kualitasnya. Kekuatan dari dalam ini disebut hawa nafsu (*nafs*) yang memang menjadi penggerak utama seluruh perilaku manusia (Hendri Anto, 2003: 124). Dalam ajaran Islam manusia harus mengendalikan dan mengarahkan keinginannya sehingga dapat membawa kemanfaatan (*maslahah*) dan bukan kerugian (*mudharat*) bagi kehidupan dunia dan akhirat.

Keinginan yang sudah dikendalikan dan diarahkan sehingga membawa kemanfaatan ini dapat disebut sebagai kebutuhan (*need*). Jadi kita harus bisa membedakan secara tegas antara keinginan (*want*) dengan kebutuhan (*need*). Kebutuhan lahir dari suatu pemikiran atau identifikasi secara objektif atas berbagai sarana yang diperlukan untuk mendapatkan suatu manfaat bagi kehidupan sesuai ajaran Islam, sehingga berifat terbatas dan terukur dalam kuantitas dan kualitasnya. Maka sebagai seorang Muslim seseorang haruslah berkonsumsi untuk memenuhi kebutuhannya dalam rangka memperoleh manfaat yang setinggi-tingginya dan menghindari kemudharatan yang mungkin akan terjadi.

## **F. Kegiatan/Tugas Siswa**

Di antara tugas siswa di antaranya dalam bentuk membuat kliping tentang penggolongan kebutuhan berdasarkan intensitasnya.

## **G. Evaluasi**

### **1. Soal Uraian**

- a. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan?
- b. Jelaskan dengan disertai contoh pembagian kebutuhan menurut sifatnya!
- c. Sebutkan 4 (empat) macam penggolongan kebutuhan manusia!
- d. Sebutkan empat (empat) faktor yang mempengaruhi kebutuhan!
- e. Sebutkan masing-masing 3 (tiga) contoh kebutuhan berdasarkan subjeknya!
- f. Jelaskan tingkat kemanfaatan dan kemendesakan dalam pemenuhan kebutuhan menurut konsep ekonomi Islam!
- g. Apa yang dimaksud dengan kelangkaan?
- h. Sebutkan empat penyebab timbulnya kelangkaan !
- i. Sebutkan empat macam sumber daya yang mendatang akan manfaat hidup orang banyak!

- j. Apakah yang dimaksud dengan sumber daya modal?
- k. Jelaskan modal menurut bentuknya!
- l. Bagaimanakah konsep kesejahteraan menurut ekonomi Islam?
- m. Jelaskan masalah ekonomi: untuk siapa barang di produksi!
- n. Jelaskan masalah ekonomi: barang apa yang diproduksi!
- o. Jelaskan masalah ekonomi: bagaimana cara memproduksi !
- p. Sebutkan 3 (tiga) prinsip pokok produsen yang Islami !

## 2. Soal Pilihan Ganda

Pilihlah salah satu jawaban yang di anggap benar dan berikan tanda silang (x) pada jawaban yang anda anggap paling benar.

- a. Pernyataan berikut ini yang merupakan pengertian kebutuhan adalah...
  - 1) Segala sesuatu yang harus dipenuhi dan bila tidak dipenuhi akan mengganggu aktivitas (kelangsungan hidup) manusia
  - 2) Sesuatu yang dibutuhkan manusia tapi tidak harus dipenuhi
  - 3) Segala sesuatu yang diinginkan manusia
  - 4) Sesuatu yang dimiliki manusia dan tanpanya manusia tidak dapat hidup
  - 5) Segala sesuatu yang diinginkan manusia dan tidak mempengaruhi kelangsungan hidup manusia
- b. Seseorang dikatakan makmur apabila dapat memenuhi...
  - 1) Seluruh kebutuhannya
  - 2) Sebagian besar kebutuhannya
  - 3) Semua keinginannya
  - 4) Sebagian kecil keinginannya
  - 5) Semua keperluannya

- c. Salah satu sifat kebutuhan manusia belangsung secara...
- 1) Sewaktu-waktu
  - 2) Terus menerus
  - 3) Isidentil
  - 4) Periodik
  - 5) Cepat
- d. Kebutuhan berikut ini termasuk kebutuhan jasmani, kecuali...
- 1) Mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat
  - 2) Berolahraga
  - 3) Beristirahat yang cukup
  - 4) Mengenakan pakaian yang bagus
  - 5) Beribadah
- e. Urutan kebutuhan menurut intensitas yang benar adalah...
- 1) Kebutuhan mutlak, kebutuhan primer, kebutuhan tersier, kebutuhan sekunder
  - 2) Kebutuhan primer, kebutuhan mutlak, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier
  - 3) Kebutuhan mutlak, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier
  - 4) Kebutuhan sekunder, kebutuhan mutlak, kebutuhan primer, kebutuhan tersier
  - 5) Kebutuhan tersier, kebutuhan sekunder, kebutuhan mutlak, kebutuhan primer
- f. Menurut subyeknya benda berikut yang digunakan dalam proses individual dan kolektif
- 1) Telepon seluler dan telepon umum
  - 2) Kuda dan pedati
  - 3) Benda konsumsi



- 4) Jalan raya dan lapangan
  - 5) Tempat rekreasi dan lapangan
- g. Pengelompokan kebutuhan menjadi kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier adalah pembagian kebutuhan atas dasar...
- 1) Subjek yang membutuhkan
  - 2) Waktu penentuan kebutuhan
  - 3) Sifat kebutuhan
  - 4) Intensitas kebutuhan
  - 5) Jenis kelamin
- h. Berikut ini adalah faktor yang mempengaruhi kebutuhan...
- 1) Jenis pekerjaan
  - 2) Status dalam keluarga
  - 3) Agama
  - 4) Identitas diri
  - 5) Jenis kelamin
- i. Kebutuhan jasmani dan rohani adalah pembagian kebutuhan atas dasar...
- 1) Tujuan penggunaan alat pemuas kebutuhan
  - 2) Sifat penggunaan barang
  - 3) Banyaknya alat pemuas kebutuhan
  - 4) Jumlah pengguna barang dan jasa
  - 5) Tingkat intensitas penggunaan barang
- j. Salah satu penyebab kelangkaan adalah...
- 1) Banyak sumber daya ekonomi yang rusak karena bencana alam atau salah urus
  - 2) Penerapan sosialisasi dalam kegiatan produksi menambah hasil produksi

- 3) Sebagian masyarakat merasa puas jika kebutuhannya primernya sudah terpenuhi
  - 4) Penemuan teknologi yang memungkinkan peningkatan produksi
  - 5) Adanya penemuan baru dalam pembudidayaan yang mengakibatkan hasil belajar ganda
- k. Kelangkaan adalah...
- 1) Suatu keadaan ketika barang-barang produksi tersedia dalam jumlah banyak, sementara barang konsumsi tersedia dalam jumlah terbatas
  - 2) Suatu keadaan ketika orang jarang menggunakan barang produksi dalam negeri
  - 3) Kesulitan menyediakan barang konsumsi karena semua sumber daya digunakan untuk membuat barang modal
  - 4) Suatu keadaan di mana barang dan jasa yang tersedia terbatas sementara yang dibutuhkan tak terbatas
  - 5) Suatu keadaan di mana barang dan jasa melimpah ruah dan berlebih di suatu tempat tetapi kurang di tempat lain
- l. Berikut ini adalah pernyataan penyebab kelangkaan dan bukan penyebab kelangkaan
- 1) Penemuan barang baru di bidang teknologi untuk meningkatkan produktivitas
  - 2) Sumber daya yang digunakan generasi sebelumnya terbatas
  - 3) Bencana akan memusnahkan sumber daya yang ada
  - 4) Makin mudahnya Negara berkembang dari Negara lain
  - 5) Kenginan manusia untuk memenuhi kebutuhan tidak terbatas sedangkan sumber daya yang ada terbatas

Penyataan yang menyebabkan adanya kelangkaan adalah...

- 1) 1, 2, 3
- 2) 2, 3, 4
- 3) 2, 3, 5
- 4) 3, 4, 5
- 5) 1, 3, 5

m. Yang menyebabkan timbulnya kelangkaan adalah...

- 1) Kesenjangan antara kaya dan miskin
- 2) Banyaknya konlomerat
- 3) Banyaknya kebutuhan manusia yang tak terpenuhi
- 4) Adanya kebutuhan manusia yang tidak seimbang dengan jumlah benda pemuas kebutuhan

n. Dua cara untuk mengatasi kelangkaan barang yaitu...

- 1) Dengan memproduksi barang dan memanfaatkan kekayaan alam
- 2) Dengan meminjam keapda Negara lain dan menarik investor
- 3) Memanfaatkan kekayaan alam dan meminjam keluar negeri
- 4) Memproduksi barang dan menarik investor asing
- 5) Berpindah mencari sumber daya yang baru

o. Kelangkaan membuat manusia harus...

- 1) Bekerja lebih giat
- 2) Berhemat
- 3) Melakukan pilihan yang paling menguntungkan
- 4) Memenuhi kebutuhan sebanyak mungkin
- 5) Membuka usaha sampingan

p. Berikut ini yang merupakan contoh kelangkaan SDA adalah...

- 1) Hutan yang semakin luas dan subur
- 2) Luas tanah yang semakin hari semakin bertambah

- 3) Lahan pertanian yang dijadikan rumah
  - 4) Barang tambang yang terus digali akan segera habis
  - 5) Kekayaan alam yang dieksploitasi sesuai prosedur
- q. Sumber daya dikatakan langka apabila..
- 1) Jarang ada
  - 2) Sulit didapat
  - 3) Ada pada zaman dulu
  - 4) Jumlahnya tidak mencukupi
  - 5) Jumlahnya berlimpah ruah
- r. Sistem perekonomian tradisional ditandai oleh...
- 1) Penggunaan teknologi maju
  - 2) Alat yang digunakan sudah modern
  - 3) Barang yang dihasilkan berkualitas
  - 4) Produksi dilakukan secara individual
  - 5) Produksi dilakukan secara massal
- s. Negara yang masih menganut sistem ekonomi terpusat adalah...
- 1) Rusia
  - 2) Indonesia
  - 3) Korea Selatan
  - 4) Taiwan

# BAB III

## PERILAKU KONSUMEN DAN PRODUSEN

### **Tujuan Pembelajaran**

Dengan mempelajari bab ini, siswa diharapkan dapat :

1. Menjelaskan pelaku-pelaku kegiatan ekonomi
2. Mendeskripsikan perilaku konsumen dan produsen
3. Mendeskripsikan Teori perilaku konsumen
4. Mendeskripsikan Teori perilaku produsen
5. Membuat model diagram interaksi pelaku ekonomi
6. Mengidentifikasi manfaat diagram interaksi pelaku ekonomi
7. Mendeskripsikan peran pelaku ekonomi
8. Menjelaskan tentang pola perilaku konsumen menurut konsep Islam
9. Menjelaskan tentang pola perilaku produsen menurut konsep Islam

### **A. Pelaku Kegiatan Ekonomi**

Pelaku ekonomi dapat dibedakan menjadi 4 kelompok antara lain sebagai berikut:

1. Rumah tangga keluarga
2. Perusahaan
3. Pemerintah
4. Masyarakat luar negeri

Masing-masing perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

## 1. Rumah Tangga Keluarga

Rumah tangga keluarga adalah suatu rumah tangga yang menggunakan pendapatan atau kekayaan dengan cara tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan rumah tangga meliputi berikut ini.

- a. Memiliki dan menyediakan faktor produksi.
- b. Memperoleh imbalan balas jasa atas penyerahan faktor produksi yang berupa sewa, upah, bunga dan laba.
  - 1) Sewa (*rent*) adalah balas jasa yang diterima rumah tangga karena telah menyewakan tanahnya kepada pihak lain, misal perusahaan.
  - 2) Upah adalah balas jasa yang diterima rumah tangga karena telah mengorbankan tenaganya untuk bekerja pada perusahaan dalam produksi.
  - 3) Bunga adalah balas jasa yang diterima dari perusahaan karena telah menggunakan sejumlah dana untuk modal usaha perusahaan dalam kegiatan produksi.
  - 4) Laba (*profit*) adalah balas jasa yang diterima karena telah mengorbankan tenaga dan pikirannya mengelola perusahaan, sehingga kegiatan ekonomi dapat terlaksana.

Peranan rumah tangga konsumen sebagai berikut

- 1) Rumah tangga berperan sebagai pemasok faktor produksi pada perusahaan untuk kegiatan produksi.
- 2) Rumah tangga sebagai pemakai (konsumen) barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan lain

**Gambar 2.6**  
**Pelaku ekonomi : Rumah tangga keluarga**



*Sumber: berpendidikan .com*

## **2. Perusahaan**

Perusahaan adalah rumah tangga ekonomi yang memenuhi kebutuhan dengan cara menghasilkan barang-barang dan jasa atau melakukan kegiatan produksi. Peranan perusahaan dalam kegiatan ekonomi, di antaranya:

- a. Sebagai produsen yaitu dengan menghasilkan barang dan jasa yang di butuhkan oleh rumah tangga, keluarga, pemerintah bahkan masyarakat luar negeri.
- b. Sebagai distributor yaitu sebagai penyalur barang dalam rangka melayani kepentingan konsumen agar barang yang dibutuhkan tepat waktu dan tepat sasaran.
- c. Sebagai agen pembangunan, kegiatan perusahaan ini ditujukan untuk meningkatkan produksi melalui penelitian dan pengembangan.

**Gambar 2.7**  
**Pelaku ekonomi : Perusahaan**



*Sumber: tarsisiusendro.eordpress.com*

### **3. Pemerintah**

Pemerintah adalah pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan mengatur kehidupan ekonomi baik konsumen, produsen, dan distribusi agar kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Peranan pemerintah dalam kegiatan perekonomian antara lain sebagai berikut:

- a. Pemerintah sebagai pengatur. Pengaturan kegiatan ekonomi oleh pemerintah dapat ditempuh melalui peraturan perundang-undangan disertai tindakan nyata.
- b. Pemerintah sebagai pengontrol. Sebagai pengontrol kegiatan ekonomi pemerintah mempunyai bank sentral yang berfungsi mengawasi lalu lintas keuangan. Pemerintah memiliki alat pemaksa bagi terselenggaranya ketertiban dalam masyarakat. Pemerintah menentukan alat pengaduan bagi terselenggaranya keadilan bagi seluruh rakyat.
- c. Pemerintah sebagai produsen
  - 1) Pemerintah dapat bertindak sebagai produsen untuk menghasilkan barang dan jasa yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kegiatan ini dilakukan melalui BUMN dan BUMD.



- 2) Pemerintah bertindak sebagai investor dimana pemerintah sebagai penanam modal baik seluruhnya atau sebagian pada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia.

**Gambar 2.8**  
**Pelaku ekonomi: Pemerintah**



Sumber: *slidershare.net*

#### **4. Masyarakat Luar Negeri**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat jaringan industri dan perdagangan barang dan jasa antarnegara perlu dilakukan mengingat alat kebutuhan tidak hanya berasal dari dalam negeri saja. Contoh : Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti barang tambang namun masih terbatas dalam hal teknologi, modal dan tenaga ahli. Sehingga perlu untuk melakukan interaksi dengan negara lain berupa kegiatan perdagangan barang dan jasa antar negara. Kegiatan ini disebut dengan ekspor dan impor. (Kinanti : 2014)

#### **B. Arus Lingkaran Kegiatan Ekonomi**

Arus lingkaran kegiatan ekonomi atau *circular flow diagram* menggambarkan kegiatan ekonomi yang terus menerus berputar dan

menghubungkan antara satu pelaku ekonomi dengan pelaku ekonomi lainnya. Pada dasarnya pelaku kegiatan ekonomi terdiri atas Rumah Tangga Konsumen (RTK) dan Rumah Tangga Produsen (RTP), yang dikenal dengan perekonomian tertutup dua sektor. Sehingga apabila digambarkan dalam bentuk bagan arus barang dan arus uang akan nampak sebagai berikut:



Sumber: Kinanti Geminastiti dan Nella Nurlita: *Ekonomi untuk SMA/MA Kelas X*, 2013

Penjelasan dari gambar di atas adalah sebagai berikut

1. Rumah tangga konsumen sebagai penghasil faktor-faktor produksi (alam, tenaga kerja, modal dan skill) menjualnya ke pasar faktor produksi. Dari pasar faktor produksi, rumah tangga produsen membeli/ menggunakan faktor produksi.
2. Rumah tangga produsen memberikan/membayar balas jasa faktor produksi dengan uang (berupa sewa, upah, bunga dan laba)
3. Rumah tangga konsumen yang menggunakan balas jasa yang diterimanya untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan rumah tangga produsen.
4. Rumah tangga produsen akan menyerahkan barang/jasa yang diproduksinya kepada rumah tangga konsumen melalui pasar barang/jasa.

Dengan demikian nomor 1 dan 4 merupakan arus faktor produksi dan barang, sedangkan nomor 2 dan 3 merupakan arus uang.

Dalam skala yang lebih luas, arus lingkaran kegiatan ekonomi akan nampak seperti di bawah ini.



Arus Lingkaran 3 Sektor

Sumber: Kinanti Geminastiti dan Nella Nurlita: *Ekonomi untuk SMA/MA Kelas X*, 2013

Pada dasarnya gambar di atas menggambarkan peranan masing-masing pelaku ekonomi yaitu sebagai berikut :

1. Rumah Tangga Konsumen (RTK) yang menghasilkan faktor-faktor produksi menjualnya ke pasar produksi. Sebagai balas jasa akan diterima uang berupa sewa, upah, bunga dan laba. Dari penghasilannya, RTK akan membelanjakan uang untuk membeli barang dari pasar barang, membayar pajak kepada pemerintah atau membeli impor. Selisih dair penghasilan dengan pengeluarannya digunakan untuk ditabung.
2. Rumah Tangga Produsen (RTP) membeli faktor-faktor dari rumah tangga dan memberikan uang sebagai balas jasa rumah tangga. Selanjutnya eprusahaan memproduksi barang/jasa dan dijual ke pasar barang atau ekspor.
3. Pemerintah memperoleh pendapatan dari penerimaan pajak pribadi, pajak usaha, bea masuk, dan sumber lain. Pendapatan ini digunakan pemerintah untuk membangun negara dengan cara belanja barang, membayar gaji pegawai negeri, memberikan subsidi, dan lain-lain.
4. Rumah tangga luar negeri dalam bidang ekonomi melalui kegiatan ekspor dan impor serta kegiatan lain yang menguntungkan tiap Negara.

## **C. Peran Konsumen dan Produsen**

### **1. Peran Produsen**

Produsen bisa saja pemerintah, rumah tangga, perusahaan, atau masyarakat luar negeri. Peran produsen dalam sebuah perekonomian sangat penting, yaitu memproduksi barang dan jasa. Barang dan jasa yang diproduksi haruslah yang benar-benar bermanfaat dan tidak melanggar peraturan yang berlaku. Artinya, produsen tidak boleh memproduksi barang atau jasa yang tidak bermanfaat atau bahkan merusak kehidupan konsumen, seperti minuman keras dan ganja. Secara lebih terinci peran produsen sebagai berikut.

#### **a. Memproduksi barang dan jasa**

Barang dan jasa yang diproduksi haruslah barang dan jasa yang diinginkan konsumen. Dalam memproduksi barang dan jasa produsen selalu memperhitungkan biaya produksi dan menghubungkannya dengan keuntungan yang diperoleh.

#### **b. Menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran**

Untuk melakukan produksi dibutuhkan tenaga kerja. Tenaga diperoleh dari pasar input yang setiap tahun selalu bertambah jumlahnya. Namun pertambahan ini tidak diikuti oleh terbukanya kesempatan kerja yang lebih banyak sehingga menyebabkan pengangguran. Dalam hal ini produsen bisa mengurangi pengangguran dalam proses produksi barang dan jasa.

#### **c. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan Negara**

Produsen membayarkan upah, gaji, dan bentuk pembayaran lainnya kepada beberapa pihak yang terlibat dalam proses produksi. Pembayaran ini merupakan pendapatan bagi pihak-pihak yang terlibat tersebut. Dengan pendapatan tersebut berarti produsen berperan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan Negara.

**d. Meningkatkan kepedulian sosial**

Produsen dapat berperan dalam meningkatkan kepedulian sosial dengan cara ikut berpartisipasi dalam memberikan bantuan terhadap korban gempa, tsunami, dan bencana alam lainnya.

**e. Meningkatkan kemakmuran**

Produksi merupakan salah satu pertanda kemakmuran. Makin banyak produksi yang dilakukan makin makmur suatu Negara. Jadi, konsumsi harus selalu bisa memperbesar kapasitas produksinya agar kemakmuran masyarakat dapat diwujudkan.

**Gambar 3.1**  
**Peran Produsen**



*sumber: bicarasaiful.blogspot.com*

**2. Peran konsumen**

Konsumen juga bisa terdiri dari rumah tangga, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Akan tetapi, konsumen terbesar berasal dari rumah tangga. Dengan demikian dapat kita identikan peran konsumen dengan peran rumah tangga, peran konsumen antara lain sebagai berikut:

**a. Sumber tenaga kerja**

Rumah tangga merupakan sumber tenaga kerja bagi proses produksi yang dilakukan produsen. Dengan adanya tenaga kerja proses produksi dapat dilaksanakan dengan baik.

**b. Sebagai pengonsumsi barang atau jasa**

Barang dan jasa yang dihasilkan produsen dikonsumsi oleh konsumen. Dengan demikian barang atau jasa berguna karena mampu memenuhi keinginan konsumen.

**D. Konsumsi**

**1. Pengertian Konsumsi**

Konsumsi adalah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang dan jasa dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan konsumen adalah orang yang mengkonsumsi barang dan jasa hasil produksi untuk memenuhi kebutuhannya.

**2. Ciri-ciri barang konsumsi**

- a. Barang konsumsi untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan (barang ekonomi)
- b. Barang konsumsi dikerjakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.
- c. Manfaat nilai atau jumlah barang yang digunakan tersebut akan habis sekaligus atau berangsur-angsur.

**3. Benda atau barang konsumsi dapat dibedakan sebagai berikut:**

- a. Barang yang habis dalam sekali pemakaian, misalnya makanan, minuman, dan obat-obatan.
- b. Barang yang pemakaiannya berulang-ulang atau dalam waktu relative lama, misalnya pakaian, sepatu dan tas.

#### **4. Tujuan kegiatan konsumsi**

- a. Mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa secara bertahap.
- b. Menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang sekaligus.
- c. Memuaskan kebutuhan jasmani dan rohani

#### **5. Manfaat dan Nilai Suatu Barang**

Barang dan jasa mempunyai nilai guna atau manfaat apabila dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan manusia.

- a. Nilai pakai, yaitu kemampuan suatu barang untuk dipakai dalam memenuhi kebutuhan manusia.

Nilai pakai dapat dibedakan sebagai berikut:

- 1) Nilai pakai subjektif, yaitu nilai yang diberikan oleh seseorang terhadap suatu barang karena barang tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Misalnya cangkul bagi petani, gergaji bagi tukang kayu.
- 2) Nilai pakai objektif, yaitu kemampuan suatu barang secara umum untuk dipakai dalam memenuhi kebutuhan manusia, misal: pakaian, rumah, dan sepeda.
- b. Nilai tukar yaitu kemampuan suatu barang untuk dapat ditukarkan dengan barang atau jasa lain.

Nilai tukar dapat dibedakan antara lain sebagai berikut.

- 1) Nilai tukar subjektif, yaitu nilai tukar suatu barang menurut sudut pandang pemiliknya, misal beras ditukar dengan apel.
- 2) Nilai tukar objektif, yaitu nilai tukar suatu barang yang berlaku secara umum berdasarkan barang itu sendiri, misal sepeda motor dan televisi.

#### **E. Teori Perilaku Konsumen**

Setiap hari kita melakukan pemilihan atau menentukan skala prioritas karena kebutuhan tak terbatas, sedangkan sumber daya yang tersedia

sangat terbatas. Konsep pemilihan ini merupakan perilaku mendasar dari konsumen. Konsep dasar perilaku konsumen menyatakan bahwa konsumen selalu berusaha untuk mencapai utilitas (*utility*) maksimal dalam pemakaian barang yang dikonsumsi. Kegunaan (*utility*) adalah derajat seberapa besar sebuah barang atau jasa dapat memuaskan kebutuhan seseorang.

Kegunaan atau nilai guna suatu barang dapat didasarkan dalam hal berikut ini.

1. Nilai guna total (*total utility*) adalah kepuasan total yang dinikmati oleh konsumen dalam mengonsumsi sejumlah barang atau jasa tertentu secara keseluruhan.
2. Nilai guna maksimal (*marginal utility*) adalah tambahan kepuasan yang dinikmati oleh konsumen dari setiap tambahan barang atau jasa yang dikonsumsi.
3. Nilai guna yang semakin menurun (*diminishing return*) atau pemenuhan secara vertikal yaitu nilai guna yang diperoleh konsumen untuk setiap tambah konsumsi yang dilakukan pada mulanya meningkat, tetapi sampai pada titik tertentu akan mengalami penurunan.

Menurut Herman Henrich Gossen (1818-1859) ekonomi Jerman yang dikenal dengan Hukum Gossen I (Hukum kegunaan marginal yang menurun) yang bunyinya : “jika pemenuhan kebutuhan akan suatu jenis barang dilakukan secara terus-menerus, maka rasa nikmatnya mula-mula akan tinggi, namun semakin lama kenikmatan tersebut semakin menurun sampai akhir mencapai batas jenuh”.

4. Nilai guna yang sama atau pemenuhan secara horizontal dikenal dengan Hukum Gossen II yang menyatakan bahwa konsumen akan melakukan konsumsi sedemikian rupa sehingga nilai guna marginal setiap barang dan jasa yang dikonsumsi akan sama, artinya unit terakhir dari masing-masing produk yang dikonsumsi memiliki nilai sama.



## F. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konsumsi

### 1. Pendapatan

Semakin besar pendapatan maka jumlah konsumsi cenderung semakin besar.

Rumus antara pendapatan dan konsumsi adalah:  $Y = C + S$

#### Keterangan :

Y = pendapatan

C = konsumsi

S = tabungan

Sedangkan kecenderungan menambahkan konsumsi yang dikarenakan adanya tambahan pendapatan ( $MPC = Marginal Propensity to Consume$ ) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$MPC = \Delta C / \Delta Y$$

#### Keterangan :

$\Delta C$  = Perubahan jumlah konsumsi

$\Delta Y$  = Perubahan pendapatan

Dan kecenderungan menambah tabungan dikarenakan adanya tambahan pendapatan ( $MPS = Marginal Propensity to Save$ ) dirumuskan :

$$MPS = \Delta S / \Delta Y$$

#### Keterangan :

$\Delta S$  = Perubahan tabungan

$\Delta Y$  = Perubahan pendapatan

Antara MPC dan MPS diperoleh hubungan berikut.

Hubungan pendapat dan konsumsi menurut Engel's adalah sebagai berikut:

*"Semakin besar pendapatan, semakin kecil bagian pendapatan itu digunakan untuk mengonsumsi barang pokok dan semakin meningkat bagian pengeluaran untuk konsumsi barang mental". Pernyataan ini dikenal dengan istilah Engel's Law.*

## **2. Harga Barang dan Jasa**

Secara normal jika harga naik, maka permintaan terhadap barang tersebut akan turun dan jika harga barang turun maka permintaan barang tersebut akan naik, kecuali barang tersebut merupakan barang kebutuhan pokok.

## **3. Kebiasaan Konsumen**

Perilaku konsumtif seseorang yang mempunyai kebiasaan belanja secara berlebihan yang belum tentu diperlukannya akan meningkatkan gejala konsumerisme di masyarakat.

## **4. Adat Istiadat**

Pada acara tertentu yang merupakan adat istiadat orang di suatu daerah akan membutuhkan barang-barang tertentu yang mungkin tidak sama di tiap-tiap daerah.

## **5. Barang Substitusi**

Jika harga suatu barang naik, maka banyak konsumen akan beralih ke barang substitusi untuk memenuhi kebutuhannya.

## **6. Selera Konsumen**

Setiap konsumen mempunyai selera yang berbeda satu dengan yang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga selera akan mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang.

Perilaku konsumen ada yang bersifat rasional dan irasional.

- a. Perilaku konsumen rasional adalah konsumen yang dalam melakukan tindakan atau mengonsumsi barang berdasarkan pada akal (nalar) serta prinsip ekonomi. Dasar pertimbangannya sebagai berikut.
  - 1) Produk barang dapat memberikan kegunaan maksimal.
  - 2) Barang tersebut betul-betul dibutuhkan.
  - 3) Kualitas barang terjamin.
  - 4) Harga terjangkau atau sesuai kemampuan.

- b. Perilaku konsumen yang irasional yaitu konsumen yang dalam bertindak tanpa pertimbangan, misalnya sebagai berikut.
- 1) Membeli barang karena merek terkenal.
  - 2) Membeli barang karena ada bonusnya.

## **G. Perilaku Konsumen menurut Konsep Islam**

Teori perilaku konsumen dalam perspektif Islam dibangun atas dasar syariah Islam. Kondisi ini membawa dampak mendasar pada perilaku konsumsi, yaitu:

1. Pilihan jenis konsumsi akan diorientasikan pada 2 (dua) bagian, yaitu yang langsung dikonsumsi untuk kepentingan di dunia dan untuk kepentingan akhirat. Seseorang yang memahami ini akan memanfaatkan pendapatan dan kekayaannya untuk berbagai kepentingan akhirat, seperti menolong fakir miskin dan anak yatim, memelihara lingkungan hidup, dan melakukan berbagai kegiatan untuk kebaikan dan memberantas kejahatan (*amar ma'rufnahi mungkar*), meskipun hal ini secara langsung tidak memberikan manfaat kepada dirinya secara individual, selain ia juga akan menggunakan untuk kepentingan dunianya.
2. Jumlah jenis pilihan konsumsi kemungkinan menjadi lebih banyak.
3. Harta merupakan anugrah dari Allah dan bukan merupakan sesuatu yang dengan sendirinya bersifat buruk (sehingga harus di jauhi secara berlebihan). Harta merupakan alat untuk mencapai tujuan hidup jika diusahakan dan dimanfaatkan secara benar, bukan sebaliknya. (Hendri Anto, 2003 : 123).

Berdasarkan ketiga kondisi di atas jelaslah bahwa konsumsi menurut Islam tidak ditujukan untuk mencari kepuasan maksimum sebagaimana dalam terminologi teori ekonomi konvensional. Tujuan konsumsi seorang muslim adalah untuk mencari kesuksesan dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat dalam bingkai moral Islam atau *falah*. Jadi seorang muslim harus mencari *falah* setinggi mungkin (*maximization of falah*) sebatas anggaran yang dimilikinya.

## H. Preferensi Konsumsi dan Alokasi Anggaran

### 1. Perbedaan Kebutuhan dan Keinginan

Dengan melihat tujuan utama berkonsumsi serta metode alokasi preferensi konsumsi dan anggaran, dapat dinyatakan bahwa penggerak awal kegiatan konsumsi dalam ekonomi konvensional adalah adanya keinginan (*want*). Seseorang berkonsumsi karena ingin memenuhi keinginannya, sehingga dapat mencapai kepuasan maksimal.

Islam menolak perilaku manusia untuk selalu memenuhi keinginannya, karena pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan terhadap keinginan yang baik dan keinginan yang buruk sekaligus (*ambivalen, al-izhiwajiyah*). Keinginan seringkali tidak selalu sejalan dengan rasionalitas, karenanya bersifat tidak terbatas dalam kuantitas maupun kualitasnya. Kekuatan dari dalam ini disebut hawa nafsu (*nafs*) yang memang menjadi penggerak utama seluruh perilaku manusia.

Dalam ajaran Islam manusia harus mengendalikan dan mengarahkan keinginannya sehingga dapat membawa kemanfaatan (*mashlahah*) dan bukan kerugian (*mudharat*) bagi kehidupan dunia dan akhirat. (Hendri Anto, 2003 : 124).

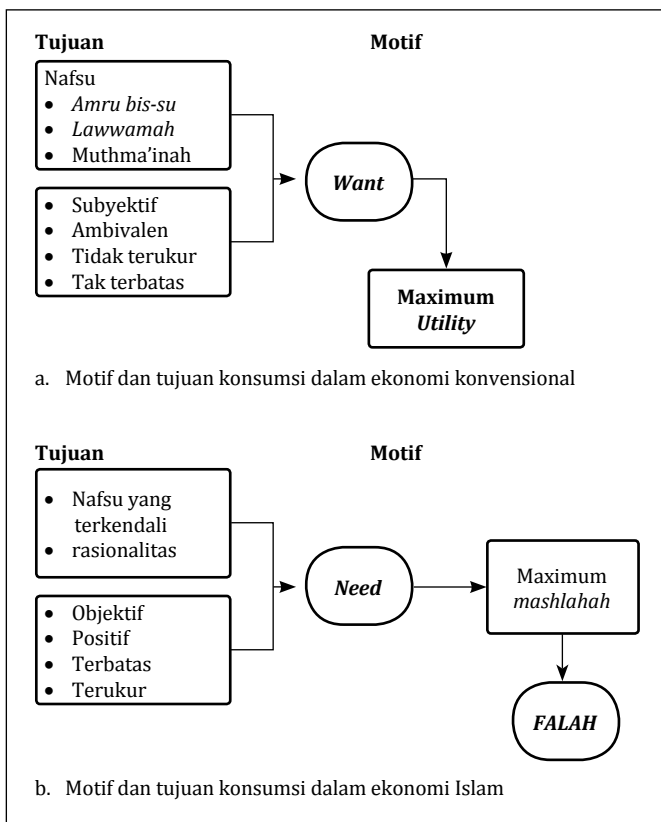
Keinginan yang sudah dikendalikan dan diarahkan sehingga membawa kemanfaatan ini, dapat disebut sebagai kebutuhan (*need*). Jadi kita harus bisa membedakan secara tegas antara keinginan dengan kebutuhan. Kebutuhan lahir dari suatu pemikiran atau identifikasi secara objektif atas berbagai sarana yang diperlukan untuk mendapatkan suatu manfaat bagi kehidupan sesuai ajaran Islam, sehingga bersifat terbatas dan terukur dalam kuantitas dan kualitasnya.

### 2. Perbedaan *Mashlahah* dengan *Utility*

Tujuan konsumsi seorang muslim bukanlah mencari *utility* (kepuasan maksimum), melainkan mencari *mashlahah*. Konsep *utility* atau kepuasan sangat berbeda dengan konsep *mashlahah* atau kemanfaatan yang menjadi

tujuan dalam konsumsi yang Islami. Konsep *utility* bersifat sangat subyektif karena bertolak dari pemenuhan keinginan (*want*) yang memang bersifat subyektif. Sementara itu, konsep *mashlahah* relatif lebih objektif, karena bertolak dari pemenuhan kebutuhan (*need*) yang memang relatif obyektif dibandingkan keinginan (*want*). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.

**Gambar 3.1:**  
**Perbedaan Motif dan Tujuan Konsumsi dalam Ekonomi Islam dengan Ekonomi Konvensional**



Sumber: Pengantar Ekonomi Mikro Islam (Hendri Anto : 2003)

## I. Preferensi Konsumsi yang Islami

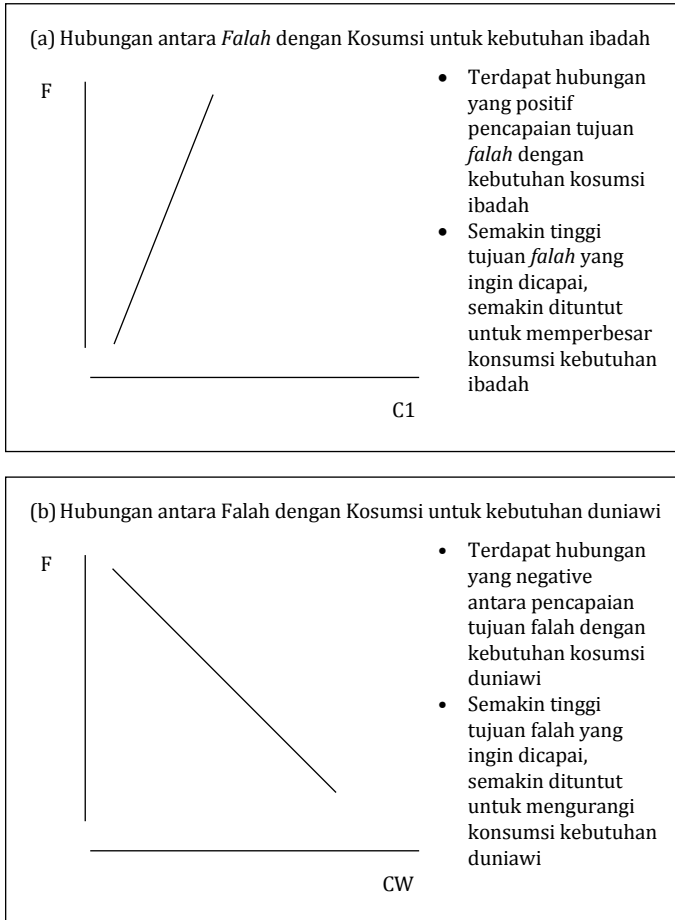
Dalam ekonomi konvensional, pada dasarnya satu jenis benda ekonomi merupakan substitusi yang sempurna bagi benda ekonomi lainnya sepanjang memberikan utilitas yang sama (*indifference curve*). Akibatnya, anggaran akan dialokasikan untuk mengkonsumsi apa saja sepanjang utilitasnya maksimum. Tidak ada benda ekonomi yang lebih berharga daripada benda ekonomi lainnya. Kecuali yang membedakannya adalah tingkat kepuasan yang diperoleh akibat mengkonsumsi benda tersebut. Karenanya, benda yang memberikan utilitas lebih tinggi akan menjadi lebih berharga dibandingkan yang memberikan utilitas yang lebih rendah.

Dalam perpektif Islam, antara benda ekonomi yang satu dengan lainnya (yang dapat dipilih untuk konsumsi) bukan merupakan substitusi yang sempurna. Terdapat benda ekonomi yang lebih berharga dan bernilai sehingga akan diutamakan dibandingkan pilihan konsumsi lainnya. Sebaliknya, terdapat benda ekonomi yang kurang/tidak bernilai, bahkan terlarang, sehingga akan di jauhi. Selain itu, juga terdapat prioritas-prioritas dalam pemenuhannya berdasarkan tingkat kemaslahatannya yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan yang Islami. Dengan demikian, preferensi konsumsi dan pemenuhannya akan memiliki pola sebagai berikut, (Hendri Anto, 2003: 129):

### 1. Mengutamakan akhirat daripada dunia

Pada tataran paling dasar, seorang muslim akan dihadapkan kepada pilihan di antara mengkonsumsi benda ekonomi yang bersifat duniawi belaka (*wordly consumption*,  $C_w$ ) dan yang bersifat ibadah (*ibadah consumption*,  $C_i$ ). Konsumsi untuk ibadah bernilai lebih tinggi karena orientasinya kepada *falah* yang akan mendapatkan pahala dari Allah, sehingga lebih berorientasi pada akhirat. Curva hubungan antara *falah* dengan konsumsi dapat dilihat sebagai berikut:

**Gambar 3.2**  
**Hubungan antar *Falah* dengan Konsumsi**

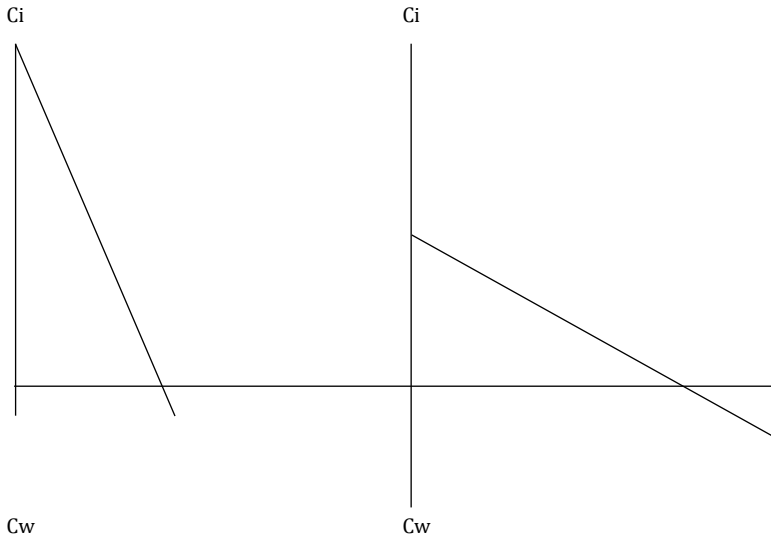


Sumber: Pengantar Ekonomi Mikro Islam (Hendri Anto : 2003)

Seorang muslim yang rasional, yaitu orang yang beriman, semestinya akan mengalokasikan anggaran lebih banyak dalam konsumsi untuk ibadah dibandingkan dengan konsumsi duniawi karena tujuan maksimisasi *falah*. Dengan maksimisasi *falah* maka ia akan memperoleh utilitas yang jauh lebih bernilai dibandingkan dengan utilitas yang diperoleh di dunia. Sebaliknya, semakin tidak rasional, yaitu semakin kufur, maka akan semakin besar

anggaran yang dialokasikan untuk konsumsi duniawi belaka dibandingkan untuk ibadah. Pola alokasi anggaran dilihat pada gambar berikut :

**Gambar 3.3**  
**Hubungan antara Keimanan dengan Pola Budget Line**



- a. Semakin rasional (beriman) seorang muslim maka *budget line* -nya akan semakin condong vertikal (inelastis)
- b. Semakin tidak rasional (kufur) seorang muslim maka *budget line* -nya akan semakin condong horizontal (elastis)

Sumber: Pengantar Ekonomi Mikro Islam (Hendri Anto : 2003)

## 2. Memperhatikan etika dan norma

Syariah Islam memiliki seperangkat etika dan norma yang harus dipegang manakala seseorang berkonsumsi. Beberapa etika ini di antaranya :

- a. Menurut Abdul Manan:
  - a. Prinsip keadilan
  - b. Prinsip kebersihan
  - c. Prinsip kesederhanaan
  - d. Prinsip kemurahan hati
  - e. Prinsip moralitas



## **b. Menurut Yusuf Qardhawi**

- f. Membelanjakan harta dalam kebaikan dan menjauhi sifat kikir
- g. Tidak melakukan kemubaziran
- h. Kesederhanaan, tidak hidup mewah dan boros
- i. Menjauhi berutang
- j. Menjaga aset yang mapan dan pokok

Dari uraian di atas jelaslah bahwa secara garis besar seorang muslim akan mengalokasikan konsumsinya untuk dua jenis konsumsi, yaitu konsumsi untuk ibadah ( $C_i$ ) dan konsumsi untuk duniawi ( $C_w$ ). (Hendri Anto, 2003 : 144). Dengan demikian total konsumsi ( $C_t$ ) seorang muslim merupakan penjumlahan dari konsumsi untuk ibadah dengan konsumsi untuk duniawi, atau dapat diformulakan sebagai berikut:

$$C_t = C_i + C_w$$

Selain alokasi konsumsi yang relatif berbeda dengan ekonomi konvensional, perilaku konsumsi yang Islami juga akan dipengaruhi oleh implementasi zakat dan pelarangan bunga. Bagi para *muzakki* (pembayar zakat) pengenaan zakat akan mengurangi *disposable income* dan sekaligus mendorong untuk pemanfaatan anggaran, baik untuk ditabung maupun diinvestasikan pada sektor produktif. Sementara itu bagi para penerima zakat (*mustahik*) adanya zakat justru akan meningkatkan *disposable income*-nya. Karena bunga dilarang, maka tabungan dan investasi masyarakat juga tidak boleh dikenakan bunga. Alternatifnya, jika tabungan ingin berkembang maka harus dimanfaatkan untuk investasi produktif dengan system bagi hasil. Jadi, pelarangan bunga dengan sendirinya akan mendorong alokasi dana untuk investasi produktif.

## **J. Produksi**

### **1. Pengertian Produksi**

Produksi adalah kegiatan menambah faedah (kegunaan) suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan.

Jenis produksi dapat dibedakan sebagai berikut :

**a. Produksi Barang**

Produksi barang dapat dibedakan atas produksi barang konsumsi dan produksi barang modal. Barang konsumsi merupakan barang siap untuk dikonsumsi, sedangkan barang modal merupakan barang yang dipergunakan untuk menghasilkan barang baru.

**b. Produksi Jasa**

Produksi jasa dapat dibedakan atas jasa langsung dapat memenuhi kebutuhan dan jasa tidak langsung memenuhi kebutuhan, contoh jasa langsung adalah dokter, bengkel, dan guru, sedangkan contoh jasa tidak langsung adalah perbankan dan perdagangan.

**2. Tujuan Produksi**

Tujuan produksi antara lain sebagai berikut :

- a. Untuk memenuhi kebutuhan konsumen.
- b. Berupaya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.
- c. Menghasilkan barang setengah jadi guna memenuhi kebutuhan produksi selanjutnya.
- d. Meningkatkan produksi nasional dalam rangka meningkatkan kemakmuran rakyat.
- e. Memacu tumbuhnya usaha produksi lain, sehingga dapat menyerang pengangguran.
- f. Meningkatkan pendapatan masyarakat atau pendapatan Negara.
- g. Memproduksi barang-barang ekspor berarti meningkatkan sumber devisa Negara.

### 3. Faktor-faktorProduksi

Faktor produksi adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dan jasa jenis-jenis faktor produksi antara lain sebagai berikut :

- a. Alam (*natural resources*)
- b. Tenaga kerja (*labour*)
- c. Modal (*capital*)
- d. Keahlian (*skill*) atau sumber daya penguasa

Faktor produksi alam dan tenaga kerja disebut faktor produksi asli, sedangkan modal dan keahlian disebut faktor produksi turunan.

#### 1) Faktor Produksi Alam

Faktor produksi alam adalah semua kekayaan yang tersedia di alam yang dapat digunakan dalam proses produksi.

Faktor produksi asli terdiri dari berikut ini.

- a) Tanah
- b) Air
- c) Udara
- d) Barang tambang

#### 2) Faktor Produksi Tenaga Kerja

Faktor produksi tenaga kerja adalah faktor produksi insani yang secara langsung atau tidak menjalankan kegiatan produksi. Tenaga kerja dapat dikelompokkan berdasarkan kualitas dan sifat kerjanya.

- a) Tenaga kerja menurut kualitas tenaga kerja
  - (a) Tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang memerlukan pendidikan tertentu sehingga memenuhi keahlian di bidangnya, contohnya dokter dan akuntan.

- (b) Tenaga kerja terampil yaitu tenaga kerja yang memerlukan kursus atau keahlian di bidang tertentu sehingga terampil di bidangnya, contohnya montir, sopir dan tukang las.
  - (c) Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, yaitu tenaga kerja yang tidak melalui pendidikan dan latihan, misal tukang sapu.
- b) Tenaga kerja menurut sifat kerja
    - (a) Tenaga kerja rohani, yaitu tenaga kerja yang menggunakan pikiran rasa dan karsa, misal guru, konsultan dan pengacara.
    - (b) Tenaga kerja jasmani yaitu tenaga kerja yang menggunakan kekuatan fisik dalam kegiatan produksi, misalnya pengayuh becak dan kuli pasar.
- 3) **Faktor Produksi Modal (Turunan)**

Faktor produksi modal adalah benda-benda hasil produksi yang digunakan untuk proses barang dan jasa lain.

Fungsi faktor produksi modal adalah sebagai penunjang dalam mempercepat atau menambah kemampuan dalam memproduksi. Modal dapat digolongkan berdasarkan sumbernya, berikutnya didasarkan kepemilikan dan berdasarkan sifatnya.

- a) Pembagian modal atas dasar sumber
  - (a) Modal sendiri, yaitu modal yang berasal dari dalam perusahaan sendiri, misalnya setoran modal dari pemilik.
  - (b) Modal asing, yaitu modal yang bersumber dari luar perusahaan, misalnya pinjaman dari bank atau hasil penjualan obligasi.
- b) Pembagian modal atau dasar bentuk
  - (a) Modal konkret, yaitu modal yang dapat dilihat secara nyata dalam proses produksi, misalnya mesin, gedung, mobil dan peralatan.

- (b) Modal abstrak, yaitu modal yang tidak memiliki bentuk nyata tetapi mempunyai nilai bagi perusahaan, misalnya hak paten dan hak merek.
- c) Pembagian modal atas dasar pemilikan
  - (a) Modal individu (perorangan), yaitu modal yang sumbernya dari perorangan dan hasilnya menjadi sumber pendapatan bagi pemiliknya, misalnya sewa rumah dan bunga tabungan.
  - (b) Modal masyarakat (umum), yaitu modal yang dimiliki pemerintah dan digunakan untuk kepentingan umum dalam proses produksi misalnya pelabuhan, pasar, dan rumah sakit umum.
- d) Pembagian modal menurut sifat
  - (a) Modal tetap, yaitu jenis modal yang dapat digunakan secara berulang-ulang, misalnya mesin dan bangunan pabrik.
  - (b) Modal lancar, yaitu modal yang habis digunakan dalam satu kali proses produksi, misalnya bahan baku.

#### 4) **Faktor Produksi Keahlian (*Skill*) atau Kewirausahaan**

Faktor produksi keahlian (*skill*) atau kewirausahaan adalah keahlian seorang pengusaha untuk mengelola faktor-faktor produksi secara efektif dan efisien dalam menghasilkan barang dan jasa. Hal-hal pokok yang harus dikuasai pengusaha dalam melakukan kegiatan produksi yaitu sebagai berikut:

- a) *Planning* atau perencanaan  
*Planning* mencakup penetapan tujuan, penyusunan strategi, rencana modal dan biaya, strategi bisnis, visi dan misi, serta kebijakan alternative.
- b) *Organizing* atau pengorganisasian  
 Mencakup pengelolaan semua sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan perusahaan yang meliputi struktur organisasi, spesialisasi kerja, hubungan kerja.

- c) *Actuating* atau Pengarahan  
Mencakup pengarahan dan bimbingan serta motivasi terhadap karyawan dalam menjalankan tugas masing-masing meliputi pengawasan tugas pekerjaan.
- d) *Controlling* atau Pengawasan  
Mencakup kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan tujuan perusahaan terhadap pekerjaan masing-masing bagian.

### K. Perilaku Produsen

Teori perilaku produsen mempelajari bagaimana seorang produsen memilih kombinasi faktor-faktor produksi yang akan digunakan untuk menghasilkan sejumlah barang (produk) dan jasa dengan biaya serendah-rendahnya.

**Tabel 3.1**  
**Kombinasi Faktor-faktor Produksi Produsen**

Modal	Tenaga Kerja	Total Produksi	Marginal produksi
1	1	5	5
1	2	15	10
1	3	27	12
1	4	35	8
1	5	41	6

Sumber: Kinanti Geminastiti, 2013 : 71.

Tabel di atas menunjukkan hukum kenaikan yang makin berkurang ‘*law of diminishing return*’ dimulai saat tenaga kerja berjumlah 3, dan diharapkan kepada produsen agar tidak menambah tenaga kerja karena akan mengakibatkan kenaikan produksi yang terus berkurang dan akan menimbulkan pengangguran tak kentara, karena pekerja seolah-olah bekerja, tetapi mereka tidak menghasilkan produk tambahan.

Menurut nilai *marginal product* inilah yang menunjukkan berlakunya *The Law of Diminishing Marginal Utility*.

## L. Perilaku Produsen menurut Konsep Islam

Kegiatan produksi merupakan mata rantai dari konsumsi dan distribusi. Pada prinsipnya kegiatan produksi, sebagaimana konsumsi, terkait sepenuhnya dengan syariat Islam. Kahf (1992; 114) mendefinisikan kegiatan produksi dalam perspektif Islam sebagai *usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitas, sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama Islam, yaitu kebahagiaan dunia akhirat.*

Dari pendapat ahli di atas ada beberapa implikasi mendasar bagi kegiatan produksi dan perekonomian dalam Islam secara keseluruhan, di antaranya:

- a. Seluruh kegiatan produksi terikat pada tatanan nilai moral dan teknikal yang Islami, sebagaimana juga dalam kegiatan konsumsi.
- b. Kegiatan produksi harus memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan.
- c. Permasalahan ekonomi muncul bukan saja karena kelangkaan (*scarcity*) saja, tetapi lebih kompleks.

Keadilan dan kebajikan bagi masyarakat secara keseluruhan sesungguhnya merupakan intisari ajaran Islam. Untuk itu kegiatan produksi tentu saja harus senantiasa berpedoman kepada nilai-nilai kebajikan dan keadilan bagi masyarakat ini. Secara spesifik, Siddiqi (1992) menyebutkan 3 (tiga) prinsip pokok produsen yang Islami, yaitu :

- a. Memiliki komitmen yang penuh terhadap keadilan
- b. Memiliki dorongan untuk melayani masyarakat (untuk mencapai kesejahteraan), sehingga segala keputusan harus mempertimbangkan hal ini.
- c. Optimisasi keuntungan diperkenankan dengan batasan kedua prinsip di atas.

Sesuai dengan prinsip ekonomi di atas, maka alokasi sumber daya ekonomi (SDE) akan berorientasi sebagai berikut:

- a. Berbagai barang dan jasa yang terlarang (oleh ajaran Islam) tidak akan di produksi sehingga tidak ada sumber daya ekonomi yang dialokasikan untuk produksi barang dan jasa tersebut.
- b. Selanjutnya, produksi barang-barang kemewahan juga harus dikurangi sedemikian rupa sehingga semakin sedikit sumber daya ekonomi yang dialokasikan untuk memproduksinya.
- c. Akan ada perluasan industri untuk menghasilkan barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat sehingga sumber daya ekonomi lebih banyak dialokasikan untuk hal ini.

## **M. Permintaan**

Permintaan adalah suatu keadaan di mana seseorang mempunyai keinginan untuk membeli barang dan jasa disertai kemampuan untuk melakukan pembayaran pada tingkat harga dan waktu tertentu.

### **1. Hukum Permintaan**

Faktor yang menentukan besarnya permintaan di antaranya adalah harga barang dan jasa itu sendiri, harga barang dan jasa lain, pendapatan, selera, dan jumlah penduduk. Dalam melakukan analisis faktor yang mempengaruhi permintaan para ekonom biasanya mengalisisnya satu persatu. Ketika ingin melihat pengaruh perubahan harga terhadap permintaan, maka faktor-faktor lain yang mempengaruhi harga dianggap tidak berubah atau konstan atau *ceteris paribus*.

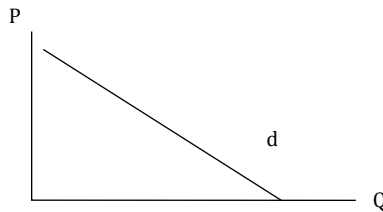
Harga memegang peranan penting dalam menentukan jumlah permintaan. Semakin rendah harga suatu barang, semakin tinggi jumlah barang yang diminta. Dan sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, semakin rendah jumlah barang yang diminta. Fenomena ini merupakan isi dari hukum permintaan. Dengan demikian, hukum permintaan berbunyi :



"Jika harga suatu barang dan jasa meningkat, maka kuantitas yang diminta akan menurun. Sebaliknya, apabila harga suatu barang dan jasa turun, maka kuantitas yang diminta akan meningkat, *ceteris paribus*".

## 2. Kurva Permintaan

Kurva yang menghubungkan titik-titik pertemuan antara harga dan jumlah barang yang diminta:



### Keterangan :

P = *Price* (harga)

Q = *Quantity* (kuantitas)

d = *demand* (permintaan)

## N. Penawaran

Penawaran adalah suatu kondisi di mana produsen menyediakan dan menawarkan sejumlah barang dan jasa kepada konsumen pada tingkat harga tertentu dan selama periode waktu tertentu. Pengertian ini berlaku dengan asumsi *ceteris paribus*.

### 1. Hukum Penawaran

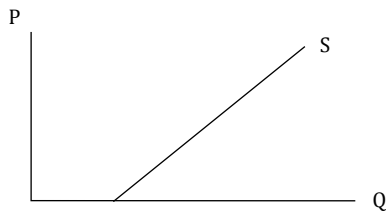
Sama halnya dengan permintaan, penawaran pun dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya harga bahan baku, tingkat teknologi, jumlah produsen di pasar dan pengharapan. Dalam melakukan analisis faktor yang mempengaruhi penawaran, para ekonom menganalisis faktor-faktor tersebut secara terpisah.

Faktor yang memegang peranan penting dalam penawaran adalah faktor harga. Pada penawaran tingkat harga dan jumlah barang yang ditawarkan mempunyai hubungan yang searah. Fenomena ini menjadi isi hukum penawaran. Maka hukum penawaran berbunyi :

*“Jika harga suatu barang dan jasa meningkat, maka kuantitas yang ditawarkan juga meningkat. Sebaliknya, apabila harga suatu barang dan jasa turun, maka kuantitas yang ditawarkan juga akan semakin menurun, ceteris paribus.”*

## 2. Kurva Penawaran

Kurva yang menghubungkan titik-titik pertemuan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan.



### Keterangan:

P = Price (harga)

Q = Quantity (kuantitas)

s = supply (penawaran)

## O. Evaluasi

### Soal Uraian

1. Sebutkanlah dua peran yang dimainkan oleh rumah tangga keluarga dalam kegiatan ekonomi.
2. Rumah tangga produsen sering disebut sebagai .....
3. Sebagai pelaku ekonomi pemerintah melakukan .....
4. Jelaskanlah perilaku konsumsi menurut ekonomi Islam.
5. Apa bunyi hukum permintaan dan hukum penawaran?

# BAB IV

## PASAR

### **Tujuan Pembelajaran**

Dengan mempelajari bab ini, siswa diharapkan dapat :

1. Menjelaskan pengertian pasar
2. Menjelaskan peran pasar dalam perekonomian
3. Menjelaskan bentuk-bentuk dan struktur pasar
4. Mendeskripsikan proses terbentuknya harga dalam sistem ekonomi Islam
5. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran menurut ekonomi Islam
6. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran menurut ekonomi Islam
7. Menjelaskan kurva permintaan dan penawaran menurut teori ekonomi Islam
8. Menggambarkan kurva permintaan dan penawaran menurut teori ekonomi Islam

### **A. Pasar**

Secara sempit, pasar diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual dan beli barang atau jasa. Pengertian ini dapat kita lihat pada pasar tradisional. Secara luas, pasar merupakan proses dimana penjual dan pembeli saling berinteraksi untuk menentukan harga keseimbangan atau kesepakatan atas tingkat harga berdasarkan permintaan dan penawaran. Dengan pemahaman ini, tidak perlu

ada pertemuan penjual dan pembeli secara langsung. Hal ini dapat kita lihat pada pasar saham. Dapat disimpulkan, bahwa pasar merupakan tempat pertemuan permintaan dan penawaran, sehingga harga dapat ditetapkan.

**Gambar 4.1**  
**Pertemuan antara penjual dan pembeli**



*Sumber: pustakamandiri.web.id.*

Berdasarkan jenis barang yang diperjualbelikan, pasar dapat dibedakan atas pasar barang konsumsi dan pasar faktor produksi. Faktor produksi adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh produsen sebagai *input* untuk memproduksi barang siap pakai. Untuk memproduksi suatu barang, produsen membutuhkan lahan tempat berproduksi, tenaga kerja yang akan menjalankan proses produksi, modal, dan kemampuan untuk mengelola semua itu, yang disebut dengan kewirausahaan.

Faktor produksi ini dijual oleh rumah tangga konsumsi kepada rumah tangga produksi. Perhatikanlah bagaimana proses penjualan dan penawaran tanah untuk pembangunan pabrik, bagaimana proses mencari pekerjaan yang dilakukan oleh berbagai tingkatan tenaga kerja, atau bagaimana susahnya mengelola perusahaan hingga membutuhkan banyak biaya. Semua itu bagian dari proses penjualan faktor produksi dari rumah tangga konsumsi ke rumah tangga produksi.

Sebaliknya, barang konsumsi dijual oleh rumah tangga produksi kepada rumah tangga konsumsi. Semua itu juga merupakan bagian dari proses penjualan barang-barang konsumsi dari rumah tangga produksi ke rumah tangga konsumsi. Setiap proses melibatkan uang sebagai alat tukar.

Tempat bertemunya permintaan dan penawaran terhadap faktor produksi disebut **pasar faktor produksi**. Sedangkan tempat bertemunya permintaan dan penawaran barang konsumsi disebut **pasar barang konsumsi**. (Alam S, 2013).

Pada pasar faktor produksi, permintaan datang dari rumah tangga produksi dan penawaran datang dari rumah tangga konsumsi ke rumah tangga produksi. Barang-barang yang ditawarkan adalah faktor-faktor produksi. Sementara itu, pada pasar barang konsumsi, permintaan datang dari rumah tangga konsumsi dan penawaran datang dari rumah tangga produksi ke rumah tangga konsumsi. Barang-barang yang ditawarkan adalah barang-barang konsumsi.

## **B. Struktur Pasar**

Struktur pasar adalah berbagai hal yang dapat mempengaruhi tingkah laku dan kinerja perusahaan dalam pasar seperti jumlah perusahaan, skala produksi, dan jenis produksi. Struktur pasar yang kompetitif adalah struktur pasar yang mana di dalamnya sama sekali tidak punya kemampuan untuk mempengaruhi harga dan jumlah barang di pasar. Semakin lemah kemampuan perusahaan-perusahaan tersebut, semakin kompetitif struktur pasarnya.

Struktur pasar di suatu negara dapat bergerak mulai dari struktur pasar persaingan sempurna sampai dengan monopoli.

### **1. Pasar Persaingan Sempurna**

#### **a. Pengertian**

Pasar persaingan sempurna menggambarkan suatu keadaan dimana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga, sehingga harga

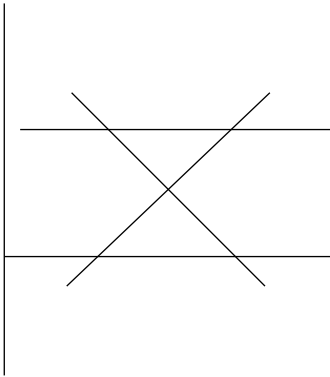
di pasar benar benar merupakan hasil interaksi antara permintaan dan penawaran. Sehingga, harga yang terbentuk adalah cerminan keinginan konsumen dan produsen.

**b. Ciri-ciri Pasar Persaingan Sempurna**

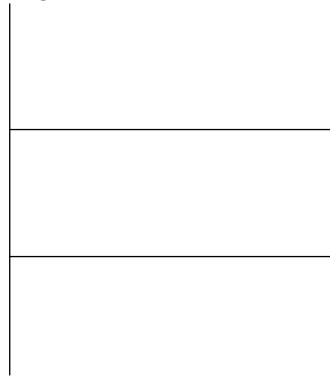
- 1) Terdapat banyak pembeli, tetapi mereka tidak dapat mempengaruhi harga.
- 2) Terdapat banyak penjual, tetapi mereka tidak dapat mempengaruhi harga.
- 3) Barang dan jasa bersifat homogen dan tidak dapat di bedakan.
- 4) Adanya kebebasan untuk keluar dan masuk dari pasar persaingan sempurna.
- 5) Setiap pihak dapat mengetahui keadaan pasar dengan mudah.
- 6) Adanya kebebasan untuk mengambil keputusan.

Perusahaan A misalnya, yang memproduksi beras hanyalah satu di antara sekian banyak perusahaan beras dengan produk yang sama. Kontribusi perusahaan yang satu terhadap produksi beras secara keseluruhan hanyalah sebagian kecil dari jumlah produksi yang sangat besar. Artinya, berapapun kuantitas (*output*) beras yang dapat di produksi sebuah perusahaan, harga keseimbangan di pasar tidak akan berubah. Untuk menyederhanakan keuntungan, pengaruh kecil ini sering diabaikan. Oleh karena itu, jika digambarkan dalam bentuk kurva permintaan beras untuk perusahaan penghasil beras berbentuk garis lurus mendatar atau garis lurus horizontal. Namun untuk secara keseluruhan, kurva terhadap permintaan beras tetap merupakan suatu garis miring dari kanan atas ke kiri bawah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kurva berikut :

a. Pasar beras



b. Permintaan beras pada setiap perusahaan beras



c. Laba Maksimum dalam Pasar Persaingan Sempurna

Untuk produsen perseorangan, harga pasar merupakan indikator atau pedoman dalam melakukan produksinya. Naik turunnya harga sangat mempengaruhi produksi perusahaan secara perseorangan. Untuk mengurangi resiko kerugian terhadap perubahan harga tersebut, seorang pengusaha harus selalu menghitung titik pulang pokok (*Break Even Point - BEP*) dalam kondisi apapun. Titik pulang pokok adalah keadaan ketika total penerimaan sama dengan total biaya yang dikeluarkan. Untuk mengetahui titik pulang pokok dan laba maksimum suatu perusahaan, kita harus mengetahui terlebih dahulu total biaya dan total penerimaan perusahaan tersebut. (Alam S : 2013).

**a. Penerimaan total (*total revenue - TR*)**

Istilah itu didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh dari hasil produk. Untuk pasar persaingan sempurna, kurva TR merupakan garis lurus menaik yang dimulai dari titik nol. Secara matematis, penerimaan total dapat ditulis sebagai berikut.

$$TR = P \times Q$$

**b. Penerimaan rata rata (*average revenue-AR*)**

Istilah itu didefinisikan sebagai penerimaan total per unit yang diproduksi. Untuk kurva pasar persaingan sempurna, kurva penerimaan

rata rata sama dengan kurva permintaan. Secara matematis, penerimaan rata rata dapat ditulis secara berikut.

$$AR = TR \div Q = P$$

**c. Penerimaan marjinal (*marginal reveue-MR*)**

Istilah itu didefinisikan sebagai tambahan penerimaan yang diperoleh sebagai hasil dari penjualan satu unit produk lagi. Kurva penerimaan marjinal sama dengan kurva penerimaan rata-rata, dan sama juga dengan kurva perminntaan. Secara matematis, biaya marjinal dapat ditulis sebagai brikut.

$$MR = TR_n - TR_{n-1}$$

**d. Biaya marjinal (*marginal cost-MC*)**

Istilah itu juga didefinisikan sebagai tambahan biaya yang harus dikeluarkan sebagai akibat dari memproduksi suatu unit tambahan. Secara matematis, biaya marjinal dapat ditulis sebagai berikut.

$$MC = TC_n - TC_{n-1}$$

**e. Biaya total rata rata (*average total cost*)**

Istilah itu didefinisikan sebagai biaya total yang harus dikeluarkan untuk setiap unit produksi. Secara matematis, biaya total rata rata dapat ditulis sebaagi berikut.

$$ATC = \frac{TC}{Q}$$

**d. Peran Pasar Persaingan Sempurna bagi Masyarakat**

Harga pada pasar persaingan sempurna bersifat *datum*. Artinya, produsen tidak akan dapat mempengaruhi harga dengan cara menambah atau mengurangi produksi. Jadi, pasar persaingan sempurna mendidik masyarakat melakukan proses produksi secara efisien, sehingga produk yang sampai kepada masyarakat adalah produk yang bermutu terbaik dan harga murah.



### e. **Kebaikan dan Kelemahan Pasar Persaingan Sempurna**

Kebaikan pasar persaingan sempurna adalah terbentuknya harga berdasarkan interaksi permintaan dan penawaran. Pasar persaingan sempurna memacu produsen untuk berproduksi secara efisien. Di samping itu, sumber daya produksi bebas keluar masuk, sehingga kegiatan ekonomi lebih sehat dan bergairah.

Kelemahan pasar persaingan sempurna, barang yang diperdagangkan bersifat homogen. Tidak ada keunggulan suatu produk dibandingkan produk lain. Inovasi menjadi terhambat.

## **2. Pasar Monopoli**

### a. **Pengertian**

Dari segi bahasa, kata monopoli berasal dari kata *mono* yang berarti satu dan *poli* yang berarti penjual. Dengan demikian, pasar monopoli didefinisikan sebagai suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar, dan perusahaan ini tidak mempunyai barang pengganti (substitusi) yang sangat dekat.

### b. **Ciri-ciri Pasar Monopoli**

Ada beberapa ciri dan sifat dari pasar monopoli, yaitu:

- 1) Hanya ada satu orang penjual,
- 2) Terdapat banyak pembeli
- 3) Produknya tidak mempunyai barang pengganti yang dekat
- 4) Adanya hambatan untuk masuk pasar

Hambatan-hambatan tersebut antara lain:

- 1) Penetapan harga serendah mungkin
- 2) Adanya kepeemilikan terhadap hak paten atau hak cipta dan hak eksklusif
- 3) Pengawasan yang ketat terhadap agen pemasaran atau distribusi
- 4) Adanya skala ekonomis yang sangat besar
- 5) Memiliki sumberdaya yang unik

**c.. Penyebab munculnya pasar monopoli :**

- 1) Ditetapkan oleh undang undang
- 2) Penggabungan dari berbagai perusahaan
- 3) Adanya hasil cipta atau karya seseorang yang diberikan kepada perusahaan untuk diproduksi.

**d. Laba maksimum dalam pasar monopoli:**

Untuk menaikkan harga pada pasar monopoli, produsen harus melakukan analisis dan perhitungan yang akurat. Hal ini dimaksudkan agar kenaikan harga tersebut bisa meningkatkan penjualan perusahaan, dan bukan justru mengakibatkan konsumen menunda pembelian atau berpindah ke barang substitusi.

Untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal pada pasar monopoli, biaya marjinal atau *MC* harus sama dengan penerimaan marginal atau *MR*.

**e. Kebaikan pasar monopoli:**

- 1) Menghindari produk-produk tiruan dan persaingan yang tidak bermanfaat
- 2) Menimbulkan skala ekonomi yang menurunkan biaya produksi
- 3) Terjaganya kesinambungan stabilitas perusahaan
- 4) Mendorong penggunaan mesin mesin generasi terbaru dengan tingkat teknologi tinggi
- 5) Mendorong peningkatan kinerja departemen penelitian dan pengembangan

**f. Keburukan pasar monopoli:**

- 1) Penyalahgunaan kekuatan ekonomi
- 2) Adanya pelecehan terhadap posisi konsumen
- 3) Adanya kesenjangan dalam pembagian pendapatan
- 4) Tidak adanya persaingan
- 5) Mengurangi kesejahteraan konsumen

**g. Peran pemerintah dalam pasar monopoli:**

- 1) Mencegah timbulnya monopoli itu sendiri
- 2) Pemberian izin pada perusahaan baru
- 3) Menambah penawaran barang dalam negeri dengan jalan impor
- 4) Pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET).

**3. Pasar Oligopoli**

**a. Pengertian**

Pasar oligopoli adalah pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Jumlah perusahaan pada pasar oligopoli umumnya lebih dari dua tetapi kurang dari sepuluh.

**b. Ciri ciri pasar opologi:**

- 1) Terdapat banyak pembeli di pasar
  - 2) Hanya ada beberapa penjual
  - 3) Produk yang dijual bisa bersifat homogen, dan bisa juga berbeda, namun memenuhi standar tertentu.
  - 4) Terdapat hambatan memasuki pasar bagi perusahaan baru
  - 5) Adanya saling ketergantungan
  - 6) Penggunaan iklan sangat intensif.
- c. Contoh perusahaan oligopoli biasanya adalah perusahaan dalam bidang teknologi.

**4. Pasar Persaingan Monopolistik**

**a. Pengertian**

Pasar Persaingan Monopolistik adalah suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang serupa, tetapi memiliki perbedaan pada beberapa aspek. Contoh pasar sepeda motor di Indonesia.

**b. Ciri-ciri Pasar Persaingan Monopolistik sebagai berikut:**

- 1) Terdapat banyak produsen atau penjual
- 2) Jenis barang yang dipasarkan berbeda
- 3) Produsen mampu memengaruhi harga
- 4) Produsen lain mudah masuk ke dalam pasar
- 5) Promosi penjualan harus aktif.

Karena pasar Persaingan Monopolistik mempunyai banyak persamaan dengan pasar monopoli, maka untuk memperoleh laba maksimum dan titik pulang pokok hampir sama dengan pasar monopoli yaitu pada saat  $MC = MR$ .

**c. Kebaikan Pasar Persaingan Monopolistik**

Barang yang diperdagangkan pada pasar persaingan monopolistik berbeda, walaupun fungsinya sama. Perbedaan bisa menyangkut kualitas, harga, atau pelayanan. Karena itu, perusahaan terdorong melakukan inovasi. Kebaikan lainnya adalah masyarakat umumnya selalu mendapatkan pelayanan yang baik karena perusahaan ingin memuaskan pelanggan guna mendominasi pesaing.

**d. Keburukan Pasar Persaingan Monopolistik**

Karena persaingan yang tajam, perusahaan harus mengeluarkan biaya promosi yang mahal. Hal ini mendorong harga pada pasar persaingan monopolistik berada di tingkat yang tinggi.

**C. Proses Terbentuknya Harga dalam Ekonomi Islam**

Transaksi ekonomi pasar bekerja berdasarkan mekanisme harga. Agar transaksi memberikan keadilan bagi seluruh pelakunya, maka harga seharusnya juga mencerminkan keadilan. Dalam perdagangan Islam transaksi harus dilakukan secara sukarela (*'an taradhin minkum*) dan memberikan keuntungan proporsional bagi pelakunya. (Anto, 2003). Tetapi, seringkali harga pasar yang tercipta dianggap tidak sesuai dengan

kebijakan dan keadaan ekonomi secara keseluruhan. Dalam dunia nyata mekanisme pasar terkadang juga tidak dapat berjalan baik karena adanya faktor yang mendistorsinya. Untuk itu, pemerintah memiliki peran besar dalam mengelola harga.

Islam sangat menjunjung tinggi keadilan, termasuk juga dalam harga. Istilah *al-qimah al-'adl* (harga yang adil) pernah digunakan oleh Rasulullah dalam mengomentari kompensasi pembebasan budak, di mana budak ini akan menjadi manusia merdeka dan majikannya tetap memperoleh kompensasi dengan harga yang adil atau *al-qimah al-'adl (shahih Muslim)*. Istilah ini juga banyak digunakan oleh para hakim yang telah mengkodifikasikan hukum Islam tentang transaksi bisnis dalam hal objek barang cacat yang dijual, perebutan kekuasaan, memaksa penimbun barang menjual barang timbunannya, membuang jaminan atas hak milik dan sebagainya.

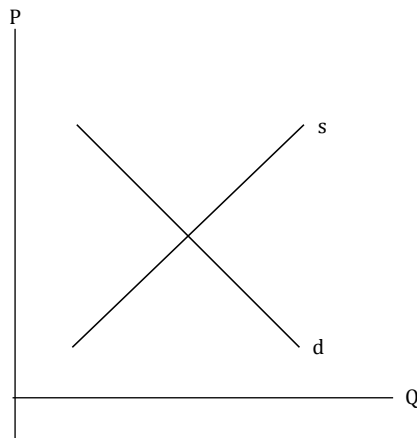
Meskipun istilah-istilah tersebut telah digunakan sejak masa Rasulullah dan Khulafau al-Rasyidin, tetapi sarjana muslim pertama yang memberikan perhatian khusus adalah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah sering menggunakan dua terminologi dalam pembahasan harga ini, yaitu *al-'iwad al-mitsl (equivalen compensation/kompensasi yang setara)* dan *al-tsaman al-mitsl (equivalen price/harga yang setara)*. Di manapun ia membedakan dua jenis harga, yaitu harga yang tidak adil dan terlarang serta harga yang adil dan disukai. Dia mempertimbangkan harga yang setara ini sebagai harga adil. (Anto : 2003).

Dalam *Majmu'u Fatwa*-nya Ibnu Taimiyah, sebagaimana dikemukakan lebih jauh oleh Anto (2003), mendefinisikan *equivalen price* sebagai harga baku di mana penduduk menjual barang mereka dan secara umum diterima sebagai suatu yang setara dengan itu dan untuk barang yang sama pada waktu dan tempat yang khusus.

Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan mendasar bagi transaksi yang Islami. Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kedzaliman) sehingga menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak yang lain.

Konsep harga yang adil yang didasarkan atas konsep *equivalence price* jelas lebih maju dalam teori harga dibandingkan dengan, misalnya, konsep *just price*. Konsep *just price* hanya melihat harga dari sisi produsen sebab mendasarkan pada biaya produksi saja. Konsep ini jelas kurang memberikan rasa keadilan dalam prespektif yang luas, sebab konsumen juga memiliki penilaian tersendiri atas harga suatu barang. Dalam kondisi normal *equivalen price* ini dapat dicapai melalui mekanisme pasar yang bebas. Itulah sebabnya syariat Islam sangat menghargai harga yang terbentuk oleh kekuatan permintaan dan penawaran di pasar. (Anto : 2003)

**Gambar 4.2**  
Permintaan dan penawaran di pasar



Islam menjunjung tinggi mekanisme pasar bebas

1. Titik keseimbangan pasar akan terjadi ketika permintaan bertemu dengan penawaran secara bebas (*antaraddim minkum*)
2. Jika proses mencapai titik keseimbangan ini terganggu maka pemerintah harus melakukan intervensi

Karim (2003), memaparkan bahwa pada masa jaman kenabian, sudah ada pemikiran yang menjadi kesepakatan bersama bahwa tinggi rendahnya permintaan terhadap barang komoditas ditentukan oleh harga barang yang

bersangkutan. Pemahaman saat itu mengatakan bahwa bila tersedia sedikit barang, maka harga barang akan mahal dan apabila tersedia banyak barang maka harga barang akan murah.

Abu Yusuf, sebagaimana dikemukakan oleh Karim (2003), tercatat sebagai ulama terawal yang mulai menyinggung mekanisme pasar. Ia misalnya memperhatikan peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga.

Dengan kata lain, pemahaman Abu Yusuf tentang hubungan antara harga dan kuantitas hanya memperhatikan kurva *demand*. Fenomena yang berlaku pada zaman dapat dijelaskan dengan teori permintaan. Hubungan harga dan kuantitas dapat diformulasikan sebagai berikut.

$$D = Q = f(P)$$

Formulasi ini menunjukkan bahwa pengaruh harga terhadap jumlah permintaan komoditi adalah negatif, apabila P naik maka Q turun, begitu pula sebaliknya. Dapat kita simpulkan bahwa hukum permintaan mengatakan bahwa harga komoditi naik, maka akan diresponi oleh penurunan jumlah komoditi yang dibeli, begitu juga sebaliknya.

Abu Yusuf membantah pendapat ini, karena pada kenyataannya tidak selalu terjadi bahwa bila persediaan barang sedikit maka akan mahal, dan begitu juga sebaliknya. Abu Yusuf menyatakan, "*kadang kadang makanan berlimpah, tetapi tetap mahal dan kadang kadang makanan sedikit tetapi murah.*"

Dalam hukum penawaran terhadap barang dikatakan bahwa hubungan antara harga dan banyaknya barang yang ditawarkan mempunyai kemiringan positif.

$$S = Q = f(p_1)$$

Formulasi ini menunjukkan bahwa pengaruh harga terhadap jumlah penawaran komoditi adalah positif. Artinya, apabila P naik maka Q naik, begitu pula sebaliknya. Dapat kita simpulkan bahwa hukum penawaran mengatakan bahwa bila harga komoditi naik, maka akan diresponi oleh penambahan jumlah komoditi yang ditawarkan, begitu juga sebaliknya.

Menurut Shidiqi (1992), ucapan Abu Yusuf harus diterima sebagai pernyataan hasil pengamatannya saat itu, yaitu keberadaan yang bersamaan antara melimpahnya barang dan tingginya harga serta kelangkaan barang dan harga rendah.

Sementara itu al-Ghazali sudah menyajikan penjabaran yang rinci akan peranan aktivitas perdagangan dan timbulnya pasar yang harganya bergerak sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran. Bagi al-Ghazali, pasar merupakan bagian dari “keturunan alami”. Secara rinci juga menerangkan bagaimana evolusi terciptanya pasar.

Al-Ghazali tidak menolak kenyataan bahwa keuntunganlah yang menjadi motif perdagangan. Dan pada saat lain ia menjabarkan pentingnya peran pemerintah dalam menjamin jalur perdagangan demi kelancaran perdagangan dan pertumbuhan ekonomi.

Walaupun al-Ghazali tidak menjelaskan permintaan dan penawaran dalam terminologi modern, beberapa paragraf yang ditulisnya jelas menunjukkan kurva permintaan dan penawaran. Untuk kurva penawaran yang “naik dari kiri bawah ke kanan atas” dinyatakan sebagai “jika petani mendapatkan pembeli dan barangnya, ia akan menjualnya dengan harga murah”.

#### **D. Evaluasi**

**Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut :**

1. Jelaskanlah ciri-ciri pasar persaingan sempurna!
2. Apakah perbedaan antara pasar monopoli dan oligopoli ?
3. Jelaskanlah proses terbentuknya harga pasar menurut konsep ekonomi Islam !



# BAB V

## BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK

### **Tujuan Pembelajaran**

Dengan mempelajari bab ini, siswa diharapkan dapat :

1. Mendeskripsikan sejarah bank
2. Menjelaskan pengertian bank
3. Menyebutkan jenis-jenis bank
4. Menjelaskan produk dan layanan bank
5. Mendeskripsikan perbankan syariah dan produk bank syariah
6. Menjelaskan pengertian lembaga keuangan bukan bank
7. Menjelaskan manfaat tentang lembaga keuangan bukan bank dalam perekonomian
8. Menjelaskan pengertian dan fungsi bank sentral
9. Mendeskripsikan pengertian, fungsi dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan.

### **A. Sejarah Bank**

Kata bank berasal dari bahasa Italia, yaitu *banco*. *Banco* pada masa lalu berarti bangku atau meja. Meja dalam sejarah bank pertama kali digunakan sebagai tempat menukar uang. Karena itu bank pertama kalinya adalah tempat pertukaran uang. Pada tahapan berikutnya, fungsi bank diperankan oleh para “pandai besi” (*goldsmith*) yang menyediakan jasa penyimpan uang emas dan perak untuk menghindari pencurian. Untuk membuktikan bahwa seseorang telah menitipkan uang, dia diberi selembar kertas yang lebih populer dengan

nama *goldsmith notes*. *Goldsmith notes* dapat disamakan dengan uang giral dewasa ini. Dengan lembar kertas itu, transaksi jual beli uang emas bisa dilakukan dengan mudah oleh *glodsmith* dan penyimpan uang.

## 1. Pengertian Bank

Prof. G.M. Velyn Stuart dalam bukunya yang berjudul *Bank Politic*, memberi pengertian bahwa bank adalah suatu badan usaha yang bertujuan untuk memberi kredit, baik dengan uang sendiri maupun yang dipinjam dari orang lain, dan mengedarkan alat penukar berupa uang kertas dan uang giral.

## 2. Jenis Bank

Bank dapat kita kelompokkan atas jenis kegiatannya, bentuk badan hukum, dan kepemilikan.

### a. Pembagian bank menurut jenis kegiatannya

#### 1) Bank sentral/Bank Indonesia.

##### a) Pengertian Bank Indonesia

UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2004, Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-undang ini (pasal 4 ayat 2).

##### b) Tujuan Bank Indonesia

Tujuan Bank Indonesia ditetapkan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah yang dimaksudkan adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa terhadap mata uang negara lain.

##### c) Tugas/peran Bank Indonesia

Tugas pokok Bank Indonesia sebagai berikut.

(1). Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.

Sebagai otoriter moneter, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Arah kebijakan didasarkan pada sasaran ekonomi makro lainnya, baik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang. Implementasi kebijakan moneter ini dilakukan dengan menetapkan sasaran operasional, yaitu uang *primer base money*. Untuk melaksanakan tugas di bidang moneter, Bank Indonesia memiliki alat-alat canggih yang dikenal dengan piranti moneter. Piranti tersebut adalah operasi pasar terbuka, penentu tingkat diskonto dan penetapan cadangan wajib minimum bagi perbankan *reserve requirement*. Berkaitan dengan perannya di bidang moneter ini, Bank Indonesia juga menentukan kebijakan nilai tukar, mengelola cadangan devisa, dan berperan sebagai *lender of the last resort*.

(2). Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran

Selain tugasnya di bidang moneter dan perbankan, tugas lain Bank Indonesia yang tidak kalah pentingnya adalah mengatur dan menyelenggarakan sistem pembayaran antara lain, dengan jalan memperluas, memperlancar dan mengatur lalu lintas pembayaran giral dan menyelenggarakan kliring antar bank. Sistem pembayaran tunai menyangkut pencekakan dan peredaran uang agar jumlah denominasi, kelayakan, maupun keamanan uang sebagai alat pembayaran yang sah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan pembagian aktifitas ekonomi.

Sementara sistem pembayaran nontunai menyangkut peredaran uang yang pada umumnya dalam bentuk giral

dan produk-produk perbankan lainnya, baik melalui proses kliring antar bank maupun memakai alat kredit. Program pengembangan sistem pembayaran nasional yang telah dikembangkan antara lain Sistem Klering Elektronik Jakarta (SKEJ), penetapan kliring Tto, bank Indonesia layanan Informasi dan transaksi antar bank secara elektronik (BI-Line), Sistem *Real Time Gross Settlement* (RTGS) dan sistem transfer dalam US\$.

(3) Mengatur dan mengawasi bank

Dalam rangka tugas mengatur dan mengawasi bank, BI menetapkan peraturan memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan atau kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan atas bank dan dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan, selain memberikan dan mencabut izin usaha bank, BI juga dapat memberikan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, serta memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.

Di bidang pengawasan, BI melakukan pengawasan langsung *on site supervision* maupun tidak langsung. Pengawasan langsung bisa dilakukan dalam bentuk pemeriksaan secara berkala maupun sewaktu-waktu, bila diperlukan. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penelitian, analisis dan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan oleh bank.

**Gambar 5.1**  
**Bank Indonesia**



*Sumber: aktual.com*

2) Bank Umum Konvensional

Bank umum konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha seperti menghimpun dana dan memberikan pinjaman serta jasa lalulintas pembayaran dalam bidang keuangan kepada masyarakat, dengan memakai instrumen bunga. Usaha dan fungsi bank umum ini meliputi hal-hal berikut:

- a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan lainnya.
- b) Memberikan kredit dan menerbitkan surat pengakuan utang.
- c) Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya, terdapat hal-hal berikut:
  - (1). Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak boleh lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat yang dimaksud.
  - (2). Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat yang dimaksud.

- (3). Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
- (4). Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan obligasi.
- (5). Surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu tahun.
  - (a). Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah.
  - (b). Menempatkan dan meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan sarana komunikasi seperti surat maupun dengan wesel, cek atau sarana lainnya.
  - (c). Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga.
  - (d). Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
  - (e). Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
  - (f). Melakukan penempatan dana kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
  - (g). Membeli melalui pelelangan agunan, baik semua atau sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
  - (h). Menyediakan pembayaran dan melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

### 3) Bank Umum Syari'ah

**Gambar 5.2**  
**Bank Syariah**



*Sumber: republika.co.id*

Bank umum syariah adalah bank yang dikelola dengan prinsip Islam yang mengharamkan memungut bunga dari suatu transaksi ekonomi. Bank syariah memperoleh penerimaan melalui cara-cara yang dibenarkan oleh syariat Islam. Pada hakikatnya cara-cara tersebut mirip dengan mekanisme jual beli pada umumnya. Namun semua aktifitas ekonomi yang dibenarkan oleh syariat Islam adalah yang memenuhi beberapa hal berikut:

a) Bersifat produktif

Prinsip yang utama dari ekonomi Islam adalah fokus pada kegiatan ekonomi riil. Artinya, ekonomi Islam memandang bahwa semua aktifitas ekonomi harus produktif. Inilah sebabnya mengapa bunga yang merupakan pendapatan tak produktif (imbalan atas modal, bukan dari penggunaan modal) tidak diperbolehkan dalam perbankan syariah.

b) Tidak eksploitatif

Artinya kegiatan ekonomi tidak boleh ditujukan demi keuntungan satu pihak dan mengorbankan pihak lain. Kedua

belah pihak harus sama-sama diuntungkan. Hak kepemilikan adalah menurut azas kemanfaatan, bukan penguasaan.

c) Berkeadilan

Dalam prinsip keadilan, tidak boleh ada transaksi ekonomi yang merugikan pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung.

d) Tidak bersifat spekulatif

Dalam prinsip syariah, spekulasi dianggap sebagai sesuatu yang tidak bermanfaat atau mubazir. Spekulasi dianggap sebagai perjudian dan mengakibatkan orang yang melakukannya terancam kemiskinan. Uang atau barang yang dispekulasikan pun menjadi tidak produktif dan bermanfaat.

e) Anti riba

Awalnya, masih banyak perdebatan tentang bunga termasuk ke dalam riba yang diharamkan oleh syariat Islam. Akan tetapi Majelis Ulama Indonesia dalam fatwa tahun 2003, telah memutuskan bahwa bunga bank termasuk riba. Riba sebenarnya adalah tambahan yang ditetapkan dalam perjanjian atas suatu barang (uang) yang dipinjam, ketika barang (uang) tersebut dikembalikan.

**Gambar 5.3**



*Sumber: republika.co.id*



4) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat, (istilah untuk bank syariah adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah – BPRS) adalah bank yang menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya dan memberikan pinjaman/ pembiayaan pada masyarakat.

a) Usaha

- (1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
- (2) Memberikan kredit/pembiayaan.
- (3) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
- (4) Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

b) Larangan

BPR dilarang karena sebagai berikut:

- (1) Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
- (2) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
- (3) Melakukan penyertaan modal.
- (4) Melakukan usaha perasuransian.
- (5) Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha yang telah ditentukan.

- c) Izin usaha  
Izin BPR ini dikeluarkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.
- d) Sasaran  
Sasaran layanan BPR adalah kebutuhan petani, peternak, nelayan, pedagang, pengusaha kecil, pegawai dan pensiunan.
- e) Fungsi  
Selain sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, BPR juga membantu petani dari lintah darat.

Khusus bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, prinsip operasionalisasi dalam prespektif kesyariahnya, sama dengan Bank Umum Syariah.

**b. Pembagian bank menurut badan hukum**

Menurut badan hukum, bank dibedakan menjadi bank yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT), Firma, Koperasi dan perusahaan perorangan.

**c. Pembagian bank menurut kepemilikan**

Berdasarkan faktor kepemilikan, bank dibedakan atas bank pemerintah, bank swasta, bank campuran, bank milik pemerintah daerah dan bank syariah.

- 1) Bank pemerintah adalah bank yang modalnya berasal dari pemerintah dan bertugas meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contoh: BTN.
- 2) Bank swasta adalah bank yang pemilik modalnya dimiliki oleh pihak swasta. Umumnya bank tersebut bertujuan mencari laba. Contoh: Bank Mega, Bank Niaga, dan Bank NISP.

#### d. Produk perbankan

##### 1) Kredit pasif

Kredit pasif yaitu cara-cara bank menghimpun dana dari masyarakat.

- a) Giro adalah simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya hanya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek bilyet giro.
- b) Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu.
- c) Deposito *on call* adalah simpanan yang tetap berada di bank selama depositan tidak membutuhkannya. Jika ingin mengambil simpanan, depositan lebih dahulu memberitahukan kepada bank.
- d) Deposito *automatic roll over* adalah deposit yang jatuh tempo tetapi belum ditarik oleh depositan dan bunganya langsung diperhitungkan secara otomatis.

##### 2) Kredit aktif

Kredit aktif yaitu cara bank menyalurkan dana ke masyarakat. Kredit Rekening Koran (RIK) adalah bank memberi jaminan kepada nasabah yang dapat diambil sebagian sesuai kebutuhan. Kredit *reimburse (letter of credit L/C)* adalah pinjaman kepada nasabah yang dapat diberikan kepada nasabah dengan mengeluarkan wesel. Wesel tersebut dapat diperdagangkan setelah diakseptasi. Kredit dokumenter adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah setelah nasabah menyerahkan dokumen pengiriman barang yang telah disetujui oleh kapten kapal. Kredit dengan jaminan surat-surat berharga, yaitu pinjaman yang diberikan kepada nasabah untuk membeli surat-surat berharga dan sekaligus surat-surat berharga tersebut sebagai jaminannya. Dalam masalah ini, ada beberapa perbedaan prinsip antara produk aktif pada bank konvensional dengan bank syariah.

## B. Pengertian Bank Syariah

“Bank Syariah” adalah istilah yang dipakai di Indonesia untuk menyatakan suatu jenis bank yang dalam pelaksanaannya berdasarkan pada prinsip syariah. Namun, istilah yang digunakan secara luas di negara lain untuk menyebutkan bank dengan prinsip syariah adalah “Bank Islam” (*Islamic Bank*). Di samping itu, ada juga istilah lain untuk menyebut bank Islam di antaranya *interest free bank*, *la riba bank*, dan *shari’a bank*.

Bank Syariah adalah bagian dari sistem Perbankan Syariah, selain dari Unit Usaha Syariah (UUS) yang ada pada bank konvensional. Sedangkan Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dalam Undang-undang tentang perbankan Indonesia, seperti Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, telah membedakan bank berdasarkan kegiatan usahanya menjadi dua; yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Prinsip Syariah, adalah kegiatan perbankan dengan prinsip Hukum Islam yang difatwakan berdasarkan Alquran, Sunnah dan Kaedah Hukum Islam, oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang perbankan syariah. Lembaga yang dimaksud, kalau di Indonesia, adalah Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Di samping berdasarkan Fatwa DSN tersebut, juga diperkuat dalam bentuk hokum positif, yakni UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan peraturan perundangan lain, seperti Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

## C. Fungsi Bank Syariah

Secara umum, fungsi bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional, yakni sebagai lembaga *intermediary* yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan.

Ciri khusus dari bank syariah adalah bahwa sumber utama ketentuannya berasal dari hukum Islam. Dari segi sumber perolehan keuntungan, bagi bank syariah bukan berasal dari bunga yang dibebankan kepada nasabah, melainkan dari apa yang disebut sebagai imbalan, baik berupa jasa (*fee-base income*) maupun *mark-up* atau *profit margin*, serta bagi hasil (*loss and profit sharing*). Karakteristik khusus lainnya dari bank syariah selain dilibatkannya hukum Islam dan pembebasan transaksi berdasarkan bunga (*interest free*), adalah diperbolehkannya melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang bersifat *multi-finance* dan perdagangan (*trading*). Hal ini berkenaan dengan sifat dasar transaksi bank syariah yang merupakan investasi dan jual-beli serta sangat beragamnya pelaksanaan pembiayaan yang dapat dilakukan.

#### D. Perbedaan Bank Konvensional Dengan Bank Syariah

Dalam Undang-undang ini dijelaskan Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sementara fungsi utama perbankan di Indonesia sebagai penghimpun dana dari pihak yang surplus dan menyalurkan dana kepada pihak yang defisit, dikenal juga dengan fungsi perantara (*intermediary*), juga berlaku pada bank syariah. Hal ini terlihat dari produk-produk yang ada pada perbankan syariah, yang terdiri dari produk penghimpunan dana dan produk penyaluran dana.

Dalam materi mengenai perbankan ini akan dijelaskan perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah (Syafe'i Antonio, dalam Syukri Iska : 2012), seperti yang dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 5.1**  
**Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional**

<b>Bank Syariah</b>		<b>Bank Konvensional</b>	
1.	Melakukan investasi yang halal saja.	1.	Investasi yang halal dan yang haram

2.	Berdasarkan prinsip bagi hasil untung/ rugi, jual beli, dan sewa.	2.	Memakai perangkat bunga
3.	Profit dan falah oriented	3.	Profit oriented (tujuan untung semata)
4.	Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai fatwa Dewan Pengawas Syariah	4.	Tidak terdapat Dewan sejenis.

Bank Islam, begitu juga bank konvensional, menurut Kamal Khir, Lokesh Gupta dan Bala Shanmugam (dalam Syukri Iska : 2012), merupakan lembaga keuangan pencari laba, namun dilarang berusaha dengan riba dan terlibat dengan perdagangan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Perbedaan antara kedua bank tersebut dapat dilihat dari pandangan lain :

**Tabel 5.2**  
**Perbedaan Sistem Bank Syari'ah dengan Sistem Bank Konvensional**

<b>Sistem Bank Syari'ah</b>		<b>Sistem Bank Konvensional</b>	
1.	Fungsi dan operasinya berdasar-kan kepada hukum syariah. Bank harus menjamin bahwa semua aktivitas perdagangan memenuhi persyaratan syariah	1.	Fungsi dan cara operasinya berdasarkan kepada prinsip-prinsip sekuler dan bukan hukum atau ketentuan agama.
2.	Pembiayaan bukan berorientasi kepada bunga, dan didasarkan pada prinsip jual beli barang dengan harga jual meliputi margin yang ditetapkan di awal	2.	Pembiayaan berorientasikan bunga dan bunga tersebut tetap atau berkembang, yang diperhitungkan berdasarkan pemanfaatan uang.
3.	Deposit tidak berorientasikan bunga melainkan kepada bagi hasil, di mana para pemilik modal berserikat berdasarkan persentase laba. Bank hanya mendapatkan kembali bagian labaa dari usaha yang dikelolanya dan jika terjadi kerugian, si pemilik modal tidak akan kehilangan uangnya, tetapi tidak akan mendapat keuntungan dari aktivitas yang dibiayai sepanjang masa kerugian tersebut.	3.	Demodal dijamin deposit berorientasi kepada bunga, dan si pemilik modal dijamin dengan bunga yang ditetapkan di awal dengan jaminan pengembalian modal pokok.
4.	Bank menawarkan keadilan dalam pembiayaan untuk sebuah usaha. Kerugian ditanggung bersama berdasarkan prinsip keadilan sedangkan laba dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya.	4.	Tidak biasa ditawarkan, melainkan telah tersedia melalui kehendak perusahaan-perusahaan pemegang modal dan bank-bank pembiayaan.

5.	Bank syariah dilarang terlibat dalam aktivitas ekonomi yang tidak memenuhi tuntunan syariah. Misalnya; bank tidak boleh member usaha yang berkaitan dengan babi, alkohol, dan lain-lain.	5.	Tidak ada ketentuan larangan seperti itu.
6.	Dalam system perbankan Islam modern, salah satu fungsinya ialah untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.	6.	Tidak mengenal zakat.
7.	Tidak ada ketentuan membebaskan biaya tambahan karena kegagalan memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian atau penangguhan pembayaran, Catatan: Sebagian Negara Islam membolehkan pemungutan denda dan ketentuan untuk biaya yang ditimbulkan akibat pemungutan denda tersebut, yang biasanya 1%.	7.	Biasanya membebaskan biaya tambahan (bunga berganda), jika ada penangguhan pembayaran.
8.	Transaksi-transaksi dengan unsure gharar (tidak jelas) dan spekulasi sangat dilarang. Seperti perdagangan semu dilarang karena spekulatif.	8.	Perdagangan dan transaksi spekulasi dibolehkan.
9.	Status bank, hubungannya dengan penabung, adalah hubungan kemitraan ibarat pemodal dan pengusaha.	9.	Status hubungan antara bank dan penabung ialah debitur dan kreditur.
10.	Setiap bank harus mempunyai Dewan Pengawas Syariah untuk menjamin bahwa semua aktivitas usaha sesuai dengan tuntunan syariah.	10.	Tidak mengenal lembaga seperti itu.
11.	Bank tetap harus memenuhi persyaratan yang diatur oleh perundangan bank pemerintah, di samping tuntunan-tuntunan syariah	11.	Harus memenuhi persyaratan peraturan dan perundang-undangan Negara saja.

## E. Sejarah Perkembangan Bank Syariah

Dalam abad XIX dan XX Masehi, di dunia Islam muncul suatu gerakan yang dikenal sebagai *Islamic Revivalism* (gerakan kebangkitan Islam). Gerakan *Islamic Revivalism* dengan keras menentang sistem pelaksanaan bank berdasarkan bunga yang dibawa oleh bank konvensional ke negara-negara dengan mayoritas muslim. Gerakan *Islamic Revivalism* ini berpengaruh

terhadap munculnya beberapa gerakan berikutnya, yaitu gerakan modern (*modernism*) dan gerakan *Neo-Revivalis* (*neo-revivalism*). Sorotan gerakan *neo-revivalis* terhadap sistem perbankan konvensional pada masa itu salah satunya ditunjukkan dalam surat Hasan al-Banna, pendiri *Ikhwanul Muslimin*, kepada para pemimpin Negara-negara Arab dan negara-negara Islam untuk melakukan perubahan dan terhadap sistem perbankan dengan membentuk sistem perbankan dengan berdasarkan pada ajaran Islam. Dalam suratnya tersebut dia menyatakan : “hendaklah pemerintah memberikan tauladan yang baik dalam menjalankan kekuasaannya untuk melepaskan semua aspek bunga melalui pekerjaan yang nyata, khususnya mengenai pinjaman yang diberikan bank, pinjaman industri, dan lain-lain”.

Konsep teoritis yang membahas mengenai bank Islam muncul pertama kali pada tahun 1940-an dengan gagasan mengenai perbankan yang berdasarkan prinsip bagi hasil (*profit-loss sharing*). Tokoh yang dikenal sebagai seorang perintis teori perbankan Islam adalah Maududi Uzair dengan karyanya yang berjudul *A Ground Work for Interest Free Bank*, yang merupakan ringkasan garis besar mengenai sistem bank tanpa bunga. Pemikiran ini juga dimunculkan oleh beberapa penulis lain, di antaranya Anwar Qureshi, Naiem Siddiqi, dan Mahmud Ahmad, serta uraian yang lebih rinci mengenai perbankan Islam ditulis oleh Abul A'la al-Maududi dan Muhammad Hamidullah.

Pelaksanaan konkrit dari teori tentang perbankan Islam baru dimulai oleh Ahmad el-Najjar dengan membentuk *Myt-Ghamr Bank* pada tahun 1963 di kota Myt, Mesir. Eksperimen lembaga perbankan Islam ini berlangsung hingga tahun 1967 dan diikuti oleh 9 bank lainnya dengan konsep serupa di Mesir. Sesuai dengan prinsip perbankan Islam, Myt Ghamr Bank ataupun bank-bank lain tersebut tidak memungut ataupun menerima bunga, dan sebagian besar usahanya melalui investasi pada usaha-usaha perdagangan dan industri secara langsung dalam bentuk *partnership* dan membagi keuntungan dengan para penabung. Myt Ghamr Bank juga dianggap berhasil memadukan manajemen perbankan Jerman dengan prinsip muamalah Islam



dengan menerjemahkannya dalam produk-produk bank yang sesuai dengan daerah pedesaan yang orientasinya adalah industri pertanian. Kendati hasil pencapaiannya luar biasa dari bank Islam tersebut, Myt Ghamr Bank ditutup pada tahun 1967 karena alasan politis dan kegiatannya diambil alih oleh *National Bank of Egypt* dan *Central Bank of Egypt*.

Gagasan berdirinya bank syariah di tingkat internasional secara kolektif muncul dalam Konferensi Negara-negara Islam sedunia di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 1969, yang diikuti 18 negara peserta. Konferensi tersebut menghasilkan:

1. Tiap keuntungan haruslah tunduk pada hukum untung dan rugi, jika tidak ia termasuk riba dan riba itu sedikit banyak haram hukumnya.
2. Diusulkan untuk dibentuk suatu bank syariah yang bersih dari sistem riba dalam waktu secepat mungkin.
3. Sementara waktu menunggu berdirinya bank syariah, bank-bank yang menerapkan bunga diperbolehkan beroperasi, namun jika benar-benar dalam keadaan darurat.

Perkembangan berikutnya adalah dengan didirikannya *Islamic Development Bank* (IDB), yang berdiri atas prakarsa sidang Menteri Luar Negeri Negara-negara anggota OKI (Organisasi Konferensi Islam) di Pakistan (1970), Libya (1973), dan Jeddah (1975). Usulan dari sidang tersebut adalah penghapusan sistem keuangan berdasarkan bunga dan menggantinya dengan sistem bagi hasil. Pendirian IDB pada tahun 1974 diikuti dengan pendirian lembaga-lembaga keuangan Islam di berbagai Negara, termasuk negara-negara bukan anggota OKI, seperti Filipina, Inggris, Australia, Amerika Serikat, dan Rusia. Walaupun fungsi utama IDB adalah sebagai bank antar pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan dana bagi pembangunan proyek negara-negara anggotanya, namun dia juga menyediakan jasa *financial* berbasis *fee and profit sharing* untuk negara-negara tersebut berdasarkan pada prinsip syariah.

Berdirinya IDB telah memotivasi Negara Islam untuk mendirikan bank syariah. Bahkan IDB juga telah membantu mendirikan bank syariah di berbagai negara. Untuk pengembangan sistem ekonomi syariah, IDB membangun sebuah institusi riset dan pelatihan untuk pengembangan penelitian dan pelatihan ekonomi Islam baik dalam bidang perbankan maupun system keuangan secara umum. Lembaga tersebut bernama IRTI (*Islamic Research and Training Institute*).

Bank Islam pertama yang bersifat swasta didirikan tahun 1975 oleh kelompok usahawan muslim dari berbagai Negara dengan nama *Dubai Islamic Bank*, dan pada tahun 1977 didirikan *Faysal Islamic Bank* di Mesir dan Sudan.

## **F. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia**

Sebagai langkah awal perkembangan bank syariah di Indonesia, pada pertengahan tahun 1970-an diadakan pembicaraan mengenai bank syariah pada seminar Hubungan Indonesia - Timur Tengah yang diadakan pada tahun 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar yang diadakan Lembaga Studi Ilmu-ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika. Perkembangan pemikiran secara luas mengenai perlunya umat Islam Indonesia memiliki perbankan Islam sendiri mulai berhembus sejak saat itu. Namun, usaha untuk merealisasikan ide perbankan syariah tersebut terhambat oleh beberapa alasan, yaitu:

1. Operasi Bank Syariah yang berdasarkan prinsip bagi hasil belum diatur, sehingga tidak sejalan dengan Undang-undang Pokok Perbankan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967.
2. Konsep bank syariah dari segi politis dinilai bermuatan ideologis, dan dipandang sebagai bagian atau berkaitan dengan pembentukan negara Islam. Oleh karena itu tidak dikehendaki pemerintah.
3. Belum ada yang bersedia menaruh modal pada ventura semacam itu, sementara pendirian bank baru dari negara Timur Tengah masih

dicegah, antara lain oleh kebijakan pembatasan bank asing untuk membuka cabangnya di Indonesia.

Pada awal periode 1980-an, diskusi-diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan oleh berbagai pihak dalam pengkajiannya, seperti Karnaen A. Perwaatmadja, M. Dawam Rahardjo, A.M Saefudin, M. Amien Azis, dan lain-lain. Uji coba pada skala yang relatif terbatas telah diwujudkan pada masa itu yaitu dengan pembentukan Baitut Tamwil-Salman di Bandung dan Koperasi Ridho Gusti di Jakarta, yang kedua lembaga keuangan syariah tersebut berbadan hukum koperasi.

Pembentukan ini juga didorong oleh keluarnya Deregulasi Perbankan Paket 1 Juni tahun 1983, yang telah membuka belenggu penetapan bunga perbankan oleh Pemerintah. Dengan dibebaskannya penetapan besar bunga kepada masing-masing bank, maka bank dapat menetapkan bunga sebesar 0% (nol persen) yang memungkinkan beroperasinya bank tanpa bunga yang berdasarkan bagi hasil keuntungan. Namun, karena belum dimungkinkannya pendirian bank baru pada masa itu, sedangkan bank-bank yang telah ada belum tertarik untuk mengaplikasikan sistem bank tanpa bunga yang dinilai kurang menguntungkan, maka bank syariah belum dapat berdiri di Indonesia, sehingga dibentuklah badan hukum koperasi sebagai bentuk badan hukumnya.

Pada tahun 1988, gagasan mengenai bank syariah kembali muncul yang dilatarbelakangi dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Oktober (PAKTO) yang berisi liberalisasi perbankan. Liberalisasi perbankan tersebut memungkinkan didirikannya bank-bank baru selain yang telah ada. Untuk itu didirikanlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah di beberapa daerah di Indonesia, yaitu Badan Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Amal Sejahtera, BPRS Dana Mardhatillah, dan BPRS Amanah Rabaniah, yang beroperasi di Bandung, dan BPRS Hareukat di Aceh.

Sebelumnya, pada 18-20 Agustus 1990 diadakan lokakarya Bunga Bank dan Perbankan yang diadakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam dalam

Musyawarah Nasional IV MUI pada 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan Amanat Munas IV MUI tersebut dibentuklah kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia, yang disebut Tim Perbankan MUI.

Tim ini bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait. Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut lahirlah Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada 1 November 1991. Pada saat penandatanganan Akte pendirian P.T. Bank Muamalat Indonesia terkumpul komitmen pembelian saham sebesar Rp 84 miliar. Kemudian pada tanggal 3 November 1991 dalam acara silaturahmi dengan Presiden di Istana Bogor dapat dipenuhi dengan total komitmen awal sebesar Rp. 106.126.382.000,00, yang dengan modal awal tersebut, dan setelah itu Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi.

Dalam menjalankan operasinya sebagai bank yang berdasarkan prinsip syariah, BMI mengalami banyak hambatan. Selain karena peraturan hukum tentang bank syariah belum spesifik mengatur dan memberi ruang dalam pengembangan perbankan syariah, juga ketidak-mampuan BMI untuk bersaing dengan bank konvensional yang telah memiliki jaringan yang kuat hingga ke pelosok-pelosok daerah. Selain itu, untuk menjaga likuiditas bank dan mempertahankan eksistensinya, yaitu melalui usaha-usaha mendapatkan keuntungan yang sewajarnya melalui bagi hasil, maka BMI tidak bisa mengelak untuk tidak menggarap kalangan menengah ke atas sebagai nasabah dan debitur yang paling potensial. Hal ini yang kemudian menyebabkan banyak umat Islam masih belum merasakan kehadiran BMI memberikan sentuhan yang berarti pada mereka sebagai bank yang mengusung nilai-nilai Islam.

Era reformasi kemudian juga memberikan perkembangan baru dalam perbankan syariah di Indonesia. Para pelaku perbankan dan pemerintah telah mendapatkan paradigma baru dalam memandang perbankan Islam di Indonesia. Krisis moneter yang dialami sebelumnya ternyata memberikan implikasi positif dalam sejarah perkembangan bank syariah di Indonesia.

Bentuk perkembangan paling besar pada bank syariah pada masa itu ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang merupakan regulasi mengenai perbankan untuk bangkit dari krisis ekonomi yang melanda pada waktu itu.

Dalam Undang-undang tersebut tertuang arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka unit usaha syariah atau mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah. Hal tersebut disambut antusias oleh kalangan perbankan konvensional yang ingin mulai memasuki usaha bisnis perbankan syariah. Untuk itu Bank Indonesia mengadakan “Pelatihan Perbankan Syariah” bagi para pejabat Bank Indonesia dari segenap bagian, terutama aparat yang berkaitan langsung dengan DPNP (Direktorat Penelitian dan Pengembangan Perbankan), kredit, pengawasan, akuntansi, riset dan moneter. Beberapa lembaga perbankan konvensional yang membuka unit usaha syariah pada masa-masa awal reformasi adalah Bank IFI cabang syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI Divisi Syariah. Keberadaan bank syariah akhirnya semakin kokoh dengan keluarnya Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Pada masa ini, ada beberapa permasalahan yang belum terselesaikan dari sistem hukum maupun dari sistem ekonomi mengenai perbankan syariah. Hal ini sebagaimana digambarkan Umar Chappra dan ditindaklanjuti oleh Muhammad Syafi'i Antonio dalam kajian Tazkia Institute. Persoalan-persoalan itu adalah sebagai berikut:

- a. Pada umumnya produk produk perbankan syariah, belum memiliki standar peraturan yang baku dan seragam. Ketika MUI/ DSN bersama Bank Indonesia tengah mempersiapkan pembakuan Akad *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*, tetapi untuk akad-akad lainnya belum disiapkan.
- b. Perbankan syariah dalam perkembangannya cukup pesat, tetapi memiliki asset dan akses pasar yang masih kecil. Baru mencapai

- lebih dari satu persen dari total asset perbankan nasional sehingga mempengaruhi kemampuannya untuk melakukan ekspansi dan diverifikasi usaha.
- c. Dalam kondisi demikian, tentunya tingkat persaingan dengan sistem ekonomi konvensional belum berimbang karena terbatasnya jaringan kantor dan lembaga penunjang lainnya. Juga belum memadai untuk keperluan likuiditas dan pengelolaan risiko.
  - d. Belum ada keseragaman dalam praktek akuntansi dan sistem audit perbankan syariah, termasuk didalamnya keseragaman laporan keuangan sehingga otoritas pengatur maupun investor mengalami kesulitan untuk melakukan perbandingan dalam menilai kinerja perbankan syariah.
  - e. Pada umumnya produk produk perbankan syariah, belum memiliki standar peraturan yang baku dan seragam. Ketika MUI/ DSN bersama Bank Indonesia tengah mempersiapkan pembakuan Akad *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*, tetapi untuk akad-akad lainnya belum disiapkan.
  - f. Perlakuan oleh pihak perbankan syariah disatu sisi dengan nasabah pada sisi lainnya belum berlangsung sesuai prinsip kesetaraan. Masih seperti yang diperaktikkan dalam perbankan konvensional, dimana posisi pihak perbankan masih jauh lebih kuat dibanding nasabahnya. Idealnya, perbankan syariah memperlakukan nasabah sebagai mitranya yang sejajar sehingga tidak terkesan sebagai hubungan kemitraan yang berdasarkan hubungan keyakinan semata, melainkan juga harus rasional dan objektif.

## **G. Prinsip Bank Syariah**

Dalam menjalankan usaha komersialnya, bank syariah paling tidak menjalankan 3 prinsip dalam operasionalnya yaitu:

### 1. **Prinsip Bagi Hasil**

Ini adalah prinsip yang meliputi tata kerja pembagian hasil usaha antara pemodal dan pengelola dana, bisa antara bank dengan nasabah atau antara nasabah dengan bank.

### 2. **Prinsip Jual Beli dengan Margin Keuntungan**

Merupakan suatu prinsip yang menerapkan tata cara jual beli dengan mengambil keuntungan dari harga jual beli antara nasabah dengan bank.

### 3. **Prinsip Fee (jasa)**

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non pembiayaan yang diberikan oleh bank pada nasabah. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini di antaranya: titipan, jasa transfer, jual beli valuta asing.

## **H. Ciri-ciri Bank Syariah**

Bank Syariah dalam mekanisme operasionalnya sangat jauh berbeda dengan bank konvensional, karena bank syariah punya ciri atau karakteristik tersendiri antara lain:

### 1. **Berdimensi keadilan dan pemerataan**

Dengan adanya sistem bagi hasil secara otomatis tidak muncul kerugian yang hanya ditanggung oleh satu pihak, karena resiko kerugian dan keuntungan ditanggung bersama.

### 2. **Bersifat mandiri**

Karena prinsip operasional bank syariah tidak menggunakan bunga, maka secara otomatis akan terlepas dari gejolak moneter, baik dalam negeri maupun internasional.

### 3. **Persaingan secara sehat**

Bentuk persaingan yang terjadi diantara bank syariah adalah berlomba-lomba untuk lebih tinggi dari yang lain dalam memberikan forsi bagi hasil kepada nasabah.

#### 4. Adanya Dewan Pengawas Syariah

Yang dimaksud dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bersifat independen, yang dibentuk dan ditempatkan pada bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan syariah yang bertugas melakukan pengawasan terhadap operasionalisasi bank terkait, khususnya tentang kesyariahnya.

### I. Produk-Produk Bank Syariah

#### 1. Produk Penghimpun Dana

- a. Tabungan dan Giro *Wadi'ah*: merupakan produk perbankan berupa penitipan dana nasabah di bank. Prinsip *wadi'ah* yang digunakan dalam produk ini adalah *wadi'ah yad dhamanah*, yang berarti bank dapat memanfaatkan dan menyalurkan dana yang disimpan serta menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh pemilik dana.
- b. Deposito *Mudharabah*: dana simpanan nasabah yang hanya bisa ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan.
- c. Tabungan *Mudharabah*: dana simpanan nasabah yang akan dikelola bank untuk memperoleh keuntungan dengan sistem bagi hasil dengan kesepakatan bersama.
- d. Tabungan haji *Mudharabah*: simpanan nasabah yang penarikannya dilakukan pada saat nasabah akan menunaikan ibadah haji atau pada kondisi tertentu sesuai dengan perjanjian.
- e. Tabungan kurban: simpanan nasabah yang penarikannya dilakukan pada saat nasabah akan melaksanakan ibadah kurban.

#### 2. Produk Penyaluran Dana

- a. Pembiayaan *Mudharabah*: pihak bank menyediakan pembiayaan modal investasi atau modal kerja secara penuh, sedangkan nasabah menyediakan proyek atau usaha lengkap dengan manajemennya.



- b. Pembiayaan *Musyarakah*: pembiayaan sebagiandari modal usaha, yang mana pihak bank dapat dilibatkan dalam proses manajemen.
- c. Pembiayaan *Murabahah*: pihak bank melakukan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah.
- d. Pembiayaan *al-Bai' bi al-Tsaman al-Ajil*: pembiayaan untuk pembelian barang secara cicilan.
- e. Pebiayaian *al-Salam*: merupakan akad pesanan barang yang disebutkan sifatnya, yang dalam majelis itu pemesan barang menyerahkan uang seharga barang pesanan yang barang pesanan tersebut menjadi tanggungan penerima pesanan.
- f. Pembiayaan *Istisna'*: merupakan jenis khusus dari *bai' al-salam* tetapi jenis pembiayaan ini digunakan untuk bidang manufaktur.
- g. Pembiayaan *Ijarah Muntahiya bi al-Tamlik*: akad sewa menyewa suatu barang antara bank dengan nasabah, dimana nasabah diberikan kesempatan untuk memiliki objek sewa pada akhir akad, baik melalui akad jual beli ataupun hibah.
- h. *Hiwalah*: memindahkan hutang (*take over credit*) dari tanggungan orang yang berhutang menjadi tanggungan orang yang berkewajiban membayar hutang.
- i. *Rahn*: menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, atau yang disebut juga dengan Gadai.
- j. *Wakalah*: pelimpahan kekuasaan oleh seorang sebagai pihak pertama kepada oranglain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.
- k. *Sharf*: perjanjian jual beli (tukar menukar) valuta asing (mata uang asing)
- l. *Kafalah*: berarti bank memberikan garansi (jaminan) kepada nasabah.
- m. *Ijarah*: bank menyediakan barang yang dipersewakan kepada nasabah.
- n. *Al-Qardh al-Hasan* : pinjaman lunak bagi pengusaha kecil yang benar-benar kekurangan modal.

## **J. Lembaga Keuangan Syari'ah Non Bank**

Lembaga Keuangan Syari'ah non Bank, dibentuk akibat dari adanya kesadaran dan keinginan masyarakat terhadap aplikasi ajaran Islam dengan menggunakan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi tersebut dilaksanakan dalam praktek (penerapan ilmu ekonomi) sehari-hari bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat maupun pemerintah/penguasa. Hal itu diwujudkan dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan, tunduk dalam peraturan/ perundang-undangan Islam.

Untuk itu, diperlukan lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip Islam (syariah) sebagai landasan operasionalnya. Dengan demikian semua transaksi yang dilaksanakan tersebut tidak lepas dari aturan syariat dan tidak bertentangan dengannya.

## **K. Contoh Lembaga Keuangan Syariah Non Bank**

### **1. Asuransi Syariah**

Asuransi Syariah adalah asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syariat Islam dengan mengacu pada Alquran dan Sunnah. Asuransi ini disebut juga dengan *Takaful* yaitu usaha kerjasama saling melindungi dan menolong antara anggota masyarakat dalam menghadapi malapetaka dan bencana. Prinsip asuransi syariah adalah saling bertanggung-jawab dan saling kerjasama bantu membantu.

### **2. Reksadana Syariah**

Dalam Reksadana Syariah terkandung enam unsur: pemodal, modal yang disetor oleh masyarakat, manajer investasi sebagai pengelola, investasi yang dilakukan oleh manajer investasi, portofolio efek, sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

### **3. Pegadaian Syariah**

Pegadaian Syariah dalam hukum Islam dilakukan dengan sukarela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan semata, dimana hak gadai dapat berlaku bagi seluruh benda, baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dalam gadai Syariah tidak ada istilah bunga.

### **4. Pasar Modal**

Pasar Modal pada perkembangannya juga menaungi transaksi-transaksi yang berkaitan dengan instrumen-instrumen Syariah seperti; sukuk, dan lembaran saham lainnya yang sesuai dengan prinsip Syariah.

### **5. Koperasi Syariah**

Koperasi yang lebih mengedepankan kepentingan anggota. Lembaga ini hadir untuk membantu anggota dalam mengatasi kesulitan, dan jauh dari praktek-praktek yang diharamkan Islam.

### **6. *Baitul Maal wat Tamwil (BMT)***

Lembaga keuangan mikro yang bergerak dalam bentuk penghimpunan dan penyaluran dana juga, dengan kegiatan dalam rangka mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil.

## **L. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai tugas, fungsi dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011. Pimpinan tertinggi OJK adalah Dewan Komisiner yang bersifat kolektif dan kolegial, yang bertugas memimpin pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan dan bertanggung jawab kepada eksekutif. (UU No.21 tahun 2011).

**Gambar 5.4**  
**Otoritas Jasa Keuangan**



*Sumber: infobanknews.com*

### **1. Tujuan**

Ada beberapa tujuan dibentuknya Otorita Jasa Keuangan. Tujuan-tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Agar keseluruhn kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara dengan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel,
- b. Agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan
- c. Keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

### **2. Fungsi**

Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.

### **3. Tugas**

Otoritas Jasa Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan,

- b. Mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan
- c. Mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

#### **4. Wewenang**

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan, OJK mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi hal-hal berikut :
  - 1) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank.
  - 2) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.
- b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank, yang meliputi hal-hal berikut :
  - 1) Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank,
  - 2) Laporan bank terkait dengan kesehatan dan kinerja bank,
  - 3) Sistem informasi debitor,
  - 4) Pengujian kredit (*credit testing*), dan
  - 5) Standar akuntansi bank.
- c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, yang meliputi hal-hal berikut :
  - 1) Manajemen resiko,
  - 2) Tata kelola bank,

- 3) Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang,
- 4) Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan, dan
- 5) Pemeriksaan bank.

Untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan,
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif,
- c. Melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan,
- d. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu,
- e. Melakukan penunjukan pengelola statuter,
- f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter,
- g. Menetapkan sanksi administrasi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, dan
- h. Memberikan dan/atau mencabut :
  - 1) Izin usaha,
  - 2) Izin orang perseorangan,
  - 3) Efektifnya pernyataan pendaftaran,
  - 4) Surat tanda terdaftar,
  - 5) Persetujuan melakukan kegiatan usaha,
  - 6) Pengesahan,
  - 7) Persetujuan atau penetapan pembubara, dan

- 8) Penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

## **5. Pelayanan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Konsumen dan Masyarakat**

Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, yang meliputi :

- a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya,
- b. Meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat, dan
- c. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pelaksanaan tugas OJK dilakukan oleh Dewan Komisiner yang bersifat kolektif dan kolegial yang beranggotakan sembilan orang. Dalam melaksanakan tugasnya, OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan. Dan OJK menginformasikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh OJK. OJK, Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) wajib membangun serta memelihara sarana pertukaran informasi secara terintegrasi.

## **M. Evaluasi**

**Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini :**

1. Jelaskan fungsi bank dalam perekonomian !
2. Apa yang dimaksud dengan bank syariah ?
3. Sebutkanlah produk-produk bank syariah !
4. Jelaskanlah lembaga-lembaga keuangan selain bank!
5. Jelaskanlah fungsi dan tugas OJK !





# BAB VI

## SISTEM DAN ALAT PEMBAYARAN

### **Tujuan Pembelajaran**

Dengan mempelajari bab ini, siswa diharapkan dapat :

1. Menjelaskan sistem pembayaran
2. Menjelaskan sejarah, pengertian, fungsi, jenis, dan syarat uang
3. Menjelaskan pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia
4. Menyebutkan alat-alat pembayaran non tunai
5. Mendeskripsikan sistem pembayaran dan alat pembayaran dalam pandangan Islam

### **A. Sistem Pembayaran**

Sistem pembayaran adalah suatu cara yang disepakati untuk mentransfer suatu nilai (*value*) antara pembeli dan penjual dalam suatu transaksi (Alam S: 2013). Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia dikatakan bahwa sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, mekanisme, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan daya guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.

Untuk melakukan kegiatan di atas telah dilakukan dengan media yang sangat beragam; seperti mata uang, cek, sampai akhirnya menggunakan

elektronik untuk mentransfer nilai. Hal ini juga melibatkan berbagai lembaga, seperti bank sentral, bank umum, dan lembaga keuangan lainnya.

## **B. Uang dan Bank**

### **1. Uang**

Dalam ilmu ekonomi tradisional, uang didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar dapat berupa benda apa saja yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Sebelum uang diciptakan, masyarakat pada zaman dahulu melakukan perdagangan dengan cara barter. Barter merupakan pertukaran barang dengan barang.

### **2. Sejarah Uang**

**Gambar 6.1**  
**Uang**



*Sumber: fahrezisoftskillgu.blogspot.com*

Pada lingkungan masyarakat yang masih sederhana pemenuhan kebutuhan hidup dilakukan dengan jalan tukar-menukar barang yang diinginkan dengan barang lain yang disebut barter atau dikenal dengan istilah *innatura*. Pertukaran *innatura* ini bisa terjadi apabila terdapat dua

orang saling membutuhkan barang yang dipertukarkan dan memiliki kebutuhan yang harus bersifat timbal balik. Namun, sesuai dengan makin berkembangnya kebudayaan manusia, sistem barter ini mengalami kesulitan yaitu sebagai berikut :

- a. Kesulitan untuk menemukan orang yang mempunyai barang yang diinginkan dan juga mau menukarkan barang yang dimilikinya
- b. Kesulitan untuk memperoleh barang yang dapat dipertukarkan satu sama lainnya dengan nilai pertukaran yang seimbang atau hampir sama nilainya.
- c. Kesulitan karena barang yang akan dipertukarkan tidak bisa dibagi-bagi. Bahan yang memenuhi syarat-syarat uang adalah emas dan perak. Uang terbuat dari emas dan perak disebut dengan uang logam (*metallic money*). Uang logam emas dan perak juga disebut *full bodied money*, artinya nilai intrinsik (nilai bahan uang) sama dengan nilai nominalnya (nilai yang tercantum pada mata uang tersebut). Uang yang terbuat dari logam mulia seperti emas dan perak karena dijamin penuh dengan *body*-nya disebut juga uang standar. Pada saat itu, setiap orang menempa, melebur, menjual dan memakainya dan setiap orang mempunyai hak tidak terbatas dalam penyimpanan uang logam tersebut.

Uang adalah suatu benda yang diterima secara umum sebagai alat perantara untuk mempermudah tukar menukar dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Berdasarkan definisi tersebut, maka uang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Disenangi dan dapat diterima secara umum
- b. Tahan lama dan tidak mudah rusak
- c. Nilainya tetap dalam jangka waktu yang lama
- d. Mudah disimpan dan mudah dipindahkan atau di bawa kemana-mana tanpa kesulitan
- e. Mudah dibagi tanpa mengurangi nilai

- f. Memiliki satu kualitas saja
- g. Jumlahnya terbatas dan tidak mudah dipalsukan

### 3. Fungsi Uang

Secara umum yang memiliki fungsi sebagai perantara untuk pertukaran barang dengan barang, juga untuk menghindarkan perdagangan cara barter. Pada dasarnya fungsi uang mencakup tiga fungsi, yaitu sebagai berikut:

#### a. Alat tukar

- 1) Tahan lama
- 2) Diterima tanpa keraguan
- 3) Ringan dan mudah dibawa
- 4) Nominalnya harus dapat dipecah-pecah
- 5) Tidak mudah dipalsukan

#### b. Satuan hitung

Sebagai satuan hitung untuk mempermudah masyarakat untuk menghitung nilai satu barang dalam mata uang. Tanpa adanya fungsi satuan hitung, kita akan sulit membandingkan harga barang satu dengan yang lainnya. Dengan skala yang lebih luas, tanpa adanya uang sebagai satuan hitung, orang akan kesulitan membandingkan harga satu rumah dengan rumah yang lain, dan lain sebagainya.

#### c. Alat penimbun kekayaan

Uang juga merupakan penimbun kekayaan. Banyak orang yang menyimpan sebagian kekayaannya dalam bentuk uang yang disimpan di rumah atau di bank dalam bentuk tabungan atau deposito.

Sistem Ekonomi Islam, di samping memiliki persamaan dengan konsep ekonomi konvensional, juga mengandung perbedaan yang sangat prinsip, di antaranya adalah menyangkut masalah konsep uang dalam sistem ekonomi.

Uang merupakan inovasi besar dalam peradaban perekonomian dunia. Posisinya sangat strategis dalam sistem ekonomi, dan sulit digantikan oleh variabel lainnya. Sepanjang sejarah keberadaannya, uang memainkan peran penting dalam perjalanan kehidupan modern. Uang berhasil memudahkan dan mempersingkat waktu transaksi pertukaran barang dan jasa. Uang dalam sistem ekonomi memungkinkan perdagangan berjalan secara efisien.

Pada peradaban awalnya, manusia memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Mereka memperoleh makanan dari berburu dan memakan berbagai buah-buahan. Karena jenis kebutuhannya masih sederhana, mereka belum membutuhkan orang lain. Masing-masing individu memenuhi kebutuhan makannya secara mandiri. Dalam periode yang dikenal sebagai periode prabarter ini, manusia belum mengenal transaksi perdagangan atau kegiatan jual beli.

Pada perkembangannya semakin bertambahnya populasi manusia, dibutuhkan langkah ke depan untuk meningkatkan swasembada dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu, sistem pertukaran barang dan jasa sangat diperlukan guna memudahkan proses pemenuhan kebutuhan hidup tersebut.

Barter merupakan sistem transaksi yang pertama kali digunakan manusia. Namun dalam perjalanannya terdapat beberapa kendala yaitu:

1. Sulit menyamakan keinginan atas barang yang ditukarkan.
2. Sulitnya menentukan kadar nilai barang yang ditukarkan karena adanya perbedaan jenisnya.
3. Sulitnya menyimpan komoditas yang kita miliki sampai kita menemukan orang yang menginginkan atas komoditas tersebut.

Dengan adanya kesulitan tersebut, manusia terus melakukan pencarian untuk mendapatkan, media sebagai alat tukar yang dapat diterima oleh semua pihak. Di awal system transaksi klasik, manusia menggunakan hewan sebagai alat tukar. Akan tetapi, karena adanya kesulitan dalam menyimpan dan ketersediannya terbatas, maka sistem tersebut ditinggalkan.

Selanjutnya digunakan batu sebagai alat tersebut, tetapi karena terjadinya penumpukan batu sebagai alat tidak mempunyai nilai. Kemudian ditemukan bahan tambang sebagai alat tukar, di antaranya besi atau tembaga.

Namun seiring dengan perkembangan peradaban manusia, uang bukan saja dalam bentuk logam namun dalam bentuk kertas yang kini hampir digunakan di seluruh dunia dan fungsi uang pun mulai berkembang. Pada awalnya fungsi uang masih pada fungsi utamanya sebagai alat tukar. Namun dalam perkembangannya fungsi utama itu mulai bergeser, dalam ekonomi sistem kapitalis fungsi uang selain sebagai alat tukar, uang juga dijadikan sebagai komoditas sehingga uang diperjual belikan layaknya sebagai suatu komoditas. Dalam konsep keuangan modern yang diajarkan oleh kaum Kapitalis dan Sosialis, uang menjadi obyek perdagangan.

Dalam konsep keuangan modern, perdagangan uang merupakan instrumen penting dalam sistem perekonomian. Inilah yang menjadi perdebatan dalam sistem ekonomi Islam, bagaimana fungsi uang yang sesungguhnya.

### **C. Sistem Pembayaran Dalam Ekonomi Islam**

Konsep uang dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang, uang bukan *capital*. Sebaliknya, konsep uang yang dikemukakan dalam ekonomi konvensional tidak jelas. Sering kali istilah uang dalam perspektif ekonomi konvensional diartikan secara bolak balik (*interchangeability*), yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai *capital*. (Karim, 2006).

Perbedaan lain adalah bahwa dalam ekonomi Islam, uang adalah sesuatu yang bersifat *flow concept* dan *capital* adalah sesuatu yang bersifat *stock concept*.

Ahmad Hasan dalam Karim (2006), menjelaskan bahwa kata *nuqud* (uang) tidak terdapat dalam Alquran maupun Hadis Nabi saw, karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan dari kata *nuqud* untuk menunjukkan

harga. Mereka menggunakan kata *dinar* untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas, kata *dirham* untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak, kata *Ain* untuk menunjukkan dinar emas. Sedangkan kata *fulus* (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah.

Menurut Al-Ghazali dan Ibn Khaldun, definisi uang adalah apa yang digunakan manusia sebagai standar ukuran nilai harga, media transaksi pertukaran, dan media simpanan. (Karim ; 2006).

Sementara itu Hendi Anto (2003) menjelaskan, Uang secara umum adalah sesuatu yang dapat diterima sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang, atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Dengan kata lain, uang merupakan suatu alat yang dapat digunakan dalam wilayah tertentu.

Selain sebagai ukuran nilai barang, uang juga berfungsi sebagai media penukaran. Namun, uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri. Uang diciptakan untuk melancarkan pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar dari pertukaran tersebut. Ada beberapa definisi uang yang dikemukakan para ahli ekonomi, yang di antaranya terdapat perbedaan, karena berbeda cara pandang terhadap hakikat uang. Nazhim al-Syamry (Anto: 2003) berkata:

*“Setiap sesuatu yang dapat diterima oleh semua pihak dengan legalitas tradisi (‘Urf) atau undang-undang, atau nilai sesuatu itu sendiri, dan mampu berfungsi sebagai media dalam proses transaksi pertukaran yang beragam terhadap komoditi dan jasa, juga cocok untuk menyelesaikan utang piutang dan tanggungan, adalah termasuk dalam lingkup uang”.*

Menurut Sahir Hasan dalam Anto (2003), uang adalah pengganti materi terhadap segala aktifitas ekonomi, yaitu media atau alat yang memberikan kepada pemiliknya daya beli untuk memenuhi kebutuhannya, juga dari segi peraturan perundangan menjadi alat bagi pemiliknya untuk memenuhi segala kewajibannya.

Dalam pandangan al-Ghazali (Anto : 2003), uang adalah:

*“Nikmat Allah (barang) yang dipergunakan masyarakat sebagai mediasi atau alat untuk mendapatkan bermacam-macam kebutuhan hidupnya, yang secara substansial tidak memiliki nilai apa-apa, tetapi sangat dibutuhkan manusia dalam upaya pemenuhan bermacam-macam kebutuhan mereka (sebagai alat tukar).*

Inilah yang menjadi konsep dasar keuangan al-Ghazali. Dari pernyataan tersebut dapat diambil suatu definisi uang menurut al-Ghazali, yaitu:

1. Barang atau benda yang berfungsi sebagai sarana mendapatkan barang lain. Dengan kata lain uang adalah barang yang disepakati fungsinya sebagai media pertukaran (*medium of exchange*).
2. Benda tersebut dianggap tidak mempunyai nilai sebagai barang.
3. Nilai benda yang berfungsi sebagai uang ditentukan terkait dengan fungsinya sebagai alat tukar. Dengan kata lain yang lebih berperan dalam benda yang berfungsi sebagai uang adalah nilai tukar dan nilai nominalnya.

Karena itu al-Ghazali mengibaratkan uang sebagai “ cermin yang tidak mempunyai warna sendiri tapi mampu merefleksikan semua jenis warna.”

Dengan melihat kriteria tersebut di atas dapat dilihat bahwa dalam memberikan definisi uang, al-Ghazali tidak hanya menekankan pada aspek fungsi. Definisi yang demikian lebih komprehensif dibandingkan dengan batasan-batasan yang dikemukakan oleh kebanyakan ekonomi konvensional. Sebab kebanyakan dari mereka mendefinisikan uang sebatas pada fungsi-fungsi yang melekat padanya.

#### **D. Evaluasi**

**Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini:**

1. Jelaskanlah apa yang dimaksud dengan sistem pembayaran!
2. Sebutkan fungsi uang menurut konsep ekonomi Islam
3. Apakah pengertian uang menurut al Ghazali?



# BAB VII

## MANAJEMEN

### **Tujuan Pembelajaran**

Dengan mempelajari bab ini, siswa diharapkan dapat :

1. Menjelaskan pengertian manajemen
2. Mendeskripsikan tingkat-tingkat manajemen
3. Mendeskripsikan fungsi-fungsi manajemen
4. Mendeskripsikan prinsip-prinsip manajemen
5. Mengidentifikasi bidang-bidang manajemen
6. Menjelaskan tentang manajemen menurut konsep Islam
7. Menjelaskan tentang peran syariah dalam fungsi-fungsi manajemen

### **A. Pengertian Manajemen**

Dalam buku Alam S (2013) disajikan hal-hal yang terkait dengan konsep manajemen secara menyeluruh. Manajemen berasal dari kata *manage* (bahasa Inggris) yang berarti mengelola atau mengurus. Dalam mengartikan manajemen, para ahli memiliki pendapat yang berlainan, disebabkan perbedaan sudut pandang.

Ada empat sudut pandang dalam mengartikan manajemen:

### **1. Pengertian Manajemen Ditinjau dari Sudut Ilmu Pengetahuan**

Dari segi ilmu pengetahuan, pengertian manajemen sebagaimana dikemukakan oleh Luther Gulick. Menurut Gulick, manajemen adalah pengetahuan yang secara sistematis berusaha memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama dalam menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kemanusiaan.

### **2. Pengertian Manajemen Ditinjau dari Sudut Proses**

Dari segi proses, pengertian manajemen sebagaimana dikemukakan oleh George R Terry . Menurutnya, manajemen adalah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran tertentu, melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

### **3. Pengertian Manajemen Ditinjau dari Sudut Kegiatan Manusia**

Menurut Harold Koontz dan Cyril O' Donnel, manajemen adalah usaha mencapai tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain.

### **4. Pengertian Manajemen Ditinjau dari Sudut Seni**

Menurut Mary Parker Follet, manajemen adalah seni melakukan pekerjaan melalui orang lain. Dengan demikian, manajemen bisa diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dengan menggunakan seni dan ilmu pengetahuan.

**Gambar 7.1**  
**Kegiatan manajemen**



Sumber: [bantuanusaha.wordpress.com](http://bantuanusaha.wordpress.com)

## **B. Tingkat-tingkat Manajemen**

Dalam suatu badan usaha, umumnya terdapat tiga tingkat manajemen, yaitu:

### **1. Manajemen Puncak (*Top Management*)**

Manajemen puncak umumnya dipegang oleh Dewan Direksi, Direktur Utama, Presiden Perusahaan dan CEO (*Chief Executive Officer*). Manajemen puncak bertugas membuat kebijakan-kebijakan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup badan usaha dan perusahaan.

### **2. Manajemen Menengah (*Middle Management*)**

Manajemen menengah umumnya dipegang oleh Kepala Bagian, Kepala Divisi dan Kepala Seksi. Manajemen menengah bertugas menjalankan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh manajemen puncak, dan membuat rencana-rencana kerja sesuai bagiannya masing-masing. Manajemen menengah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada manajemen puncak.

### 3. Manajemen Pelaksana (*Supervisory Management*)

Manajemen ini umumnya dipegang oleh kepala mandor dan mandor. Manajemen pelaksana bertugas menjalankan segala rencana kerja yang dibuat manajemen menengah. Dalam menjalankan tugasnya, manajemen pelaksana bertanggung jawab kepada manajemen menengah.

### C. Fungsi Manajemen

Agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, manajemen harus dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Apabila fungsi-fungsi manajemen telah dijalankan dengan baik, maka segala kegiatan akan berjalan dengan lancar, teratur dan terarah sehingga tujuan yang telah ditetapkan bisa tercapai.

Para ahli memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai banyaknya fungsi manajemen. Adapun perbedaannya terletak pada pengejawantahan fungsi *actuating*. Berikut ini fungsi-fungsi manajemen yang dikemukakan oleh para ahli.

**Tabel 7.1**  
**Fungsi Manajemen menurut Para Ahli**

No	A h l i	Fungsi Manajemen
1.	Henry Fayol	a. Perencanaan b. Pengorganisasian c. Motivasi d. Pengoordinasian
2.	George Terry	b. Perencanaan c. Pengorganisasian d. Pelaksanaan
3.	Horald Koontz dan O'Donnel	c. Perencanaan d. Pengorganisasian e. Penempatan tenaga kerja f. Pengarahan g. Pengawasan
4.	Luther Gullick	a. Perencanaan b. Pengorganisasian c. Perencanaan karyawan d. Pengarahan e. Pengoordinasian f. Pelaporan g. Penganggaran

5.	Sondang Siagian	a. Perencanaan b. Pengorganisasian c. Pemberian motivasi d. Pengawasan e. Penilaian
6.	William Newman	a. Perencanaan b. Pengorganisasian c. Pengumpulan sumber daya d. Pengarahan

Sumber: Kinanti Gemiinastiti, 2014 :199.

Akan tetapi, dari pendapat-pendapat mereka ada kesamaan fungsi, yakni pada fungsi *planning*, *organizing*, dan *controlling*.

Berikut ini akan diuraikan empat fungsi utama manajemen yakni, *Planning*, *Organizing*, *Actuating*, dan *Controlling*.

### 1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan (*Planning*) adalah kegiatan penetapan tujuan yang ingin dicapai, serta penentuan tindakan-tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang termasuk penentuan tindakan-tindakan yang harus dilakukan adalah penentuan kebijakan, anggaran, pelaksanaan, serta bentuk organisasi yang tepat.

#### a. *What* (Apa)

Perencanaan harus mampu menjawab pertanyaan mengenai apa yang ingin dicapai.

#### b. *Why* (Kenapa)

Perencana harus mampu menjawab pertanyaan, mengapa hal itu yang harus dicapai? Apa alasannya?

#### c. *Where* (Di mana)

Perencanaan juga harus mampu menjawab mengenai di mana hal itu harus dilaksanakan. Hal ini berkaitan dengan letak badan usaha dan perusahaan. Dalam penentuan letak badan usaha dan perusahaan, yang

harus dipertimbangkan antara lain faktor letak bahan mentah, letak pasar, tersedianya angkutan (transportasi), dan lain-lain.

**d. *When* (Kapan)**

Dalam hal ini perencanaan harus dengan matang memutuskan kapan hal ini harus dilaksanakan. Dengan demikian, hal ini berkaitan dengan pembuatan jadwal kerja.

**e. *Who* (Siapa)**

Perencanaan harus memutuskan siapa saja yang akan mengerjakan hal-hal yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan pengetahuan, keahlian dan karakter masing-masing orang.

**f. *How* (Bagaimana)**

Perencanaan harus mampu menjawab pertanyaan tentang bagaimana cara mengerjakan hal-hal yang telah ditetapkan. Hal ini berkaitan dengan penentuan bentuk organisasi yang akan dipakai, penentuan proses produksi dan tata letak fasilitas produksi.

Dengan melakukan perencanaan (*planning*) ada banyak manfaat yang bisa diperoleh, di antaranya:

- a. Perencanaan dapat mengarahkan seluruh kegiatan menuju tujuan yang telah ditetapkan.
- b. Perencanaan memberikan kepastian dan kejelasan kepada setiap bagian atau orang dalam melaksanakan kegiatan.
- c. Perencanaan dapat dijadikan pedoman dalam pengawasan (*controlling*). Jika kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan perencanaan, maka manajemen harus segera melakukan koreksi.
- d. Perencanaan dapat memperkecil terjadinya kesalahan, karena umumnya kesalahan terjadi bila kegiatan dilakukan tanpa rencana.
- e. Perencanaan dapat menjamin proses pencapaian tujuan secara lebih efektif dan efisien.

**Gambar 7.2**  
**Kegiatan perencanaan**



Sumber: *ekonomibisnis.net*

## **2. Pengorganisasian (*Organizing*)**

Pengorganisasian (*organizing*) adalah pengelompokan orang yang disertai penetapan tugas, wewenang, fungsi dan tanggung jawab. Masing-masing didukung oleh alat-alat dan sarana yang dibutuhkan, agar tercipta satu kesatuan yang selaras dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pengorganisasian mutlak diperlukan karena pengorganisasian sangat penting untuk menciptakan keteraturan, menghindari tumpang tindih (*overlap*) tugas dan wewenang, serta dapat memudahkan proses pencapaian tujuan. Beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari pengorganisasian ini, antara lain:

- a. Setiap orang dalam organisasi mengetahui tugas dan wewenangnya masing-masing.
- b. Terciptanya pola hubungan dan kerja sama yang baik dan teratur.
- c. Menghindari terjadinya tumpang tindih (*overlap*) tugas dan wewenang.
- d. Menimbulkan spesialisasi dalam pembagian dan pelaksanaan tugas sehingga setiap orang mahir dalam melakukan tugasnya masing-masing.
- e. Mempermudah pimpinan dalam melakukan pengawasan sesuai bentuk organisasi yang dipilih.

Karena pengorganisasian berkaitan erat dengan bentuk organisasi, yang organisasi itu adalah sekelompok orang yang melakukan kerja sama berdasarkan sistem tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Berikut ini akan dibahas tentang organisasi dan bentuk-bentuk organisasi.

Organisasi terdiri atas beberapa bentuk, yaitu:

- a. *Organisasi garis*, yaitu organisasi yang memberikan wewenang kepada pimpinan untuk memberikan perintah langsung kepada bawahan. Hal ini bisa terjadi karena jumlah karyawan masih sedikit dan belum ada spesialisasi bidang pekerjaan. Organisasi garis disebut juga organisasi militer, karena pada mulanya bentuk organisasi ini dipakai oleh kalangan militer.
- b. *Organisasi fungsional*, yaitu organisasi yang disusun berdasarkan fungsifungsi yang harus dilaksanakan. Dalam organisasi fungsional, setiap pimpinan tidak memiliki bawahan yang jelas, karena setiap pimpinan (kepala bagian) memiliki wewenang untuk memberi perintah dan tugas kepada bawahan selama perintah dan tugas tersebut berhubungan dengan fungsi pimpinan sebagai kepala bagian yang bersangkutan.
- c. *Organisasi garis dan staf*, yaitu organisasi yang memberikan wewenang kepada pimpinan untuk memberikan perintah kepada bawahan, dalam menjalankan tugasnya, pimpinan dibantu oleh staf. Staf adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan dan keahlian tertentu yang dibutuhkan organisasi. Tugas staf adalah memberikan pendapat, saran, kritik dan nasihat kepada pimpinan dalam pengambilan suatu keputusan. Bentuk organisasi ini cocok digunakan pada organisasi yang memiliki jumlah personil yang banyak, bidang tugas yang bermacam-macam dan daerah kerja yang luas. Berikut ini bagan organisasi garis dan staf.



**Gambar 7.3**  
**Kegiatan pengorganisasian**



Sumber: rezaydrus.blogspot.com

### **3. Penggerakan (*Actuating*)**

Penggerakan (*actuating*) adalah kegiatan menggerakkan orang-orang agar bekerja sesuai tugas masing-masing untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pekerjaan menggerakkan orang-orang adalah sesuatu yang unik, menarik dan tidak mudah. Bahkan lebih mudah menggerakkan mesin daripada manusia. Mesin merupakan benda mati, sedang manusia memiliki akal, pikiran, dan perasaan. Untuk itu diperlukan keterampilan-keterampilan khusus agar mampu menggerakkan orang dengan baik. Untuk menggerakkan orang-orang dengan baik, menurut Henry Fayol, seorang manajer (pimpinan) harus memiliki tiga keterampilan, yaitu:

- a. *Keterampilan Konseptual*, yaitu keterampilan untuk mengoordinasikan dan mengintegrasikan semua kepentingan dan aktivitas organisasi.
- b. *Keterampilan Manusiawi*, yaitu keterampilan untuk bekerja sama, memahami, dan memotivasi orang lain.
- c. *Keterampilan Teknis*, yaitu keterampilan dalam menggunakan teknik, prosedur dan pengetahuan di bidang tertentu. Untuk menggerakkan orang-orang diperlukan sifat kepemimpinan (*leadership*).

Ada tiga sifat atau gaya kepemimpinan, yaitu:

- a. *Gaya Otoriter*, yakni gaya kepemimpinan yang tidak melibatkan bawahan dalam setiap pengambilan keputusan. Bawahan hanya sebagai pelaksana saja. Hubungan pimpinan dan bawahan seperti hubungan majikan dan buruh.
- b. *Gaya Demokratis*, yakni gaya kepemimpinan yang melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, pemimpin meminta pendapat, saran dan kritik dari bawahan.
- c. *Gaya Bebas*, yakni gaya kepemimpinan yang memberikan kebebasan kepada bawahan untuk mengambil keputusan. Pimpinan hanya memberikan pengarahan kepada bawahan dalam pengambilan keputusan.

**Gambar 7.4**  
**Kegiatan pergerakan**



Sumber: rickyanggihli.blogspot.com

#### **4. Pengawasan (*Controlling*)**

Pengawasan (*controlling*) adalah tindakan-tindakan untuk melihat, menilai, dan menjamin apakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan hasil yang diperoleh sudah sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan atau belum.

Agar dapat melakukan pengawasan dengan baik, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Membuat standar prestasi kerja untuk tiap bagian dan personil.
- b. Menilai prestasi kerja sesuai dengan standar yang telah dibuat.
- c. Melakukan tindak lanjut (*follow up*) berdasar hasil penilaian. Jika prestasi menunjukkan hasil buruk, maka perlu langkah perbaikan. Dan, bila prestasi menunjukkan hasil baik, maka harus dipertahankan dan ditingkatkan.

Pengawasan yang baik mengandung prinsip-prinsip berikut ini:

- a. Sesuai dengan bentuk organisasi.
- b. Fleksibel (tidak kaku).
- c. Dapat melaporkan penyimpangan dan kesalahan dengan segera.
- d. Dapat menjamin dilakukannya tindak lanjut (*follow up*).
- e. Mudah dimengerti.
- f. Ekonomis (hemat biaya).

**Gambar 7.5**  
**Kegiatan pengawasan**



Sumber: [satujam.com](http://satujam.com)

## D. Prinsip-prinsip Manajemen

Menurut Henry Fayol, pelopor manajemen modern, ada empat belas prinsip manajemen, yaitu:

- a. Pembagian kerja (*Division of Work*). Pembagian kerja dilakukan dalam rangka spesialisasi. Dengan spesialisasi, pekerjaan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien.
- b. Wewenang atau otoritas (*Authority*). Setiap manajer harus memiliki wewenang atau otoritas agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan lancar. Yang dimaksud dengan wewenang adalah hak menentukan suatu keputusan yang berkaitan dengan tanggung jawab.
- c. Disiplin (*Dicipline*). Setiap anggota harus disiplin dan patuh pada peraturan organisasi. Untuk menegakkan disiplin, pemimpin bias memberikan teguran pada pegawai yang bersalah (malas) dan member penghargaan pada pegawai yang sangat disiplin.
- d. Kesatuan perintah (*Unity of Comand*). Untuk menghindari konflik sebaiknya setiap pegawai hanya bertanggung jawab pada satu atasan, bukan kepada beberapa atasan.
- e. Kesatuan arah (*Unity of Direction*). Untuk menghindari ketidakjelasan pekerjaan-pekerjaan yang memiliki tujuan yang sama, sebaiknya direncanakan dan dikendalikan oleh seorang manajer, bukan oleh beberapa manajer.
- f. Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi (*Subordination of Individual Interest to the Common Good*). Siapa pun yang tergabung dalam organisasi wajib mengutamakan kepentingan bersama (organisasi) dibandingkan kepentingan individu.
- g. Pemberian upah (*Remuneration*). Pemberian upah harus sesuai dan adil bagi setiap pegawai.
- h. Pemusatan (*Centralization*). Pemusatan atau sentralisasi adalah pengambilan keputusan dengan lebih banyak menggunakan

pertimbangan atasan. Walaupun manajer memikul tanggung jawab terbesar, tapi manajer harus tetap memberi wewenang dan kesempatan pada bawahan untuk mengembangkan diri.

- i. Jenjang jabatan (*The Hierarchy*). Jenjang jabatan pada suatu organisasi dapat dilihat dari struktur (bagan organisasi). Struktur tersebut akan menunjukkan jenjang atau tingkatan jabatan dari bawah ke atas.
- j. Tata tertib (*Order*). Agar tercipta ketertiban maka tata tertib harus dijalankan. Dalam hal ini harus ada tempat untuk menampung semua hal dan semua orang. Selain itu, setiap hal dan setiap orang harus berada di tempat yang tepat.
- k. Kesamaan (*Equity*). Semua manajer harus bersikap adil (tidak membedakan) pada seluruh karyawan.
- l. Kestabilan staf (*Stability of Staff*). Manajemen harus mengusahakan agar staf tidak sering berganti-ganti (pindah kerja) sehingga mengganggu kinerja perusahaan.
- m. Inisiatif (*Initiative*). Pegawai atau bawahan perlu diberi kebebasan berinisiatif (membuat keputusan sendiri) dalam rangka mendukung kegiatan perusahaan, sepanjang tidak merugikan organisasi.
- n. Semangat korps (*Esprit de Corps*). Untuk mempersatukan anggota perlu digalakkan semangat kelompok. Dalam hal ini, komunikasi lisan dianggap lebih efektif dibandingkan komunikasi tertulis.

## **E. Bidang-bidang Manajemen**

Sesuai dengan kebutuhan organisasi dan tuntutan perkembangan zaman serta untuk memudahkan pengawasan (*controlling*), maka cakupan manajemen yang begitu luas dapat dibagi ke dalam bidang-bidang berikut: Manajemen Produksi, Manajemen Pemasaran, Manajemen Keuangan, Manajemen Personalia, dan Manajemen Administrasi-Akuntansi.

## 1. Manajemen Produksi

Manajemen produksi adalah manajemen yang berkaitan dengan kegiatan produksi. Apabila dikaitkan dengan pengertian manajemen maka manajemen produksi bisa diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan kegiatan produksi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang dimaksud kegiatan produksi adalah kegiatan mengubah *input* menjadi *output*. *Input* berupa faktor-faktor produksi, sedang *output* berupa barang atau jasa.

Agar manajemen produksi dapat berfungsi dengan baik dan optimal, ada dua hal yang harus dijalankan oleh manajemen produksi, yaitu:

### a. Perencanaan Produksi, meliputi perencanaan:

- 1) Bentuk dan jumlah produk  
Perencanaan bentuk dan jumlah (volume) produk sangat penting, karena berkaitan dengan permintaan konsumen dan efisiensi. Produk yang kurang dibutuhkan konsumen, atau produk yang diproduksi dalam jumlah yang terlalu banyak hanya akan menimbulkan kerugian dan pemborosan. Oleh karena itu, faktor persediaan produk harus diperhitungkan, agar terhindar dari kelebihan atau kekurangan produk. Dalam perencanaan bentuk dan jumlah produk, manajemen produksi harus bekerja sama dengan manajemen pemasaran.
- 2) Lokasi produksi (Tempat produksi)  
Dalam menentukan lokasi dilakukannya produksi (tempat produksi) perlu mempertimbangkan faktor-faktor primer seperti, letak bahan baku, letak pasar, letak tenaga kerja, tersedianya angkutan (transportasi) dan tersedianya tenaga listrik. Selain itu, perlu pula dipertimbangkan faktor-faktor sekunder, seperti rencana perluasan usaha di masa depan, sikap masyarakat setempat, dan tersedianya fasilitas pendukung lainnya.

- 3) **Proses Produksi**

Manajemen harus mempertimbangkan proses produksi apa yang paling tepat. Apakah padat karya, padat modal (mesin) atau keduanya. Sebab, dengan alasan penyerapan tenaga kerja, perusahaan tertentu (seperti pabrik rokok) sangat dianjurkan tetap menggunakan tenaga manusia walaupun sudah ada mesin pengganti yang lebih hemat biaya.
- 4) **Tata letak (*Lay out*) fasilitas produksi**

Dalam menentukan atau menyusun *lay out* (tata letak) fasilitas produksi harus mempertimbangkan beberapa faktor-faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi efisiensi dan efektivitas, perubahan bentuk produk di masa mendatang, perubahan jumlah produk, keamanan pekerja, dan kenyamanan penduduk sekitar.
- 5) **Pelaksana produksi**

Dalam hal ini manajemen harus merancang siapa saja pelaksana yang akan mengerjakan tiap bagian pekerjaan produksi.
- 6) **Standarisasi**

Standarisasi adalah penetapan standar produk dengan tujuan mengurangi atau menghilangkan variasi produk. Dengan demikian, produk yang dihasilkan bisa se bentuk, seukuran, dan sewarna untuk jenis produk yang sama. Istilah lain dari standarisasi adalah *typisasi*.
- 7) **Normalisasi**

Normalisasi merupakan perluasan dari standarisasi. Apabila standarisasi dilakukan dalam satu perusahaan, maka normalisasi merupakan standarisasi yang dilakukan oleh beberapa perusahaan. Dengan demikian, normalisasi adalah penetapan standar produk yang dilakukan oleh beberapa perusahaan dengan tujuan mengurangi persaingan antar perusahaan, sebab produk-produk mereka sama dan bisa saling menggantikan.

8) Spesialisasi

Spesialisasi adalah pengkhususan kegiatan ke bidang produksi tertentu sehingga diharapkan produk memiliki keunggulan-keunggulan yang tidak dimiliki pihak lain.

**b. Pengawasan Produksi**

Dalam pengawasan produksi, pada dasarnya manajemen harus melihat dan menilai apakah kegiatan yang dilakukan dan hasil produksi yang diperoleh sudah sesuai dengan perencanaan produksi yang telah ditetapkan atau belum. Agar efektif, pengawasan produksi memerlukan langkah *follow up* (tindak lanjut). Jika kegiatan dan hasil produksi menunjukkan nilai buruk, maka perlu diambil langkah-langkah perbaikan. Dan, bila menunjukkan nilai baik, perlu dipertahankan dan ditingkatkan.

**2. Manajemen Pemasaran**

Manajemen pemasaran adalah manajemen yang berkaitan dengan kegiatan pemasaran. Manajemen pemasaran bisa diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan kegiatan pemasaran dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun yang dimaksud kegiatan pemasaran adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan mengalirnya produk dari produsen ke konsumen, seperti kegiatan penetapan harga, pengemasan produk, promosi dan distribusi.

Agar dapat menjalankan fungsinya dengan lancar, manajemen pemasaran harus mengkaji hal-hal yang merupakan ruang lingkup manajemen pemasaran, yang meliputi:

- a. Riset pasar berarti melakukan penelitian terhadap keadaan pasar yang mencakup ciri-ciri dan jenis-jenis pasar, keadaan konsumen (keinginan, daya beli dan kepuasan konsumen), sifat persaingan, dan melihat ada tidaknya peluang. Kegiatan yang juga termasuk dalam riset pasar adalah *segmenting*, *targeting*, dan *positioning*. *Segmenting* atau segmentasi



adalah pemilihan konsumen yang akan dilayani (dibuatkan) produknya. Misalnya, perusahaan susu A memilih akan membuat susu khusus untuk anak. *Targeting* berarti membagi segmen yang sudah dipilih ke dalam beberapa kelompok. Misalnya, perusahaan susu A membagi anak menjadi tiga kelompok, yakni anak usia 0 sampai dengan 1 tahun, anak 1 tahun sampai dengan 5 tahun dan anak 5 tahun sampai dengan 10 tahun. Tiga kelompok tersebut akan dilayani dengan jenis susu yang berbeda. Adapun *positioning* berarti menempatkan produk dalam posisi tertentu. Misalnya, perusahaan susu A memosisikan susunya sebagai susu yang mengandung AA dan DHA.

- b. Pengembangan produk, yang meliputi kebijakan penambahan produk, pengubahan produk dan kebijakan lain yang berkaitan dengan produk.
- c. Kebijakan dan strategi harga, yang meliputi penetapan harga, syarat pembayaran dan besar kecilnya potongan harga.
- d. Kebijakan dan strategi promosi, yang meliputi kebijakan periklanan, strategi promosi (termasuk promosi penjualan perdana), dan strategi memelihara pelanggan.
- e. Kebijakan dan strategi distribusi, yang meliputi kebijakan penetapan saluran distribusi dan penetapan sarana distribusi.

Dalam dunia pemasaran sehari-hari, kita sering mendengar istilah 4P (*Product, Price, Promotion, Place* atau Distribusi) yang merupakan *marketing mix* (bauran pemasaran). 4P tersebut meliputi pengembangan produk, kebijakan dan strategi harga, kebijakan dan strategi promosi serta kebijakan dan strategi distribusi.

### **3. Manajemen Keuangan**

Sesuai dengan namanya, manajemen keuangan adalah manajemen yang berkaitan dengan kegiatan keuangan. Manajemen keuangan bisa juga diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan kegiatan keuangan dalam rangka mencapai tujuan yang telah

ditetapkan. Dalam melakukan fungsinya mengelola keuangan, manajemen keuangan minimal harus melakukan tiga langkah sebagai berikut:

**a. Mendapatkan Dana yang Dibutuhkan (*Raising of Fund*)**

Dalam mendapatkan dana, manajemen keuangan harus merencanakan dan memilih sumber-sumber dana yang meliputi:

1. Sumber dana *intern* (dari dalam) yang berasal dari laba ditahan, akumulasi penyusutan, cadangan, dan tambahan modal dari pemilik.
2. Sumber dana *ekstern* (dari luar) yang berasal dari pinjaman bank dan pinjaman nonbank (termasuk sumber dari pasar modal dengan cara menjual saham).

**b. Menggunakan Dana yang Diperoleh (*Allocating of Fund*)**

Dalam menggunakan dana, manajemen keuangan harus mempertimbangkan berapa dana yang digunakan untuk:

- 1) Kebutuhan operasional sehari-hari perusahaan.
- 2) Kebutuhan investasi perusahaan. Investasi (penanaman modal) bias jangka pendek dan bisa jangka panjang. Contoh investasi jangka pendek adalah pembelian surat berharga jangka pendek (seperti *promes* dan *wesel*), serta tabungan. Contoh investasi jangka panjang adalah pembelian surat berharga jangka panjang (seperti saham dan obligasi) serta pembangunan sarana jangka panjang, seperti gedung dan sejenisnya.

**c. Mengawasi Penggunaan Dana (*Controlling of Fund*)**

Dalam mengawasi penggunaan dana, manajemen keuangan harus membandingkan dengan rencana yang sudah dibuat sebelumnya. Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan rencana, baik penyimpangan jumlah maupun penyimpangan peruntukan, bisa mengacaukan kelancaran pekerjaan.

#### **4. Manajemen Personalia**

Manajemen personalia adalah manajemen yang berkaitan dengan kegiatan kepegawaian. Manajemen personalia bisa juga diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan kegiatan personalia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang dimaksud personalia adalah segala hal yang berkaitan dengan kepegawaian. Dalam menjalankan fungsinya, manajemen personalia harus mengelola hal-hal berikut di bawah ini, agar kegiatan kepegawaian dapat berjalan lancar. Hal-hal yang harus dikelola manajemen personalia meliputi:

##### **a. Perencanaan Pegawai**

Dalam hal ini manajemen personalia merencanakan jabatan dan jenis pekerjaan apa saja yang harus diisi, berapa jumlah personil yang akan mengisi dan siapa saja yang cocok untuk mengisi jabatan atau pekerjaan tersebut.

##### **b. Penerimaan Pegawai**

Manajemen personalia melakukan penerimaan calon pegawai dan kemudian melakukan seleksi untuk memilih siapa saja yang berhak menjadi pegawai.

##### **c. Pengembangan Pegawai**

Agar mampu menyesuaikan diri dengan pekerjaan, pegawai perlu mengembangkan diri melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan adalah kegiatan menambah, memperluas pengetahuan dan pemahaman yang disertai pembentukan sikap. Pelatihan adalah kegiatan menambah keterampilan untuk melakukan pekerjaan tertentu. Pelatihan bagi pegawai bisa berbentuk *on the job training* (latihan di tempat kerja) atau *apprenticeship training* (magang). Magang adalah latihan bekerja kepada karyawan senior dengan pengawasan dan penilaian tertentu dalam jangka waktu cukup lama. Dalam mengembangkan pegawai sangatlah perlu membekali pegawai dengan motivasi yang tinggi agar mereka dapat bekerja seoptimal mungkin.

**d. Penilaian Pegawai**

Menilai pegawai merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh manajemen personalia agar prestasi pegawai dapat dipantau setiap saat. Penilaian pegawai sudah seharusnya dilakukan secara objektif, adil dan teratur (berkala).

**e. Promosi, Demosi, Mutasi, dan Pemberhentian Pegawai**

Penilaian pegawai yang sudah dilakukan di atas, akan menghasilkan lima kategori prestasi, yaitu prestasi sangat baik, prestasi cukup, prestasi baik, prestasi buruk, dan prestasi sangat buruk. Prestasi-prestasi tersebut bisa ditindaklanjuti dengan hal-hal berikut.

- 1) Promosi, yaitu memberikan kenaikan jabatan karena pegawai menunjukkan prestasi yang bagus atau sangat bagus.
- 2) Demosi, yaitu memberikan penurunan jabatan karena pegawai menunjukkan prestasi yang buruk atau sangat buruk.
- 3) Mutasi, yaitu memindahkan pegawai ke bagian lain dengan pertimbangan pegawai tidak mampu mengerjakan tugas atau dinilai lebih cocok bekerja di bagian lain.
- 4) Pemberhentian, yaitu memberhentikan (PHK) pegawai dari pekerjaan dengan alasan pegawai benar-benar tidak mampu bekerja atau telah melakukan pelanggaran disiplin atau bahkan melakukan kejahatan (korupsi).

**f. Keharmonisan Pegawai**

Hubungan antar pegawai yang harmonis merupakan hal yang mutlak diperhatikan oleh manajemen personalia. Karena, ketidak-harmonisan hubungan antar pegawai bisa menimbulkan ketidak-nyamanan, yang pada akhirnya bisa menurunkan produktivitas pegawai.

**g. Kesejahteraan Pegawai**

Kesejahteraan pegawai sangat berkaitan dengan pemberian kompensasi (balas jasa) kepada pegawai yang diberikan dalam bentuk gaji (berjumlah

tetap), upah (jumlah tergantung besar kecilnya produktivitas), tunjangan-tunjangan (seperti tunjangan anak, tunjangan istri/suami, THR/Tunjangan Hari Raya), bonus, dan pensiun.

Sebagai ilustrasi dan motivasi, dalam mengembangkan karyawannya, Toyota sebagai produsen kendaraan terkenal menggunakan filosofi-filosofi **“Kaizen dan Kanban”** dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kaizen, yaitu penyempurnaan terus menerus (perbaikan berkesinambungan).
2. Kanban, yaitu pengurangan biaya lewat sistem *“just-in-time”* (tepat waktu).
3. Pengembangan potensi manusia sepenuhnya.
4. Membangun rasa saling percaya.
5. Mengembangkan prestasi tim.
6. Memperlakukan setiap karyawan sebagai seorang manajer.
7. Menyediakan pekerjaan yang stabil bagi semua karyawan.

Filosofi tersebut terbukti mampu meningkatkan produktivitas karyawan dan mutu produk.

## **5. Manajemen Administrasi dan Akuntansi**

Manajemen administrasi dan akuntansi adalah manajemen yang berkaitan dengan kegiatan administrasi dan akuntansi. Lebih lengkapnya, manajemen administrasi dan akuntansi adalah proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan kegiatan administrasi dan akuntansi. Yang dimaksud administrasi adalah segala hal yang berkaitan dengan ketata-usahaan, seperti pencatatan data, pengolahan data, pelaporan data, dan pengarsipan data. Adapun yang dimaksud akuntansi adalah tata cara pencatatan, pengelompokan, pelaporan, dan penafsiran data-data keuangan berupa transaksi-transaksi ekonomi.

Dengan melihat pengertian administrasi dan akuntansi di atas, maka ruang lingkup tugas manajemen administrasi dan akuntansi meliputi:

**a. Pencatatan Data**

Segala data yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, intern maupun ekstern, seperti pencatatan surat keluar masuk, pencatatan jumlah inventaris, jumlah pegawai dan pencatatan data-data keuangan.

**b. Pengolahan Data**

Data yang sudah dicatat, disusun dan dikelompokkan menurut bagian, fungsi, dan kronologis (urutan kejadian). Pengolahan data akan lebih mudah bila dibantu dengan sistem komputerisasi.

**c. Pelaporan Data**

Apabila dibutuhkan oleh pimpinan atau bagian-bagian lain, manajemen administrasi dan akuntansi harus bisa dengan segera melaporkan data-data yang dibutuhkan. Data yang setidaknya setiap tahun sekali harus dilaporkan itu, di antaranya data-data akuntansi, yang dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan meliputi neraca, laporan laba-rugi, dan laporan perubahan modal.

**d. Pengarsipan Data**

Pengarsipan data merupakan upaya menyimpan data secara teratur dan terorganisir agar memudahkan pencarian data. Pengarsipan data tentu membutuhkan berbagai alat, baik alat-alat konvensional seperti lemari, map, *file order*, maupun alat-alat modern seperti komputer, CD (*Compact Disc*), kaset video, kaset rekaman, dan alat-alat elektronik lainnya.

**F. Manajemen Syariah**

Menurut Didin dan Hendri (2003) dalam bukunya *Manajemen Syariah dalam Praktik*, sistem manajemen bisa dikatakan telah memenuhi Syariah bila: **pertama**, manajemen ini mementingkan perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. **Kedua**, manajemen Syariah pun mementingkan adanya struktur organisasi. Ini bisa dilihat pada surat al-

An'am: 65 yang artinya, "Allah meninggikan seseorang di atas orang lain beberapa derajat". Ini menunjukkan bahwa dalam mengatur berbagai masalah, peranan antar manusia tidak akan sama. **Ketiga**, manajemen Syariah membahas soal sistem. Sistem ini disusun agar perilaku pelaku di dalamnya berjalan dengan baik. Sistem pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, misalnya, adalah salah satu yang terbaik. Sistem ini berkaitan dengan perencanaan, organisasi dan kontrol. Islam pun telah mengajarkan jauh sebelum adanya konsep itu lahir, sebagaimana yang dipelajari selama ini sebagai manajemen ala Barat.

### **1. Manajemen Sebagai Aktivitas**

Dalam ranah aktivitas, Islam memandang bahwa keberadaan manajemen sebagai suatu kebutuhan yang tak terelakkan dan memudahkan implementasi Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat. Implementasi nilai-nilai Islam berwujud pada difungsikannya Islam sebagai kaidah berpikir dan kaidah amal dalam kehidupan. Sebagai kaidah berpikir, 'Aqidah dan Syariah difungsikan sebagai asas dan landasan pola pikir. Sedangkan sebagai kaidah amal, Syariah difungsikan sebagai tolok ukur (standar) perbuatan.

Oleh sebab itu, aktivitas manajemen yang dilakukan haruslah selalu berada dalam koridor Syariah. Syariah harus menjadi tolok ukur aktivitas manajemen. Senafas dengan visi dan misi penciptaan dan kemusliman seseorang, maka Syariahlah satu-satunya yang menjadi kendali amal perbuatannya. Hal ini berlaku bagi setiap muslim, siapa pun, kapan pun dan di mana pun. Dengan tolok ukur Syariah, setiap muslim akan mampu membedakan secara jelas dan tegas perihal halal tidaknya, atau haram tidaknya suatu kegiatan manajerial yang akan dilakukannya. Aktivitas yang halal akan dilanjutkannya, sementara yang haram akan ditinggalkannya semata-mata untuk menggapai keridhaan Allah Swt.

## 2. Peran Syariah Dalam Fungsi Manajemen

Seperti yang sudah dikemukakan di atas bahwa peran syariah Islam adalah pada cara pandang dalam implementasi manajemen. Di mana standar yang diambil dalam setiap fungsi manajemen terikat dengan hukum-hukum *syara'* (syariat Islam). Fungsi manajemen sebagaimana diketahui ada empat yang utama, yaitu: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengontrolan (*controlling*), dan pengevaluasian (*evaluating*).

## 3. Syariah dalam Fungsi Perencanaan

Berikut ini adalah beberapa implementasi syariah dalam fungsi perencanaan (Karebet Wijayakusuma, 2000: 60):

- a. Perencanaan bidang SDM. Permasalahan utama bidang SDM adalah penetapan standar perekrutan SDM. Implementasi Syariah pada bidang ini dapat berupa penetapan profesionalisme yang harus dimiliki oleh seluruh komponen SDM perusahaan. Kriteria profesional menurut Syariah adalah harus memenuhi 3 unsur, yaitu *kafa'ah* (sesuai dan ahli di bidangnya), amanah (bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab), memiliki etos kerja yang tinggi (*himmatul 'amal*).
- b. Perencanaan bidang keuangan. Permasalahan utama bidang keuangan adalah penetapan sumber dana dan alokasi pengeluaran. Implementasi Syariah pada bidang ini dapat berupa penetapan syarat kehalalan dana, baik sumber masukan maupun alokasinya. Demikian juga dalam perencanaan dana, tidak pernah direncanakan akan melakukan peminjaman dana yang mengandung unsur riba, atau pemanfaatan dana untuk menyogok pejabat, misalnya.
- c. Perencanaan bidang operasi/produksi. Implementasi Syariah pada bidang ini berupa penetapan bahan masukan produksi dan proses yang akan dilangsungkan. Dalam dunia pendidikan, misalnya, *inputnya* adalah SDM muslim dan proses pendidikannya ditetapkan dengan menggunakan kurikulum yang Islami. Dalam industri pangan,



masukannya adalah bahan pangan yang telah dipastikan kehalalannya. Sementara proses produksinya ditetapkan berlangsung secara aman dan tidak bertentangan dengan Syariah.

- d. Perencanaan bidang pemasaran. Implementasi Syariah pada bidang ini dapat berupa penetapan segmentasi pasar, *targeting* dan *positioning*, juga termasuk promosi. Dalam dunia pendidikan, misalnya, segmen yang dibidik adalah SDM muslim. Target yang ingin dicapai adalah *output* didik (SDM) yang profesional. Sedangkan posisi yang ditetapkan adalah lembaga yang memiliki *unique position* sebagai lembaga pendidikan manajemen Syariah. Dalam promosi tidak melakukan kebohongan, penipuan ataupun penggunaan wanita tanpa menutup aurat sempurna, misalnya.

#### **4. Peran Syariah dalam Pengorganisasian.**

Berikut ini adalah beberapa implementasi syariah dalam fungsi pengorganisasian (Karebet Wijayakusuma, 2000: 75):

##### **a. Aspek Struktur**

Pada aspek ini Syariah diimplementasikan pada Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu hal-hal yang berkorelasi dengan faktor profesionalisme dan bidang pekerjaan. Hal yang harus dihindari adalah penempatan SDM pada struktur yang tidak sesuai dengan bidang dan keahlian pekerjaannya. Sebab, yang pertama akan menyebabkan timbulnya kerusakan, dan yang kedua bertentangan dengan keharusan kesesuaian antar dan inter bidang keahlian dan pekerjaan.

##### **b. Aspek Tugas dan Wewenang**

Implementasi Syariah dalam hal ini terutama ditekankan pada kejelasan tugas dan wewenang masing-masing bidang yang diterima oleh para SDM pelaksana berdasarkan kesanggupan dan kemampuan masing-masing sesuai dengan bidang pekerjaan tersebut.

**c. Aspek Hubungan karyawan**

Implementasi Syariah pada aspek ini berupa penetapan budaya organisasi bahwa setiap interaksi antar SDM ada hubungan muamalah yang selalu mengacu pada *amar ma'ruf dan nahi munkar*, persuasif, dan bijak.

**5. Peran Syariah dalam Pengontrolan**

Menurut Karebet Wijayakusuma (2000), fungsi manajerial pengawasan adalah untuk mengukur dan mengoreksi prestasi kerja guna memastikan bahwa tujuan organisasi di semua tingkat dan rencana yang didesain untuk mencapainya, sedang dilaksanakan. Pengawasan membutuhkan prasyarat adanya perencanaan yang jelas dan matang serta struktur organisasi yang tepat. Dalam konteks ini, implementasi syariah diwujudkan melalui tiga pilar pengawasan, yaitu :

- a. Ketaqwaan individu. Seluruh personel SDM perusahaan dipastikan dan dibina agar menjadi SDM yang bertaqwa.
- b. Kontrol Masyarakat. Dengan suasana yang mencerminkan formula team, maka proses keberlangsungan organisasi selalu akan mendapatkan pengawalan dari para SDM-nya agar sesuai dengan arah yang telah ditetapkan.
- c. Penerapan (supremasi) aturan. Organisasi ditegakkan dengan aturan main yang jelas dan transparan serta – tentu saja – tidak bertentangan dengan syariah.

**6. Peran Syariah dalam Evaluasi**

Fungsi manajerial dalam evaluasi adalah untuk mengukur dan mengoreksi prestasi kerja bawahan guna memastikan bahwa tujuan organisasi di semua tingkat dan semua rencana yang didesain telah tercapai. Seorang pemimpin bertugas untuk memotivasi, mendorong dan memberi keyakinan kepada orang yang dipimpinnya dalam suatu entitas/kelompok untuk mencapai tujuan sesuai dengan kapasitas kemampuan yang dimiliki. (Karebet Wijayakusuma, 2000: 100).

## G. Evaluasi

### 1. Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. “Manajemen adalah proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran tertentu melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya”. Ini merupakan pengertian manajemen menurut . . .
  - a. Harold Koontz
  - b. Mary Parker Follet
  - c. George R Terry
  - d. Luther Gulick
  - e. Cyril O’ Donnel
  
2. Kepala bagian, kepala divisi dan kepala seksi umumnya menangani manajemen tingkat . . .
  - a. Atas
  - b. Puncak
  - c. Dasar
  - d. Menengah
  - e. Pelaksana
  
3. Manajemen yang bertugas menjalankan rencana kerja yang dibuat manajemen menengah adalah manajemen tingkat . . .
  - a. atas
  - b. puncak
  - c. dasar
  - d. menengah
  - e. pelaksana

4. Menurut Henry Fayol, fungsi manajemen terdiri atas . . .
  - a. *Planning, Organizing, Actuating, Controlling*
  - b. *Planning, Organizing, Motivating, Controlling*
  - c. *Planning, Organizing, Motivating, Conditioning, Controlling*
  - d. *Planning, Organizing, Standarizing, Controlling*
  - e. *Planning, Organizing, Staffing, Directing, Controlling*
  
5. Berikut ini yang bukan manfaat dari perencanaan adalah . . .
  - a. Dapat dijadikan pedoman dalam pengawasan
  - b. Memberikan kejelasan kepada setiap bagian (orang) dalam bekerja
  - c. Dapat memperkecil terjadinya kesalahan-kesalahan
  - d. Dapat menjamin proses pencapaian tujuan secara lebih efektif dan efisien
  - e. Dapat menciptakan kepastian gaji bagi sebagian kecil karyawan
  
6. Organisasi yang memberikan wewenang kepada pimpinan untuk memberi perintah langsung kepada bawahan adalah organisasi . . .
  - a. Staf
  - b. Garis
  - c. Fungsional
  - d. Garis dan staf
  - e. Fungsional dan staf

## 2. Soal Ujian

1. Jelaskan pengertian manajemen!
2. Jelaskan perbedaan manajemen puncak, manajemen menengah, dan manajemen pelaksana!
3. Sebutkan fungsi-fungsi manajemen menurut:
  - a. George R. Terry
  - b. Henry Fayol

- c. Sondang P. Siagian
  - d. Harold Koontz dan C O' Donnel
4. Perencanaan yang baik harus dapat menjawab pertanyaan 5W dan 1H. Coba jelaskan yang dimaksud 5W dan 1H!
  5. Jelaskan pengertian dan manfaat pengorganisasian.
  6. Jelaskan pengertian dari:
    - a. Organisasi garis
    - b. Organisasi fungsional
    - c. Organisasi garis dan staf
    - d. Organisasi fungsional dan staf
  7. Jelaskan tiga macam gaya kepemimpinan!
  8. Uraikan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pengawasan (*controlling*)!
  9. Sebutkan empat belas prinsip manajemen menurut Henry Fayol!
  10. Jelaskan pengertian manajemen produksi.
  11. Sebutkan hal-hal yang tercakup dalam "perencanaan produksi"!
  12. Manajemen pemasaran berkaitan dengan kegiatan pemasaran. Apa yang dimaksud dengan kegiatan pemasaran?
  13. Jelaskan hal-hal yang merupakan ruang lingkup manajemen pemasaran!
  14. Jelaskan dua macam sumber dana dalam upaya memperoleh dana!
  15. Jelaskan hal-hal yang harus dikelola manajemen personalia agar kegiatan kepegawaian berjalan lancar!
  16. Jelaskan peran syariah dalam fungsi-fungsi manajemen!



# BAB VIII

## KOPERASI

### Tujuan Pembelajaran

Dengan mempelajari bab ini, siswa diharapkan dapat :

1. Menjelaskan pengertian koperasi
2. Mendeskripsikan ciri-ciri koperasi
3. Mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan koperasi
4. Mendeskripsikan peran koperasi dalam perekonomian Indonesia
5. Menjelaskan tentang koperasi syariah

**Gambar 8.1**  
**Lambang Koperasi**



*Sumber: harapan-doa.blogspot.com*

## **A. Pengertian Koperasi**

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

## **B. Ciri-Ciri Koperasi**

Adapun ciri-ciri dan koperasi adalah sebagai berikut:

- a. Bertujuan mencari keuntungan untuk menyejahterakan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- b. Pemiliknya adalah seluruh anggota koperasi.
- c. Tanggung jawab anggota terhadap utang dan kerugian terbatas pada jumlah simpanan masing-masing anggota.
- d. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
- e. Pengelolaan (manajemen) bersifat demokratis.
- f. Pembagian keuntungan (SHU) dilakukan secara adil sesuai usaha dan simpanan anggota.
- g. Penambahan modal dapat dilakukan dengan cara meminjam kepada bank atau non bank.

## **C. Koperasi Beserta Kelebihan dan Kelemahannya**

Di Indonesia, koperasi memiliki peranan penting dan tempat khusus dalam perekonomian. Pasal 33 UUD 1945, ayat 1 berbunyi "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan". Satu-satunya badan usaha yang berdasarkan asas kekeluargaan adalah koperasi. Dengan demikian, koperasi diharapkan dapat memperkokoh perekonomian dan sekaligus sebagai *soko guru perekonomian nasional*.



## **1. Arti, Bentuk, dan Tujuan Koperasi**

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Ada dua bentuk koperasi, yaitu koperasi primer dan sekunder. Koperasi yang beranggotakan perorangan disebut koperasi primer, sedangkan koperasi yang beranggotakan koperasi-koperasi disebut koperasi sekunder. Tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur.

## **2. Landasan, Asas, dan Prinsip Koperasi**

Koperasi berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam penyelenggaraannya, koperasi melaksanakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
- c. Pembagian Sisa Hasil Usaha, (SHU (keuntungan) dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
- e. Kemandirian.
- f. Pendidikan perkoperasian.
- g. Kerja sama antarkoperasi.

## **3. Cara Mendirikan Koperasi**

Untuk mendirikan koperasi primer diperlukan paling sedikit dua puluh orang. Dan, untuk mendirikan koperasi sekunder diperlukan paling sedikit tiga koperasi. Selain itu, pendiri harus membuat akta pendirian yang di dalamnya memuat anggaran dasar koperasi. Koperasi memperoleh

status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah. Pengesahan akta pendirian diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI).

#### **4. Perangkat Organisasi Koperasi**

Perangkat organisasi koperasi terdiri atas:

- a. Rapat anggota yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.
- b. Pengurus yang dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota.
- c. Pengawas, dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota.

#### **5. Modal Koperasi**

Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari:

- a. Simpanan pokok
- b. Simpanan wajib.
- c. Dana Cadangan
- d. Hibah.

Modal pinjaman dapat berasal dari:

- a. Anggota.
- b. Koperasi lain atau anggota lain.
- c. Bank dan lembaga keuangan lain.
- d. Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya.
- e. Sumber lain yang sah.

Selain itu, koperasi juga dapat melakukan penambahan modal yang berasal dari modal penyertaan (saham). Jika terjadi pembubaran koperasi, anggota hanya menanggung kerugian sebatas simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan yang dimiliki.

Koperasi memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan koperasi adalah:

- a. Merupakan gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas kekeluargaan.
- b. Berfungsi mengembangkan potensi ekonomi anggota.
- c. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
- d. Pengelolaan secara demokratis.

Adapun kelemahan koperasi adalah:

- a. Sering terjadi penyelewengan, karena rendahnya kemampuan manajemen dan pengawasan.
- b. Jiwa usaha dari pengurus masih rendah.
- c. Sering terjadi pemborosan (inefisiensi).
- d. Umumnya anggota kurang memahami perkoperasian dan manajemen.
- e. Koperasi kadang-kadang dijadikan sebagai alat kampanye politik, hanya dikumandangkan tapi tidak digarap secara serius.

#### **D. Perangkat Organisasi Koperasi**

Dalam menjalankan kegiatannya setiap entitas akan dilakukan oleh perangkat-perangkat tertentu sesuai dengan struktur setiap entitas. Begitu juga dengan koperasi untuk menjalankan kegiatan organisasinya dibutuhkan perangkat-perangkat seperti yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Perangkat organisasi tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

##### **1. Rapat Anggota, berwenang :**

- a. Menetapkan kebijakan umum koperasi
- b. Menetapkan Anggaran Dasar
- c. Memilih, mengangkat, dan memberhentikan Pengawas dan Pengurus
- d. Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi

- e. Menetapkan batas maksimum pinjaman yang dapat dilakukan oleh pengurus untuk dan atas nama koperasi
- f. Meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengawas dan Pengurus dalam pelaksanaan tugas masing-masing
- g. Menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha
- h. Memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan pembubaran koperasi, dan
- i. Menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan oleh undang-undang ini.

## **2. Pengurus Koperasi**

Pengurus koperasi dipilih dari orang perseorangan, baik anggota maupun non-anggota dengan syarat :

- a. Mampu melaksanakan perbuatan hukum
  - b. Memiliki kemampuan mengelola usaha koperasi
  - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan
- 1) Pengurus koperasi bertugas :
- a) Mengelola koperasi berdasarkan Anggaran Dasar
  - b) Mendorong dan memajukan usaha anggota
  - c) Menyusun rancangan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi untuk diajukan kepada Rapat Anggota
  - d) Menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas untuk diajukan kepada Rapat Anggota.
  - e) Menyusun rencana pendidikan, pelatihan dan komunikasi koperasi untuk diajukan kepada Rapat Anggota.

- f) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.
  - g) Menyelenggarakan pembinaan karyawan secara efektif dan efisien
  - h) Memelihara Buku Daftar Anggota, Buku Daftar Pengawas, Buku Daftar pengurus, dan Risalah Rapat.
  - i) Melakukan upaya lain bagi kepentingan, kemanfaatan, dan kemajuan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.
- 2) Pengurus berwenang mewakili koperasi di dalam maupun di luar pengadilan

### **3. Pengawas Koperasi**

#### **a. Pengawas bertugas :**

- 1) Memberi nasihat dan pengawasan kepada Pengurus
- 2) Memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh pengurus,
- 3) Melaporkan hasil pengawasan kepada Rapat Anggota.

#### **b. Pengawas berwenang**

- 1) Menetapkan penerimaan dan penolakan Anggota baru serta pemberhentian Anggota sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
- 2) Meminta dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari pengurus dan pihak lain yang terkait
- 3) Mendapatkan laporan berkala tentang perkembangan usaha dan kinerja koperasi dan pengurus
- 4) Memberikan persetujuan atau bantuan kepada pengurus dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- 5) Dapat memberhentikan Pengurus untuk sementara waktu dengan menyebutkan alasannya.

## E. Sisa Hasil Usaha dan Dana Cadangan

Keuntungan pada koperasi disebut Sisa Hasil Usaha (SHU). SHU akan memengaruhi kesejahteraan anggota dan kemajuan koperasi. SHU yang dibagikan kepada Anggota Koperasi sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan masing-masing anggota dalam koperasi tersebut.

SHU yang dibagikan pada anggota terdiri atas dua jasa, yaitu sebagai berikut :

1. Jasa simpanan/modal, yaitu bagian dari selisih hasil usaha yang disediakan untuk para anggota berdasarkan uang simpanan mereka dan merupakan modal koperasi. Formula yang bisa digunakan untuk menghitung jasa simpanan/modal adalah sebagai berikut:

**Jasa simpanan/modal = persentase jasa simpanan x SHU Koperasi**

$$\text{Jasa simpanan per anggota} = \frac{\text{Simpanan anggota A}}{\text{Total simpanan}} \times \text{bagian jasa simpanan}$$

Persentase jasa simpanan ditetapkan oleh anggota dalam Rapat Anggota, dan dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

2. Jasa anggota/jasa usaha, yaitu bagian dari selisih hasil usaha yang disediakan untuk anggota, seimbang dengan jasanya dalam usaha koperasi. Formula yang bisa digunakan untuk menghitung jasa anggota/ jasa usaha adalah sebagai berikut :

**Jasa usaha = persentase jasa usaha x SHU Koperasi**

$$\text{Jasa usaha anggota A} = \frac{\text{Pemasukan Jasa A}}{\text{Total Pemasukan Jasa}} \times \text{bagian jasa usaha}$$

Persentase jasa usaha ditetapkan oleh anggota dalam Rapat Anggota, dan dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

## **F. Peran Koperasi dalam Perekonomian Indonesia untuk Meningkatkan Kemakmuran Rakyat**

Seperti halnya BUMN, BUMD dan BUMS, Koperasi juga memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Peran yang dijalankan koperasi di antaranya adalah:

1. Koperasi dicanangkan sebagai soko guru perekonomian Indonesia.
2. Koperasi mampu menyerap tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran.
3. Koperasi mampu menghasilkan sejumlah keuntungan yang sebagian dibagikan kepada anggota untuk kesejahteraannya.
4. Koperasi mampu menghasilkan barang dan jasa (khususnya koperasi produksi). Jumlah barang dan jasa merupakan komponen pendapatan nasional jika dilihat dari sisi PDB (Produk Domestik Bruto). Dengan demikian, koperasi mampu meningkatkan PDB.
5. Koperasi terutama yang sudah maju, ikut mendorong proses penguasaan dan alih teknologi pada masyarakat dengan penggunaan teknologi modern (komputer, mesin dan lain-lain) dalam operasional koperasi.
6. Koperasi dengan program-program sosialnya (yang didanai oleh dana sosial) dan diambil dari keuntungan koperasi, mampu melahirkan fungsi sosialnya. Seperti, memberikan sumbangan kepada yang melahirkan dan sumbangan kepada yang meninggal.

Dalam menjalankan perannya, koperasi menghadapi berbagai kendala dan tantangan di antaranya yaitu:

1. Dalam menghadapi globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas, koperasi harus mampu bersaing dengan luar negeri. Jika tidak mampu bersaing, banyak koperasi yang akan mengalami kebangkrutan.
2. Di kota-kota besar yang kehidupannya sudah mengarah pada individualisme dan kapitalisme, peran koperasi mulai ditinggalkan.
3. Masih rendahnya kemampuan manajemen pengurus dan rendahnya pengetahuan anggota tentang manajemen dan perkoperasian.

4. Koperasi kadang-kadang dijadikan sebagai alat kampanye politik, yang hanya didengung-dengungkan keberadaannya, tetapi tidak digarap secara serius.

Untuk mengatasi kendala dan tantangan-tantangan tersebut, pemerintah dan masyarakat dapat melakukan langkah-langkah berikut:

1. Mensosialisasikan kehadiran globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas beserta dampak-dampaknya.
2. Mengadakan penataran dan latihan-latihan manajemen bagi pengurus dan anggota koperasi (ini bisa dilakukan melalui Departemen Koperasi).
3. Menangani koperasi dengan serius, tidak hanya dalam tatanan wacana atau konsep saja, tetapi juga memperhatikan pelaksanaannya di lapangan.

## **G. Koperasi Syariah**

### **1. Sejarah Koperasi Syariah**

Pembicaraan tentang sejarah koperasi syariah di Indonesia, tentunya tidak bisa dilepaskan dari sejarah koperasi konvensional di Indonesia. Lahirnya koperasi di Indonesia dilatar-belakangi oleh permasalahan yang sama yaitu menentang individualisme dan kapitalisme secara fundamental. Pada Tahun 1908 Budi Utomo menganjurkan berdirinya koperasi untuk keperluan rumah tangga. Kemudian untuk menggiatkan pertumbuhan koperasi, pada akhir tahun 1930 didirikan jawatan koperasi yang tugasnya menerangkan dan menjelaskan seluk beluk mengenai perkoperasian.

Setelah berdirinya jawatan koperasi tersebut maka angka pertumbuhan koperasi menunjukkan peningkatan. Jika pada tahun 1930 jumlah koperasi hanya 39 buah dengan jumlah anggota sebanyak 7.848 orang, maka pada tahun 1939 jumlahnya menjadi 574 buah dengan jumlah anggotanya mencapai 52.555 orang.



Tonggak sejarah koperasi berikutnya adalah kongres koperasi pertama yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 1947 di Tasikmalaya, dimana pada kongres tersebut terbentuklah Sentra Organisasi Koperasi Rayat Indonesia (SOKRI). Momen ini juga membuat tanggal 12 Juli dijadikan sebagai Hari Koperasi Nasional.

Pada tanggal 15 sampai 17 Juli 1953 dilangsungkan kongres koperasi Indonesia ke-2 di Bandung. Kongres ini menghasilkan keputusan antara lain merubah SOKRI menjadi DKI (Dewan Koperasi Indonesia), dan mewajibkan DKI membentuk lembaga pendidikan koperasi dan sekolah menengah koperasi di daerah, serta kongres ini juga mengangkat Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia.

Selanjutnya pada tanggal 1 sampai 5 September 1956 diselenggarakan kongres koperasi yang ke-3 di Jakarta. Keputusan kongres membahas mengenai hubungan Dewan Koperasi Indonesia dengan *International Cooperative Alliance* (ICA) dan sejak 9 Februari 1970, setelah beberapa kali berganti nama, Dewan Koperasi Indonesia yang disingkat Dekopin dinyatakan sebagai organisasi gerakan koperasi Indonesia yang berbadan hukum dan mempunyai tingkatan organisasi di tingkat nasional, wilayah, dan tingkat kabupaten /kota, sampai saat ini.

Seiring dengan perkembangan koperasi konvensional, menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, saat ini telah ada 3020 koperasi Syariah di Indonesia yang bergerak di berbagai macam kelembagaannya. Kelahiran koperasi Syariah di Indonesia dilandasi oleh Keputusan Menteri (Kepmen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Keputusan Menteri ini memafasilitas berdirinya koperasi Syariah menjadi koperasi jasa keuangan Syariah (KJKS) atau unit jasa keuangan Syariah (UJKS). Dengan adanya sistem ini, telah membantu koperasi serba usaha di Indonesia memiliki unit jasa keuangan Syariah.

Dengan demikian dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan perkembangan koperasi Syariah di Indonesia, ke depannya mutlak diperlukan adanya Undang-Undang Koperasi Syariah tersendiri yang mampu mengakomodir percepatan dari Koperasi Syariah itu sendiri.

## 2. Prinsip Koperasi dalam Islam

Terdapat empat prinsip utama dalam koperasi:

- a. Pada dasarnya muamalah itu boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan pada keharamannya
- b. Muamalah itu mesti dilakukan atas dasar suka sama suka
- c. Muamalah yang dilakukan itu harus memandang maslahat dan menolak mudarat bagi manusia
- d. Muamalah itu terhindar dari kezaliman, penipuan, manipulasi, spekulasi, riba, dan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syarak.

## H. Koperasi Sekolah

*Gambar 8.2*  
**Koperasi sekolah**



*Sumber: sman1sukarajasm.sch.id*

Koperasi sekolah merupakan bentuk pendidikan berkoperasi yang dapat dilakukan semenjak dini. Para pelajar diharapkan dapat melestarikan nilai-

nilai koperasi dengan berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi sekolah. Dengan berperan secara aktif dalam kegiatan koperasi sekolah diharapkan memberikan pembelajaran kepada para siswa, seperti :

1. Sebagai sarana pendidikan dan praktik berkoperasi secara langsung dan mempelajari cara berwirausaha
2. Sebagai sarana latihan untuk para siswa agar memiliki jiwa mandiri dan sosial seperti watak koperasi
3. Membantu pemerintah dalam mendidik generasi penerus yang akan berpartisipasi dalam pembangunan
4. Membantu penyediaan kebutuhan siswa teruma kebutuhan sekolah seperti seragam, alat tulis, dan atribut lainnya. (Kinanti, 2013).

Prosedur pendirian koperasi sekolah dapat dilakukan dengan mengikuti langkah – langkah sebagai berikut :

**1. Persiapan**

Persiapan awal dilakukan dengan mengundang pihak-pihak terkait seperti guru dan siswa untuk mempersiapkan struktur yang harus ada dalam koperasi sekolah, keanggotaan, dan usaha yang akan dijalankan.

**2. Penentuan Pengurus**

Untuk menetapkan pengurus koperasi sekolah, harus dilakukan rapat yang diarahkan oleh pembina, yaitu guru. Dalam rapat ini disusun kepengurusan beserta tugas dan wewenangnya.

**3. Penentuan Modal**

Penentuan modal koperasi sekolah dilakukan di dalam rapat penentuan modal dan bidang usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi. Dalam rapat ini akan ditentukan bagaimana manajemen koperasi sekolah.

#### 4. **Penyusunan Anggaran Dasar**

Penyusunan Anggaran Dasar dilakukan untuk menyiapkan profil koperasi sekolah yang akan didirikan secara lengkap dan rinci beserta kepengurusan, kenaggotaan, dan usaha yang dilakukan.

#### 5. **Pengesahan**

Setelah langkah 1 sampai 4 dilakukan, baru dilakukan pengajuan pengesahan koperasi sekolah kepada instansi terkait, dalam hal ini adalah Kementerian UMKM melalui Dinas terkait.

### **I. Evaluasi**

#### **1. Pilihlah Jawaban yang Paling Tepat**

1. Landasan koperasi Indonesia adalah . . .
  - a. Pancasila dan Undang Undang Koperasi No. 25 tahun 1992
  - b. Undang Undang koperasi No. 17 dan kekeluargaan
  - c. Kekeluargaan dan kemandirian
  - d. Pancasila dan UUD 1945
  - e. Kejujuran dan keterbukaan
2. Koperasi berdasarkan atas dasar . . .
  - a. Kekeluargaan
  - b. Kejujuran
  - c. Keterbukaan
  - d. Persamaan
  - e. Kemandirian
3. Nilai nilai berikut adalah yang mendasari kegiatan koperasi, *kecuali* . . .
  - a. Kekeluargaan
  - b. Bertanggung jawab

- c. Menolong diiri sendiri
  - d. Persamaan
  - e. Kehati hatian
4. Berikut ini adalah prinsip koperasi, *kecuali* . . . .
- a. Keanggotaan koperassi bersifat terbuka dan sukarela
  - b. Pengawasan oleh peserta diselenggarakan secara demokratis
  - c. Koperasi wajib menolong fakir miskin di daerahnya
  - d. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen
  - e. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi
5. Koperasi primer sedikitnya di dirikan oleh paling sedikit . . . .
- a. 15 orang
  - b. 18 orang
  - c. 20 orang
  - d. 22 orang
  - e. 25 orang
6. Koperasi setelah dilengkapi dengan akte pendirian mendapat pengesahan dari . . . .
- a. Dewan Koperasi Indonesia
  - b. Menteri
  - c. Dirjen Koperasi
  - d. Walikota
  - e. Bupati
7. Salah satu pernyataan di bawah ini *bukan* wewenang rapat anggota koperasi
- a. Menetapkan kebijakan umum koperasi
  - b. Mengubah anggaran dasar

- c. Memilih, mengangkat, dan memberhentikan pengawas dan pengurus
  - d. Memilih/ mumentukan orang orang yang mengelola koperasi
  - e. Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi
8. Rapat anggota luar biasa dilakukan atas prakasa . . .
- a. Pengurus dan penasehat
  - b. Pengawas dan tokoh koperasi
  - c. Pengawas dan camat setempat
  - d. Rapat anggota dan dewan penyantun
  - e. Pengurus atau atas permintaan paling sedikit  $\frac{1}{5}$  (satu perlima) jumlah anggota
9. Tugas pengawas koperasi adalah sebagai berikut, *kecuali* . . .
- a. Mengangkat dan memberhentikan pengurus
  - b. Memberi nasehat dan pengawasan terhadap pengawas
  - c. Melakuukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh pengurus
  - d. Melaporkan hasil pengawasan kepada rapat anggota
  - e. Mengusulkan calon pengurus
10. Perangkat organisasi koperasi adalah . . .
- a. Pengawas, pengurus, dan dewan penasehat
  - b. Pengawas, rapat anggota, dan dewan pembina
  - c. Pengawas, pengurus, dan rapat anggota
  - d. Pembina, direktur koperasi, dan pengawas
  - e. Pembina, pengawas, dan rapat anggota
11. Dari pernyataan di bawah ini yang bukan merupakan wewenang rapat anggota adalah . . .
- a. Menetapkan kebijakan umum koperasi

- b. Mengubah anggaran dasar
  - c. Memilih, mengangkat dan memberhentikan pengawas
  - d. Menetapkan rencana kerja
  - e. Menjalankan usaha koperasi
12. Salah satu usaha yang dapat dilakukan pemerintah untuk memajukan koperasi adalah ...
- a. Memberi pinjaman kepada koperasi tanpa bunga
  - b. Tiap tahun memberi hibah
  - c. Memberi usaha khusus atau memonopoli suatu bidang
  - d. Bantuan pengembangan jaringan usaha koperasi
  - e. Mewajibkan pegawai pemerintah belanja pada toko koperasi

13. Perhatikan keterangan berikut !

Surplus hasil usaha Rp.17.500.000,-

Dibagi sebagai berikut:

40 % untuk cadangan setelah itu sisanya untuk:

Jasa simpanan	20%
Jasa anggota	40 %
Kesejahteraan pegawai	10%
Kesejahteraan pengurus	20%
Dana daerah kerja	10%
Simpanan Astuti	Rp. 500.000,-
Jumlah simpanan	Rp.20.000.000,-
Pembelian Astuti	Rp. 1.000.000,-
Jumlah pembelian anggota	Rp.25.000.000,-

Surplus hasil anggota untuk Astuti dari penghitungan di atas adalah ...

- a. Rp 52.500
- b. Rp 168.000

- c. Rp 220.500
  - d. Rp 230.500
  - e. Rp 240.000
14. Salah satu tujuan koperasi sekolah adalah . . .
- a. Mendidik, menanamkan dan memelihara jiwa siswa berkoperasi sedini mungkin
  - b. Agar siswa siap menjadi pemimpin koperasi masa depan
  - c. Mendidik siswa agar jujur dan tidak menyalahgunakan kekuasaan
  - d. Agar menjadi wirausahawan yang tangguh setelah dewasa
  - e. Agar menjadi pedagang yang sukses
15. Berikut ini adalah ciri koperasi sekolah, *kecuali* . . .
- a. Tidak perlu berbadan hukum, cukup mendapat pengakuan
  - b. Kegiatan usaha simpan pinjam
  - c. Keanggotaan mempunyai jangka waktu terbatas
  - d. Penyelenggaraan koperasi sekolah disesuaikan dengan tugas siswa
  - e. Anggota koperasi sekolah terdiri atas siswa

**2. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini :**

- 1. Jelaskanlah pengertian koperasi
- 2. Apa saja yang menjadi prinsip koperasi syariah!



# DAFTAR KEPUSTAKAAN

Al-Kaaf, Abdullah Zaky, 2002, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, Bandung: Pustaka Setia.

Al-Shadar, Muhammad Baqir, 2008. *Iqtishaduna*, Terjemahan, Jakarta: Zahra.

Alam S, 2013, *Ekonomi, untuk SMA/MA kelas X*, Jakarta: Gelora Aksara Pratama.

Anto, M.B. Hendri. 2003. *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*. Yogyakarta: Ekonisia.

Bank Indonesia, 2014, *Buku Panduan Guru Ekonomi SMA/MA, Muatan Kebanksentralan*, Jakarta: Bank Indonesia.

Chapra, Umer. 2000. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gemainsani Press.

Geminastiti, Kinanti, Nella Nurlita, 2013, *Ekonomi, untuk SMA/MA kelas X Peminatan*, Bandung: Yrama Widya.

Hornby, 2000, *Oxford Advanced Learner's Dictionary (Sixth Edition)*, Oxford: Oxford University Press.

Iska, Syukri, dan Rizal, 2005, *Lembaga Keuangan Syariah*, STAIN Batusangkar Press.

Iska, Syukri 2012, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, Yogyakarta: Fajar Media Press.

- Iska, Syukri; SuswatiHendriani; dan ElfinaYenti 2013, *Model Materi Ajar Integratif Bidang Studi Ekonomi di SLTA Kabupaten Tanah Datar: Integrasi Konsep Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam*, (Hasil Penelitian Ilmu Terapan), Batusangkar.
- IkatanAkuntan Indonesia (IAI). 2010. *Pernyataan Standar Akuntansi Syariah*, Jakarta
- Kelana, Said 1996, *Teori Ekonomi Mikro*, Jakarta, PT. Rajawali
- Karim, Adiwarmarman 2003, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta, IIIT Indonesia.
- Karim, Adiwarmarman 2006, *Ekonomi Makro Islami*, Jakarta, IIIT Indonesia.
- Karim, Adiwarmarman, 2001. *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Mannan, M. Abdul, 1999. *Islamic Economics, Theory and Practice*, Terjemahan, Yogyakarta: Verisia Yogya Grafika
- Muflih, Muhammad. 2006. *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nuh, Muhammad, 2013. *Pengantar Kurikulum 2013*. Jakarta, Kemendikbud.
- Prastowo, Andi, 2012. *Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif: Menciptakan Metode Pembelajaran yang Menarik dan Menyenangkan*, Jogjakarta: DIVA Press.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia, 2008, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Qardhawi, Yusuf, 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press,
- Richards, Jack. C., 2001, *Curriculum Development in Language Teaching*, Cambridge: Cambridge University Press.

Richards, Jack. C and Schmidt, Richard, 2002. *Longman Dictionary of Language Teaching & Applied Linguistics (Third Edition)*, Harlow: Pearson Education Limited.

Sударsono, Heri, 2004. *Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Ekonisia.

Suprayitno, Eko. 2005. *Ekonomi Islam, Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Yogyakarta: Graha Ilmu.



## TENTANG PENULIS

**Elfina Yenti, S.E, Ak., M.Si, CA.** merupakan dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, Sumatera Barat. Penulis menyelesaikan S-1 Akuntansi dan S-2 Perencanaan Pembangunan (PPn) di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas (UNAND) Padang. Karya ilmiah yang pernah dihasilkan di antaranya: Penilaian Kinerja Perusahaan, Sistem Pengendalian Intern, Konsep Akuntansi Syariah, Dampak Kemiskinan terhadap Pendidikan dan Kesehatan, Pengaruh Pemahaman Nilai-nilai Syariah terhadap Perilaku Bisnis Padangang Minang pada Pasar Aur Kuning Bukittingggi, Analisis Pengukuran Kinerja dengan Menggunakan *Balance Scorecard* Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Batusangkar, dan Analisis Tingkat Pengungkapan Laporan keuangan Pemerintah Daerah.

**Dr. H. Syukri Iska, M.Ag.**, lahir di Padang pada tanggal 19 Oktober 1963, pengampu mata kuliah Ushul Fiqh, Lembaga Keuangan Syariah, Manajemen Lembaga Keuangan Syariah Non Bank, Ekonomi Islam dan Fiqh Kontemporer di IAIN Batusangkar (sebelumnya STAIN). Saat ini tengah menjabat sebagai Direktur Pascasarjana IAIN Batusangkar, yang sebelumnya dipercaya oleh Menteri Agama sebagai Ketua STAIN Batusangkar periode 2002-2006 dan 2006-2010. Pendidikan formal S1 di Fakultas Syariah IAIN "IB" Padang, S2 di IAIN/UIN "SH" Jakarta dan S3 nya pada *Shariah and Management Departement* di Malaya University Kuala Lumpur (Ph.D. Program). Setelah menyelesaikan pendidikannya pada jenjang Doktor dalam bidang kajian Perbankan Syariah, penulis telah semakin memfokuskan keilmuannya pada

Ekonomi Islam dan juga terlibat sebagai praktisi Ekonomi Islam, seperti Anggota Dewan Pengawas Syariah, dan salah seorang pendiri beberapa BMT. Dalam aktifitas sosial, banyak bergelut dalam berbagai organisasi baik tingkat kabupaten maupun tingkat propinsi. Di antaranya adalah Ketua Umum MUI Tanah Datar, Wakil Ketua Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Sumbar dan Ketua Himpunan Ilmuan & Sarjana Syariah (HISSI) wilayah Sumbar.

Ketertarikan penulis terhadap ekonomi Islam juga diwujudkan dalam berbagai karya ilmiah yang telah banyak dipublikasikan di berbagai media baik cetak maupun elektronik. Di antaranya dalam bentuk buku, antara lain *Lembaga Keuangan Syariah* (2005) dan *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia, Menurut Perspektif Fikih Ekonomi* (2012). Dalam bentuk jurnal, seperti; *E-Commerce Dalam Perspektif Fikih Ekonomi* (Juris, 2010), *Dilema Skim Murabahah pada Perbankan Syariah* (Miqot, 2011), *Revitalisasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Ekonomi Syariah* (Juris, 2012). Pada tahun 2016 karya tulis penulis dalam bentuk jurnal juga telah dipublikasi dalam Jurnal Internasional terindeks Scopus pada *Transylvanian Review* Vol XXIV, No. 5, Special Issue 2016 dengan judul *The Process of Dispute Settlement of Inheritance in Indegenous People Minangkabau, Luhak Nan Tuo, Tanah Datar*. Selain itu, penulis juga telah banyak menjadi pembicara atau peserta dalam berbagai seminar dan *workshop* di tingkat Regional, Nasional dan Internasional.